BUDAYA INTELEKTUAL MAHASISWA : SUATU IMPIAN

KENTINGAN

DETAK NURANI MAHASISWA

MERENTAS JALAN REFORMASI

EDISI REFORMASI

KENTINGAN

MAJALAH MAHASISWA UNS

BERLARI DI TENGAH ARUS REFORMASI

Sungguh hanya rasa lega dan lega yang kami rasakan begitu edisi enam ini bisa kami selesaikan. Menghilangkan "tradisi" memang hal yang sangat berat. Tradisi yang kami maksud disini adalah kebiasaan molor dari dead line yang ditentukan, dan rasanya kalimat pembenaran bahwa bukan penerbitan mahasiswa namanya kalau tidak telat, rasanya satu-satunya yang bisa menghibur kami. Meskipun sesungguhnya tidak ada maksud dari kami untuk membiarkan telatnya edisi enam ini. Begitu kami memulai mengerjakan edisi ini, gejolak kampus mulai menghangat dan semakin memanas, hal tersebut mengakibatkan awak redaksi tidak bisa tinggal diam untuk "memeriahkan" gejolak tersebut. Belum lagi dengan adanya masa rekruitmen dan pembekalan (MARKA) bagi anggota baru yang juga menyita perhatian dari sebagian awak redaksi lainnya, tinggalah beberapa gelintir personal redaksi yang bisa dihitung dengan sebelah tangan yang berusaha menyelesaikan edisi enam ini di tengah isyu yang bergerak sangat cepat dan berganti terus menerus.

Edisi kali ini kami namakan edisi khusus reformasi. Di fokus utama kami coba menelusuri ke belakang dan sedikit kedepan akan kondisi negeri tercinta ini. Mundurnya Pak Harto sebagai presiden RI karena tekanan dari aksi mahasiswa yang demikian kuat dan tidak lagi hanya diperankan oleh kampus elit, namun sudah melibatkan semua kampus di tanah air ini jelas merupakan satu lembar sejarah penting bagi negeri ini. Redaksipun tidak ingin ketinggalan dalam merekam peristiwa tersebut. Terlepas dari akurat atau tidaknya analisis, kami mencoba mengajak pembaca sekalian merenungkan kembali keberhasilan rejim Soeharto dan ketimpangan-ketimpangan yang perlu diperbaiki demi kemajuan dan kegemilangan bangsa ini di masa datang.

Sajian lainnya di fokus khusus kami coba menggali sejauh mana eksisitensi UNS di mata wong Solo. Usia UNS yang sudah memasuki tahap dewasa, 22 tahun, menimbulkan pertanyaan apakah memang selama itu keberadaan UNS sudah bisa membawa manfaat bagi masyarakat luas. Disampng itu kami juga mencoba menggali minat mahasiswa terhadap kegiatan intelektual atau penalaran melalui rubrik akademika.

Dalam edisi kali ini memang sengaja ada beberapa rubrik yang kami hilangkan, karena untuk menyesuaikan dengan tema sebagai edisi khusus. Terakhir kami hanya bisa mengucapkan selamat menikmati sajian ini,dan khusus dari redaksi mengucapkan terima kasih kepada anggota baru (MARKA) yang sudah mulai menunjukkan komitmennya kepada LPM dan Majalah Mahasiswa Kentingan khususnya, tanpa bantuan mereka mungkin edisi ini akan lebih terlambat lagi.

❑ REDAKSI

MAJALAH MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

KENTINGAN
DETAK NURANI MAHASISWA

Diterbitkan oleh LEMBAGA PENERBITAN MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA. STT : dalam proses. *Pelindung*: Rektor UNS, *Penasihat*: Pembantu Rektor III UNS, *Pembina*: Dr. Andrik Purwasito, DEA, *Pemimpin Umum*: Imron Rosyid TR, *Sekretaris Umum*: Puspitaningsih, *Pemimpin Redaksi*: Ulin Ni'am Yusron, *Sekretaris Redaksi/Wapimred*: Ichwan Prasetyo, *Dewan Redaksi*: Imron Rosyid TR, Ulin Ni'am Yusron, Ichwan Prasetyo, Nurul Hidayah W, Dwi Retno Palupi, *Pemimpin Litbang*: Nurul Hidayah W, *Staf Litbang*: Teguh Supriyadi, M. Ridlo, *Pemimpin Usaha*: Yuniar Pramudani Indri H, *Staf Usaha*: Zabidi, Mukhlis, *Reporter*: Himawan Arif, M. Agus Salim, Anhar Widodo, Dedy, Ichwan Ch, Dinding, Nina, Niken, Wursarweni, Dwi Utami K, Ivan, Rafika D, Faisal, Meilani, Cerira, Lina, Dories, Tuti, Yunanto , Maria.*Fotografer*: Ali Rustamaji, *Layout/Artistik*: Arifa'I

Alamat Redaksi : LPM UNS, Jl. Urip Sumoharjo 110 Kampus Mesen Surakarta 57128

KENTINGAN
DETAK NURANI MAHASISWA

Mengucapkan selamat atas diwisudanya :

- **NURUL HIDAYATI ZUHUD**
  (Dewan Redaksi MM. Kentingan)
- **INDAH NURUL**
  (Reporter MM. Kentingan)
- **ABEL DOS SANTOS**
  (Reporter MM. Kentingan)

HARUS MENINGGALKAN ARENA PERJUANGAN BUKAN BERARTI HARUS MENANGGALKAN IDEALISME KARENA DI DEPAN MASIH ADA ARENA PERJUANGAN YANG LEBIH BERAT

FOKUS UTAMA_07 : TRANSISI DEMOKRASI

... tidak ada transisi yang tahap awalnya bukan sebagai akibat dari - langsung atau tidak langsung - perpecahan penting dalam rezim otoriter itu sendiri, terutama selama perpecahan yang berfluktuasi antara kelompok garis keras dan garis lunak.

... adanya budaya di tingkat elit politik yang sangat khas dan juga pada tingkat massa yang kurang kondusif bagi pengembangan demokrasi. Ada anggapan bahwa elit politik cenderung memiliki budaya yang memonopoli kebenaran, sementara di tingkat massa perilaku emosional dan primordial masih terlibat

FOKUS KHUSUS_24 : UNS DI MATA WONG SOLO

Secara institusional UNS memang memiliki LP2M sebagai lembaga pengabdian pada masyrakat dan juga memiliki lembaga penelitian, tetapi sifatnya masih sebatas mengejar "cum". Penelitian yang dihasilkan masih bersifat akademik, belum ke arah yang berhubungan dengan interaksi sosial antara kampus dan masyarakat.

UNS jangan kalah dengan perguruan tinggi lain. Memang tidak mudah mengejar ketinggalan dalam bidang keilmuan. Jika kita berlari, maka perguruan tinggi lain juga akan berlari. Kalau mau mendahului UI atau UGM ya, rasanya memang akan terkesan memaksakan diri

ARTIKEL LEPAS_40 : YAYASAN-YAYASAN SOEHARTO

Yayasan-yayasan yang diketuai anak, menantu, serta keluarga besan Soeharto, selain merupakan alat bisnis keluarga Soeharto, sekaligus menunjang politik luar negeri Soeharto

"Lima tahun lagi saya akan kembali berdiri di mimbar ini untuk menyampaikan pidato pertanggung jawaban!"

Secara politik terdapat kebebasan mengadakan pendidikan politik untuk mendorong terbentuknya wadah-wadah politik rakyat di segala sektor, yang akan membuka pengawasan rakyat yang sadar politik terhadap semua kebijakan pemerintahan. Hanya dengan demikianlah maka akan mampu menjawab kebutuhan kesejahteraan rakyat dan tuntutan guna melaju ke tahap perwujudan sebuah Pemerintahan Koalisi Demokratik.

SERAMBI_57 : *SAYA DUKUNG 200% AKSI MAHASISWA*

Mahasiswa menyurakan suara saya juga, karena itu saya dukung 200%. Orang film sering dibungkus tuduhan sebagai tidak bermoral, maka saya titipkan moral saya pada para mahasiswa".

maraknya dunia sinetron akhir-akhir ini, menurutnya hal tersebut sebagai sesuatu yang positif sebagai kemungkinan prospek film Indonesia , namun bila daya saing tidak ditingkatkan bisa dipastikan akhirnya akan mati juga seperti film Indonesia. Untuk itulah dia berharap agar film dikembalikanpada orang film.

Berlari Di Tengah Arus Reformasi ○ *Surat Redaksi* ❑ 03 ○

Ketika Tuhan Begitu Jauh ○ *Swara Mereka* ❑ 06 ○

Selamat Tinggal Rezim Soeharto ○ *Fokus Utama* ❑ 10 ○

Dwi Fungsi ABRI, Duri dalam Daging? ○ *Fokus Utama* ❑ 14 ○

ANGKATAN 1998, Aktor Politik Runtuhnya Rezim Orde Baru ○ *Fokus Utama* ❑ 17 ○

Dari Demonstrasi Ke Revolusi ○ *Fokus Utama* ❑ 21 ○

Tumpas Kelor, Tradisi Pergantian Kekuasaan ○ *Fokus Utama* ❑ 23 ○

Drs. Ahmad Dahlan Rais, -- Perpustakaan Belum Optimal ○ *Fokus Khusus* ❑ 26 ○

UNS Hidup Dan Tumbuh Di Alam Orde Baru Yang Penuh Dengan Rekayasa ○ *Fokus Khusus* ❑ 27 ○

Pembangunan Ekonomi Orde Baru dan Resesi Ekonomi di Indonesia ○ *Artikel Lepas* ❑ 28 ○

Merentas Jalan Reformasi ○ *Bidik* ❑ 31 ○

Agenda Reformasi ○ *Artikel Lepas* ❑ 37 ○

Korban dan Rekayasa Politik ○ *Kolom* ❑ 47 ○

Pulang ○ *Cerpen* ❑ 49 ○

Budaya Intelektual Mahasiswa – Suatu Impian ○ *Akademika* ❑ 51 ○

Jajak Pendapat -- **Budaya Intelektual Mahasiswa** ○ *Akademika* ❑ 53 ○

Menengok Budaya Bangsa – **Makanan Khas Kota Berseri** ○ *Kentrung* ❑ 55 ○

Juara Dunia dari UNS ○ *Serambi* ❑ 57 ○

Hubungan Kraton Dan Pemda, Disharmonis? ○ *Sekitar Kita* ❑ 59 ○

GRAy. Koes Moertiah Wirabhumi -- **Kraton Sebagai Cagar Budaya** ○ *Sekitar Kita* ❑ 61 ○

Desain Kulit Muka : Arifa'i
Ilustrasi Dalam : Arifa'i
Foto Kulit Muka : Dok SOLO POS

○ AKADEMIKA_51 : Budaya Intelektual Mahasiswa – Suatu impian

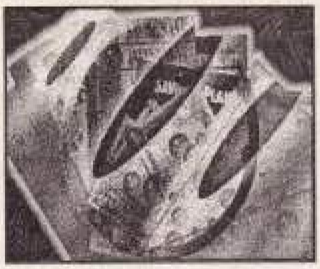

... apatisme mahasiswa tidak lahir begitu saja, tetapi ia lahir dari kondisi yang tercipta. Sebaliknya sikap kritis mahasiswa pun sama. "Kekritisan muncul dan lahir ditengah-tengah mahasiswa tidak seketika, tetapi ada proses yang dilalui"

○ SEKITAR KITA_59 : Hubungan Kraton dan Pemda-- Disharmonis

Surakarta sebagai salah satu sentra kebudayaan Jawa jelas tidak bisa begitu saja menghilangkan eksisitensi kraton dalam perjalanan dinamika kehidupannya. Fungsi kraton memang bukan lagi sebagai pemegang legitimasi kekuasaan formal, perannya telah diambil alih oleh pemerintah daerah.

EPIGRAM-EPIGRAM KEMANAKAH?

Utang......utang......utang
Orde Baru malang melintang
gali lubang tutup lubang
hutan-hutan habis ditebang
tambang-tambang kering kerontang
tanah garapan telah hilang
kemanakah kekayaan rakyat melayang?

UNDANG-UNDANG

Utang.......utang......utang
Orde Baru malang melintang
aktivis-aktivis pada hilang
mayat tak dikenal bergelimpang
Masih berlakukah undang-undang?

PENCULIK BUKAN SWASTA

Bila ada penculik bukan swasta
itu pertanda kemunafikan merajalela
Bila penguasa sudah menculik rakyatnya
itu pertanda ada kriminal dalam istana

mei 1998
Kuslan Budiman

GELOMBANG KEBANGKITAN

Lebih baiklah kita tak usah saling bersumpah
asal terpatri dalam jiwa
bahwa kita tidak akan saling menyerah
karena bukankah sudah saling dengar suara yang selalu
mengeluh dan merintih
terlalu lamanya sekeluarga kita sengsara,menderita,tersiksa
tak punya harkat, sampai-sampai harga-diri
hilang nilai di kampung halamannya sendiri.

Dengarkanlah suara auman marah,dendam dan benci
dengarkanlah airbah dahsyat menerpa-terjang segala kuasa
tak takut berjuta serdadu yang walaupun dengan peluru api
mendesing membakar diri kita
lalu kita mau apa?
Tak melawan mati
melawan adalah memang hak dan kewajiban
tak ada jalan lain
tak ada lain pilihan
lagi pula memang ini yang kita pilih.

Kalau tali jerat yang di lehernya itu tinggal disentak
mengapa tidak segera saja direnggut-tarik
kalau dia terlepas maka kitalah sebagai pengganti
marilah berebut cepat
sebelum diri kita dikirimnya menyusul yang dulu-dulu.

Okey, dengarlah auman garang dan berani
gagahnya terpancang kukuh setelah puluhan tahun mati
ketakutan
setelah puluhan tahun begitu terhina
ditipu, disiksa, dipermalukan serta dilecehkan
dengarkanlah suara dahsyat gelombang yang segera datang
menendang menerjang
karena selama ini terlalu lama kita dibodohkan
karena selama ini terlalu lama kita menjadi sapi perahan
karena terlalu lama tersumbat-mampet di bendungn
sudah terlalu lama
terlalu lama dia berkuasa
walaupun katanya sudah tua dan peot
tetap saja bagaikan bandot
masih terus mau,terus mau
menunggangi kita, memeras kita
menghisap dan menipu kita
menyiksa kita.

Dulu kita nyaris mati ketakutan
kini dengarlah suara itu
suara gelombang kebangkitan
suara kita bersama
segera menerpa-menerjang semua benteng pertahanan
yang dibangunnya selama tiga dasawarsa.

Jadi,
dengarlah itu suara dahsyat menggelombang raksasa
sudah dekat ,terus mendekat
dan dia datang, datang, segera datang!

Mei Raya 98

KETIKA TUHAN BEGITU JAUH

Ketika Tuhan begitu jauh, kita semakin lengah terhadap lemparan-lemparan batu yang melukai kepala-kepala kita. Ketika Tuhan begitu jauh, kita semakin lupa untuk sekedar menyadari bahwa kita masih bernama manusia. Ketika Tuhan begitu jauh, kita semakin gagap untuk sekedar mengucapkan Astafirgullah, Ketika Tuhan begitu jauh, kita semakin menyadari bahwa kitalah yang lebih, yang Maha yang seakan-akan hendak mengalahkan kekuasaan-Nya. Ketika Tuhan begitu jauh, kita pun terbirit melarikan diri menjauhi-Nya.

Ya, Allah.
Bumi ini seakan-akan Kau akan kiamatkan besok pagi, dan kami tak Kau beri kesempatan untuk berbenah sehingga kepala-kepala yang Kau anugerahi otak, akal dan pikiran tidak sempat difungsikan kembali. Dan emosi-emosi mulai menguasai manusia-manusia. Kita pun tahu bahwa emosi itu telah ternodai dengan tetesan tinta-tinta setan yang pada akhirnya melukai dan merusak pemandangan mata.

Tuhan,
Dengan kuasa tangan-Mu, kami berharap.
Belailah kembali rambut kami yang mulai kusut, dan pijitlah kembali sehingga anugerah-Mu bisa kami fungsikan kembali. Dan satu permohonan yang paling sederhana adalah jadikanlah hari-hari kami seperti bulan Ramadhan dimana setan-setan dan teman-teman, serta relasi-relasinya Kau penjarahkan, Kau dekam dalam sel pengap tanpa udara. Dan pada akhirnya kami berjalan sesuai dengan tuntunanmu.

Juni 1998

TRANSISI DEMOKRASI

... tidak ada transisi yang tahap awalnya bukan sebagai akibat dari - langsung atau tidak langsung - perpecahan penting dalam rezim otoriter itu sendiri, terutama selama perpecahan yang berfluktuasi antara kelompok garis keras dan garis lunak.

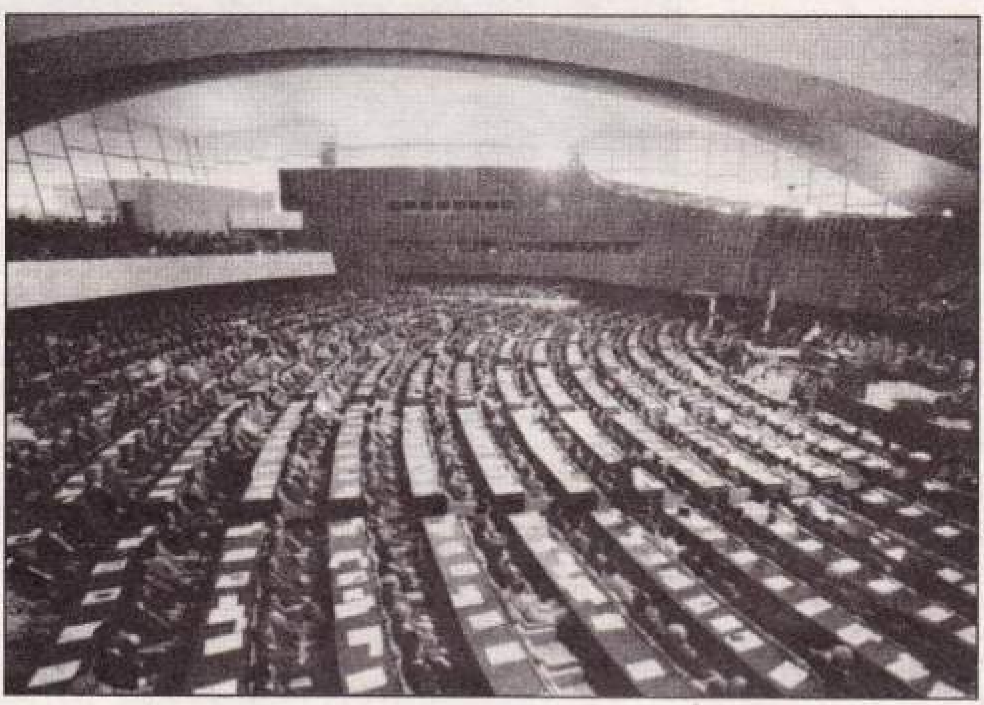

Repro Tempo

Ada kejadian dan tendensi yang sama yang melanda seluruh penjuru dunia di penghujung abad XX ini, tak terkecuali di Republik Indonesia, yaitu demokratisasi. Hampir seluruh isi jagad ini mementaskan lakon yang sama, dengan dimeriahkan darah dan air mata dan kadang dengan epilog bernuansa suka cita. Semuanya punya jalan cerita yang sama yakni bangkitnya kekuatan rakyat melawan kekuasaan rezim otoriter represif dengan didampingi maraknya isu pelaksanaan HAM. Dimulai dari Amerika Latin, Afrika, Eropa Timur dan juga Asia. Khusus di Asia dimulai dari Filipina (1986), Taiwan (1987), Pakistan (1988), Thailand (1992) dan Korea Selatan (1993). Kini nuansa yang berkembang dan dipentaskan di negara-negara tersebut mulai terasa prolognya di negeri tercinta ini. Mau tidak mau kita harus membuka mata dan telinga terhadap gejolak yang berkembang di kawasan nusantara, yang semua itu membawa lakon yang sama yaitu krisis kepercayaan terhadap elit politik (penguasa) yang kemudian dilanjutkan dengan maraknya aksi menuntut suasana baru dalam kehidupan politik negeri ini.

Kebanyakan literatur sekarang tentang transisi demokratis dari kekuasaan rezim otoriter represif menitikberatkan pada pentingnya perpecahan rezim pada tahap awal masa transisi. Salah satunya adalah apa yang dikemukakan oleh Guillermo O'Donnell dan Phillipe Schmitter, yakni:

... tidak ada transisi yang tahap awalnya bukan sebagai akibat dari - langsung atau tidak langsung - perpecahan penting dalam rezim otoriter itu sendiri, terutama selama perpecahan yang berfluktuasi antara kelompok garis keras dan garis lunak.

Demikian juga Adam Przeworsky berpendapat:

Ketika beberapa perspektif dari keterbukaan muncul, mereka selalu melibatkan beberapa kelompok penguasa yang mencari dukungan politik dari kekuatan-kekuatan yangada hingga saatnya dihilangkan dari arena politik oleh rezim otoriter. Hal ini tidak berarti sekali liberalisasi itu dimulai, hanya partner-partner terpilih yang secara politikdikerahkan; sekali tanda itu terlihat, gelombang mobilisasi massa sering terjadi. Akan tetapi kelihatannya permulaan krisis dalam transisi menuju denokrasi sebenarnya digerakkan oleh kelompok dalam blok penguasa untuk memperoleh dukungan dari sumber-sumber luar.

Memang selama sepuluh tahun terakhir ini khasanah pemikiran tentang demokratisasi banyak diwarnai oleh hasil-hasil pemikiran empiris yang salah satunya adalah karya O'Donnell dan Whitehead , yakni *Transisi Menuju Demokrasi* (1986). Karya ini mengkaji proses transisi rezim-rezim otoriter di Amerika Latin dan Eropa Selatan, kajian ini kemudian memunculkan apa yang disebut "teori-teori transisi", yang merupakan kritik terhadap teori modernisasi dan teori radikal.

Menurut mereka yang berpegang pada teori transisi, rezim-rezim tersebut berhasil ditransformasikan melalui proses-proses kompromi dan negosiasi. Dari hasil riset empiris mereka tidak diperoleh bahwa dipakainya strategi revolusioner dapat menumbangkan rezim otoriter tersebut. Hampir semua pihak yang berperan dalam transisi tersebut menolak cara-cara radikal dan revolusioner dalam rangka mencapai tahapan reformasi atau tujuan-tujuan reformis. Kesimpulan umum yang diperoleh, *pertama*, faktor-faktor sosial struktural tidak cukup untuk menjelaskan hakikat sebuah transisi politik, yakni transisi dari rezim represif otoriter ke rezim demokrasi. *Kedua*, rezim otoritrian akan runtuh dengan sendirinya tanpa berhubungan sama sekali dengan struktur kekuasaan ekonomi dan sosial. *Ketiga*, elit politik, para birokrat, para penyelenggara negara merupakan pemeran utama dalam transisi rezim.

Berbeda dengan perspektif di atas, Indonesia yang di waktu-waktu ini sedang mengalami tahap "metamorfose", perubahan rezim di Indonesia akan tetap dipengaruhi oleh situasi ekonomi dan sosial. Dua fenomena yang menentukan transisi rezim di Indonesia adalah disintegrasi antara negara dan modal, serta friksi elit. Solidnya rezim Orde Baru karena hampir semua faksi modal diintegrasikan dalam *dirigiste-state*. Rezim *dirigiste* ini dibangun di atas basis kebijakan merkantilis industrial sehingga memungkinkan modal (dimanifestasikan dalam wujud golongan konglomerat) dan negara melakukan hubungan yang saling menguntungkan. Demikian juga tak tergoyahkannya elit politik karena "keberhasilan" penerapan paket lima undang-undang politik *dibarengi* penerapan secara "paksa" konsep mayoritas tunggal yang tidak memberi kemungkinan hadirnya golongan oposisi di dalam lingkungan elit politik negeri ini.

Demonstrasi mahasiswa di Beijing, arus Demokratisasi ?

Padahal dalam alam demokrasi yang namanya perbedaan pendapat adalah hal yang jamak atau biasa. Dengan kondisi seperti di atas kemungkinan tersebut dimatikan atau dipaksa untuk mati. Dialog dalam tataran pemerintahan yang sudah matang adalah hal yang seharusnya rutin dilakukan. Baik dialog di dalam elit politik sendiri, antar fraksi, antar golongan, maupun antar partai politik dalam menentukan suatu kebijakan untuk kemaslahatan seluruh rakyat, bukan hanya kebijakan yang disahkan untuk kepentingan satu golongan apalagi satu keluarga. Apalagi dialog yang wujudnya adalah dialog vertikal antara rakyat dengan pemerintahnya. Namun demikian di Indonesia ternyata selama rezim orde baru (o dan b kecil) masih ada dinding-dinding pembatas komunikasi secara vertikal tersebut.

Demokrasi sebagai batang pengukur bagi penentuan kualitas hubungan rakyat dengan pemerintah maupun dalam hubungan antar negara, antara negara-negara barat (sebagai induk demokrasi) dengan negara-negara dunia ketiga, para pakar barat sendiri berpendapat bahwa demokrasi barat tersebut tidak bersifat universal. Michael Dobbs dan Higginson berpendapat bahwa penerapan praktek demokrasi barat tanpa memperhitungkan kondisi lokal akan lebih banyak membawa malapetaka daripada manfaat. Demikian juga dengan Huntington, demokrasi barat adalah suatu *micum*, tidak bersifat universal.

Ada beberapa hal yang perlu diketahui dari demokrasi itu sendiri yang merupakan salah satu hasil kebudayaan barat. Demokrasi merupakan warisan budaya barat, yang tak lain adalah anak kandung peradaban kristen barat. Ia berdiri di atas pemisahan kekuasaan keduniawian dan kerohanian. Asas dasarnya adalah adanya kedaulatan hukum yang benar-benar ditegakkan dengan segala konsekuensinya. Demokrasi hanya bisa berkembang bila ia tumbuh dalam masyarakat yang mengenal pluralisme pendapat terutama dalam masyarakat madani. Di dalamnya kekuasaan politik dijalankan berdasarkan pelimpahan kekuasaan rakyat kepada lembaga perwakilan dan dia berdiri di atas prinsip individualisme.

Meskipun demikian demokrasi tetaplah sistem yang paling baik dalam mekanisme dan batang pengukur hubungan antara negara dengan warganya, antara negara dengan negara. Asas terpenting yang tidak boleh ditinggalkan terletak pada pengakuan dan penghormatan pada hak-hak rakyat dan martabatnya sebagai manusia. Kuncinya adalah bagaimana cara mengakui dan menghormati hak-hak rakyat, yang dalam perkembangannya disesuaikan dengan budaya struktur sosial, tingkat pendidikan, jumlah kaum intelektual, serta perkembangan ekonomi masyarakat. Elit politik harus mampu membangun kerja sama dengan warganya atas dasar persuasi secara rasional melalui dialog dengan warganya dalam suhu rendah.

adanya budaya di tingkat elit politik yang sangat khas dan juga pada tingkat massa yang kurang kondusif bagi pengembangan demokrasi. Ada anggapan bahwa elit politik cenderung memiliki budaya yang memonopoli kebenaran, sementara di tingkat massa perilaku emosional dan primordial masih terlibat

Dalam suatu negara yang menganut asas demokrasi hal yang tidak boleh dilupakan adalah adanya pergantian elit politik atau pimpinan elit politik secara kontinu. Pembatasan masa jabatan kepala negara yang jelas, serta mekanisme pengawasan terhadap pemerintahan yang transparan tanpa ada pengaruh antara satu lembaga dengan lembaga lainnya yang tentunya sudah punya fungsi dan peran masing-masing. Lord Acton mengatakan *powers tends to corrupt*. Kekuasaan yang terlalu lama berada di tangan seseorang akan menimbulkan kebijakan yang semata-mata didasari pertimbangan memperoleh popularitas, atau langkah manipulatif dalam rangka memastikan agar tetap berkuasa.

Berbicara tetang iklim demokrasi di Indonesia maka yang terlintas adalah demokrasi yang merupakan hasil karya dan perjalanan panjang bangsa ini yang akhirnya melahirkan istilah demokrasi pancasila. Ia berangkat dari demokrasi barat yng dikombinasikan dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri. Namun demikian selama perjalanan panjang bangsa ini sejak rezim orde lama hingga rezim orde baru pelaksanaan semua asas-asas dalam sistem demokrasi belum bisa terwujud dengan baik. Yang ada justru semakin banyaknya jargon-jargon berpredikat demokrasi pancasila seperti ekonomi pancasila dan sejenisnya, yang itu semua tak lebih dari sekedar retorika saja. Demokrasi dan demokratisasi di Indonesia sampai berakhirnya rezim orde baru (yang identik dengan rezim Soeharto) masih saja berkutat dalam problema-problema kultural. Pada masyarakat bangsa ini yang notabene semakin tahu politik masih saja ada penyakit politik yang lumayan kronis yaitu penyakit tergantung pada atas. Dan mau tidak

mau itu semua memang salah satu akibat dari sistem yang dikembangkan rezim orde baru, dimana pendidikan politik bagi rakyat disumbat (salah satunya melalui konsep massa mengambang) dan iklim dialog serta budaya kritik terhadap penguasa dibenturkan pada undang-undang anti subversi.

Hambatan kultural bagi pengembangan demokrasi di Indonesia selama ini dan sampai berakhirnya rezim orde baru, *pertama*, adanya budaya di tingkat elit politik yang sangat khas dan juga pada tingkat massa yang kurang kondusif bagi pengembangan demokrasi. Ada anggapan bahwa elit politik cenderung memiliki budaya yang memonopoli kebenaran, sementara di tingkat massa perilaku emosional dan primordial masih terlibat. *Kedua*, Masih tersisanya budaya feodal terutama dalam hubungan *patron-klien* yang diwarnai budaya *paternalistik*. Contoh paling kelihatan adalah *sowannya* pimpinan lembaga tertinggi negara ke kepala negara, padahal dengan logika demokrasi seharusnya kepala negaralah yang yang dipanggil oleh lembaga tertinggi negara. Sedangkan dalam kenyataannya kultur politik pada hakikatnya dibentuk oleh keserasian antara kultur bangsa itu dengan struktur politiknya.Dan dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa pada kenyataannya kondisi kultural khas orde baru merupakan produk rekayasa struktur politik selama tiga puluh tahun lebih (sampai turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan). Kenyataan ini bersumber dari pilihan rezim orde baru sendiri yang mementingkan model rekayasa politik dibandingkan model partisipatif, yang itu semua tak lain bersumber dari strategi stabilisasi politik negara. Kesimpulannya, sampai saat ini, sampai saat lahirnya orde reformasi masih ada pekerjaan bangsa ini yang perlu segera diselesaikan untuk menuju kehidupan bangsa yang lebih baik. Pekerjaan itu adalah pengembangan iklim demokrasi bagi perbaikan kultur politik yangsemua itu akan menjamin kelangsungan pengembangan dan pemberdayaan bidang lainnya.

Demonstrasi menuntut hak, arus demonstrasi di Indonesia.

❑ **Tim Foku s Utama**

Drs. DARMANTO YATMAN, SU., Budayawan Jawa Tengah Dan Dekan Fakultas Psikologi UNDIP

Foto: Kentingan

Wacana Reformasi Masih Di Tangan Penguasa

Bagaiman pandangan anda terhadap aksi mahasiswa yang demikianmarak menuntut perubahan bagii negeri ini?

Ya, saya senang. Itu kan salah satu bentuk kepedulian mereka. Tapi saya lihat dua bulan pertama belum terkonsep, belum konseptual.Tuntutannya masih reformasi terus. Sementara istilah reformasi wacananya masih dikuasai opleh pihak lain. Kalau orang sekarang ngomong reformasi bukan reformasinya mahasiswa tetapi reformasinya kelompok lain, dari ABRI atau dari orang lain. Dan mahasiswa masih bergerak di sekitar situ saja, soal reformasi. Go;alar juga sudah bicara soal reformasi. Jadi sudah to, belum ada kemajuan strategi. Penguasaan wacana itu penting. Kalau wacana itu dikuasai orang lain, ya kita nggak punya daya lagi, ya harus diterobos lagi. Dari segi strategis mereka juga terisolasi, karena LSM tidak bersuara sama dengan mereka, kemudian rakyat kebanyakan mungkin juga sama pemikirannya dengan mahasiswa,, tapi ya itu, tuidak ada jaringannya, ya memang kalau begitu kan menjadi sebuah gerakan politik. Tetapi secara strategi harus ada itu, *link-gate* atau organisasi begitu.

Atau itu justru akan menjadiksn bahwa gerakan mahsiswa sekarang murni tanpa aliansi dengan pihak lain?

Mungkin mahasiswa bangga itu murni. Tetapi itu kan bahasa hegemoninya, bahasa kekuasaan ya, itu terisolasi. Itu diisolasi tetapi *rumangsane* murni sehingga tidak kena tindakan represif aparat atau pemerintah. Jadi ya *slamet*, tapi terisolasi.

Apakah ini nanti akan menjadi embrio bagi lahirnya gerakan revolusi di Indonesia?

Itu sangat tergantung pada keberhasilan penguasa atau pemerintah sendiri dalam mengatasi masalah-masalah yang ada. Sebetulnya reformasi kan harus dilakukan penguasa. Kalau itu berhasil, ya nggak ada gunanya *omongane bocah-bocah* itu. Tapi bukannya tak ada manfaatnya. Itu jelas akan memberi *pressure* atau tekanan pada pemerintah untuk mengadakan reformasi. Jadi klau pemerintah melakukan reformasi sudah ada pengaruh dari gerakan mahasiswa itu sendiri. Tapi ya, itu tadi, tidak mungkin kan terjadi revolusi kalau pemerintah berhasil. Karena sekarang belum busa kita lihat indikasi yang jelas. Harga dollar turun tetapi di satusisi pemerintah harus nomboki pembenhan bank sampai berpuluh-puluh trilyun. Ya, memang berat sekali, tetapi kalau berhasil tidak akan terjadi revolusi.

❑

Ichwan

Selamat Tinggal
REZIM SOEHARTO

Bulan Mei 1998 adalah tahun berakhirnya kekuasaan Soeharta yang telah berkuasa selama 32 tahun. Turunnya Soeharto tidak berarti telah membunuh semua virus mematikan yang berkembang saat dia berkuasa atas negeri ini. Turunnya presiden Republik Indonesia kedua dari kursi kekuasaannya masih meninggalkan sistem, masih meninggalkan aturan main yang masih dipakai oleh penggantinya. Bahkan penggantian atau pengalihan kekuasaan tersebutpun memakai aturan main dari kekuasaan Soeharto.

Adalah suatu kenyataan yang tak bisa disangkal bahwasannya negara Republik Indonesia di masa orde baru lebih maju, jauh lebih maju dibanding saat orde lama berkuasa. Tingkat kemakmuran penduduknya meningkat, jumlah penduduk miskin berkurang, tempat-tempat pendidikan bertambah dan berkembang pesat, jalan-jalan semakin lebar. Prestasi yang belum terlupakan adalah saat negeri tercinta ini berhasil meraih penghargaan FAO di era 80-an, yaitu keberhasilan Indonesia dalam berswasembada pangan. Memang pantas di saat-saat tersebut, Soeharto sebagai presiden RI ke dua mendapat gelar *Bapak Pembangunan*. Keberhasilan tersebut adalah hal yang sangat wajar. Keberhasilan tersebut merupakan harapan semua pihak, negara dan rakyat dalam setiap proses pembangunan. Namun ada satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam setiap keberhasilan yang telah diperoleh, yaitu koreksi atas keberhasilan itu. Apakah keberhasilan yang gemilang yang berhasil diperoleh saat rezim orde baru berkuasa dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Apakah keberhasilan tersebut tidak diikuti dengan tumbuh dan berkembangnya virus-virus berbahaya bagi kehidupan bangsa ini di waktu selanjutnya. Apabila keberhasilan tersebut justru diikuti oleh berkembangbiaknya virus yang mematikan bagi dinamika dan kehidupan bangsa ini, maka beban beratlah yang akan ditanggung oleh generasi baru dari bangsa ini.

Bulan Mei 1998 adalah tahun berakhirnya kekuasaan Soeharta yang telah berkuasa selama 32 tahun. Turunnya Soeharto tidak berarti telah membunuh semua virus mematikan yang berkembang saat dia berkuasa atas negeri ini. Turunnya presiden Republik Indonesia kedua dari kursi kekuasaannya masih meninggalkan sistem, masih meninggalkan aturan main yang masih dipakai oleh penggantinya. Bahkan penggantian atau pengalihan kekuasaan tersebutpun memakai aturan main dari kekuasaan Soeharto. Orang bijak berkata bahwa membangun adalah dari kekurangan-kekurangan yang ada. Berikut ini akan kita lihat sebarapa jauh kekuasaan Soeharto atau rezim Soeharto meninggalkan pekerjaan besar bagi generasi baru bangsa ini. Terlepas dari benar atau tidaknya analisis ini, semuanya hanya dimaksudkan untuk mencari celah dan jalan yang bisa ditempuh untuk membawa bangsa tercinta ini ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih gemilang.

Mantan Presiden Soeharto Foto: Ist

Berbicara tentang kekuasaan Soeharto tidak bisa dilepaskan dari perjalanan karir Soeharto sendiri. Berikut ini kutipan bebas tentang perjalanan karir Soeharto, dikutip dari Benedict R. O'G Anderson, " *Old State, New Society: Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspective*", dalam *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia* (Ithaca, N.Y: Cornell University Press, 1990).

Lahir tahun 1921 sebagai anak pegawai rendah di desa di daerah kerajaan Yogyakarta, Soeharto tumbuh dalam alam depresi. Krisis ekonomi, kedudukan orang tua yang bukan dari kalangan elit, serta kesempatan memperoleh pendidikan yang suram karena kekuasaan rezim kolonial. Sekolahnya hanya sampai berhenti sampai ketika ia lulus tahun 1939 dari sekolah dasar muslim di Solo. Musim panas tahun 1940 ia mendaftar dan mendapat kursus latihan dasar kemiliteran dari pemerintah kolonial, dilanjutkan training lanjut bulan Desember. Saat Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942, Soeharto telah berpangkat sersan. Ia lalu menapaki kekuasaannya dari tingkat bintara sebagai aparat negara kolonial yang tujuan pokoknya adalah tidak lebih sebagai pertahanan internal, terpisah dari Tentara Kerajaan Belanda (KNIL).

Jika saat itu Jepang tidak menyerang negeri tercinta ini, Soeharto mungkin akan mengakhiri hari-harinya sebagai tentara KNIL, yang merupakan hak prerogatif kulit putih. Dengan hancur dan bubarnya KNIL, Soeharto kemudian masuk menjadi polisi. Jika saja Jepang memenangkan perang pasifik, Soeharto mungkin meniti karir sebagai aparat keamanan kolonial Jepang. Tahun 1943, kemunduran Jepang dalam perang menyebabkan untuk membangun kekuatan tambahan pribumi yang dinamakan PETA (Pembela Tanah Air). PETA ini terdiri dari 66 batalyon yang ditempatkan berdasar daerahnya tanpa staf komando pusat dan komandan batalyon sebagai pemimpin

tertinggi. Akhirnya Soharto bergabung sampai menjadi komandan kompi (sekitar seratus orang). Pasukan ini akhirnya dibubarkan Jepang tahun 1945. Jika saja Belanda sudah dalam posisi untuk kembali mengontrol seperti halnya Inggris di Malaya atau Amerika di Philipina, sangat mungkin Soeharto akan bergabung kembali dalam KNIL ataupun posisi kolonial. Sampai hal ini tidak ada bukti aktivitas nasionalis hingga tiba saat kemerdekaan negeri tercinta ini.

Segera saja Soeharto terlarut dalam revolusi. Di dalam lingkungan angkatan bersenjata Rebublik yang dibentuk asal-asalan, tidak terlatih, dan persenjataan yang sangat minim membuatnya segera dapat meraih posisi penting dan kenaikan pangkat yang sangat cepat. Tentu saja hal tersebut ditunjang oleh pengalamannya dalam tentara kolonial. Dalam usia 21 tahun pangkat sersan di pundaknya, tahun 1950 dalam usia 29 tahun pangkat letnan kolonel telah disandangnya dengan reputasi yang gemilang. Lapangan kegiatan utamanya adalah ikut dalam penumpasan pemberontakan daerah dan pemberontakan Islam dan memimpin operasi pembebasan Irian Barat yang secara militer gagal. Mungkin karena ia adalah sedikit dari pejabat senior yang tidak pernah mendapatkan pendidikan dan latihan di Amerika, ia ditunjuk oleh Soekarno sebagai komandan pasukan tempur elit angkatan darat, KOSTRAD. Dari kantor inilah peranan Soeharto dalam peristiwa G 30 S diawali. Kemudian secara de facto ia memegang kekuasaan negara/presidentiil setelah adanya alih kekuasaan *i coup de force* tanggal 11 Maret 1966, dan secara resmi menggantikan Soekarno sebagai Presiden pada tahun 1968.

Dimulainya kekuasaan Soeharto, mulailah era kepemimpinan yang dikenal dengan era pemerintahan ore Baru. Sejak berkuasanya rezim orde baru inilah lembaga-lembaga demokratis seperti DPR/MPR, pemilu dan partai-partai politik tidak bisa diharapkan menjadi kekuatan pengontrol kekuasaan pemerintah. Yang terjadi adalah sistem politik yang dijalankan rezim berhasil mengontrol dan megkooptasi semua fungsi strategis lembaga demokrasi. Rezim orde baru yang awal berdirinya bertujuan untuk mewujudkan pengamalan Pancasila dan UUD

Pembangunan sektor agraris Foto: Repro Prospek

1945 secara murni dan konsekuen, dengan dikangkanginya hak-hak politik rakyat semakin menunjukkan kalau rezim orde baru semakin anti demokrasi. Tumbuh suburnya kelompok-kelompok pro demokrasi menunjukkan matinya iklim demokrasi di negeri ini. Demokrasi yang digembor-gemborkan hanya sebatas retorika saja.

Kelompok-kelompok pro-demokrasi tersebut bergerak untuk menuntut perubahan. Menurut Dr. Yusril Ihza Mahendra perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang menyangkut restrukturisasi hubungan antara lembaga tinggi dan tertinggi negara, untuk mengurangi kecenderungan kekuasaan eksekutif dalam praktek penyelenggaraan negara. Mereka juga menuntut revisi aturan kepartaian, untuk memungkinkan dibentuknya partai-partai baru (banyaknya tuntutan untuk segera dicabutnya paket Lima Udang-Undang Politik). Sistem massa mengambang juga dituntut untuk segera di akhiri. Sistem inilah yang telah membatasi dan membunuh hak-hak politik rakyat, pemerintah bergerak dalam kecenderungan untuk mengabaikan suara rakyat. Adanya tuntutan-tuntutan tersebut sebenarnya juga ada respon dari negara, hanya dalam hal ini posisi negara dalam menghadapinya cenderung defensif tidak proaktif. Padahal arus perubahan tidak akan dapat dibendung selamanya. Dan terbukti meledak dengan aksi mahasiswa dalam skala nasional yang dimulai sejak bulan Februari 1998 dengan tuntutan utama turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan, dengan dasar pemikiran bahwa turunnya Soeharto akan membuka jalan bagi terealisasinya tuntutan-tuntutan politik tersebut.

Masih menurut Dr. Yusril Ihza Mahendra, pemerintah orde baru yang merupakan gabungan dari kaum militer, birokrat sipil dan kaum teknokrat terkesan berat hati untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut. Dan penolakan tersebut dikemukakan dengan alasan-alasan yang terkesan berusaha untuk tetap mempertahankan status quo. Bahkan terasa adanya keinginan untuk mensakralkan hal yang *profan*.

Berdasarkan analisis perimbangan kekuatan politik yang dibangun rezim Soeharto memang terasa sulit untuk memenuhi keinginan para aktivis pro demokrasi tersebut. Jalan tengah yang bisa ditempuh adalah mengoptimalkan fungsi dan peran lembaga DPR/MPR. Hal tersebut bisa dilakukan dengan revisi terhadap TAP MPR dan UU. Dan inilah pekerjaan besar bagi rezim pasca Soeharto. Sementara itu menurut mantan Menteri Transmigrasi dan PPH, Siswono Yudohusodo, seperti yang dikutip *Solopos* (18/05, *1998*) mengatakan bahwa saat ini komposisi MPR dan DPR yang ada perlu dirasionalisasikan agar memiliki kemampuan dan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat. Tidak terkooptasi oleh eksekutif atau bahkan terkooptasi oleh *one man show*-nya Soeharto. Lebih lanjut Siswono mengatakan bahwa sampai saat kejatuhan Soeharto anggota MPR dan DPR terkesan hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah dan organisasi induknya. Untuk membuka jalan bagi terlaksananya demokrasi politik diperlukan empat agenda politik yang harus segera diselesaikan, yaitu penyempurnaan GBHN, pemilihan presiden dan wapres pasca Soeharto, dan juga periodesasi masa jabatan presiden.

Berbicara masalah pembangunan ekonomi di masa Soeharto, memang kita akan dihadapkan pada keajaiban yang menakjubkan. Rezim Soeharto mampu membawa bangsa ini menuju ke kehidupan yang semakin baik. Tingkat pendapatan penduduk yang relatif cukup, serta jumlah penduduk miskin yang semakin berkurang. Akan tetapi ternyata kenyataan yang mempesonakan mata tersebut menyimpan bom

Pembangunan sektor idustri. Foto:Repro Prospek

gan menambah hutang luar negeri. Di lain pihak ekspor non migas juga semakin meningkat, akan tetapi hal tersebut juga tidak sesuai dengan impor yang jauh lebih tinggi lagi. Kwik Kian Gie secara tepat menggambarkan kondisi ini dengan:" Harga yang harus kita bayar dari semua keberhasilan pembangunan orde baru, adalah habisnya cadangan minyak, gundulnya hutan dan membengkaknya hutang luar negeri dengan segala akibatnya."

Dari hal-hal tersebut di atas mau tidak mau kita harus menerima bahwa keadaan negeri tercinta in masih berada dalam

waktu ketimpangan-ketimpangan yang bisa meledak sewaktu-waktu. Dan memang bom waktu itulah yang akhirnya meledak dan memaksa Soeharto harus turun dari kursi kepresidenan.

Indonesia yang masih termasuk dalam kategori dunia ketiga, juga masuk sebagai negara penghutang terbesar di dunia setelah Meksiko, Brasil dan Argentina. Hutang luar negeri Indonesia pada masa orde baru telah mengambil alih kedudukan yang sebelumnya diduduki India. Sampai tahun 1994 komitmen hutang luar negeri Indonesia telah mencapai US$ 100 milyard. Dan sampai tahun 1998 berdasarkan perkiraan *Econit Advisory Group*, dalam Economic Outlook 1998 hutang luar negeri Indonesia sudah mancapai 144 milyar dollar AS. Artinya, komposisi hutang luar negeri Indonesia terhadap PDB (Pendapatan Domestik Brutto) mencapai 72%. Karena PDB yang biasanya dijadikan patokan pertumbuhan ekonomi nasional hanya sebesar 200 milyar dollar AS. Sebuah beban besar yang tak terbayangkan untuk menanggung dan harus membayarnya. Inilah kebanggaan semu, Indonesia malah terpuruk pada hutang luar negeri yang jumlahnya luar biasa besar.

Keajaiban ekonomi sebagai kata-kata yang digunakan selama rezim Soeharto berkuasa, muncul karena selama ini kebanyakan orang terpaku dengan data statistik yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata 6,9% per tahun dari PDB.Padahal cara hitung seperti itu hanyalah bohong-bohongan saja, uang yang dihitung adalah milik orang lain yang dianggap milik sendiri atau menghitung modal asing sebagai kekayaan nasional. Cara hitung yang dipakai untuk menghitung PDB adalah, PDB=C+I+G+(X-M). Dimana C adalah pengeluaran konsumsi swasta, I sebagai pengeluaran investasi swasta, G pengeluaran pemerintah (konsumsi+investasi), X adalah ekspor barang dan jasa, serta M adalah impor barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang selama ini dibanggakan sebenarnya tidak bertumpu pada sektor riil namun hanya den-

pemusatan kekayaan dan penguasaan sektor ekonomi dan kekayaan yang memusatkan pada sekelompok orang, satu golongan, atau bahkan satu keluarga atau segelintir orang dibangun dan dipertahankan dengan menerapkan stabilitas nasional. Praktek tersebut mendasarkan pada praktek politik yang menerapkan kepatuhan dan ketaatan yang luar biasa kepada rezim orde baru, tidak ada oposisi, diwujudkannya dwi fungsi ABRI, tidak ada kebebasan pers, dan ditebasnya protes-protes politik.

tahap dan kondisi sebagai negara miskin. Kondisi perekonomian Indonesia oleh Suryadi A. Rajab (*Pijar No.6 Th VIII/1996*) digambarkan dalam lima sudut pandang. *Pertama*, dengan berkah negeri yang kaya raya akan sumber daya alam sebagai salah satu sumber ekonomi terpenting, dalam pengelolaannya rezim orde baru mengembangkan sistem pengelolaan yang timpang. Pembangunan ekonomi selalu dikedepankan, selalu dipentingkan. Hal tersebut kemudian menyaratkan pentingnya stabilitas. Namun demikian keberhasilan di sektor ini menimbulkan ketimpangan-ketimpangan. Salah satu contohnya adalah semakin lebarnya jurang pemisah antara golongan kaya (yang minoritas dan hanya satu golongan saja) dengan golongan miskin yang sebagian besar memang rakyat kecil. Slogan demokrasi ekonomi selalu dipajang-pajang, namun dalam kenyataannya sistem ekonomi yang dikembangkan hanya semakin menguntungkan satu golongan tersebut dan golongan yang miskin (yang mayoritas) juga tidak ada perubahan. Distribusi kekayaan hanya terpusat pada satu golongan, satu pihak, dan tentu saja termasuk golongan pejabat tinggi negara.

Kedua, penguasaan dan pemusatan ekonomi pada satu golongan menyebabkan sistem pemberian upah buruh juga tidak sesuai dengan harapan. Pendapatan banyak orang terlalu rendah sehingga nilai tukar mereka terhadap barang-barang juga rendah. *Ketiga*, perkembangan ekonomi juga menyebabkan timbulnya sistem ekonomi yang timpang, yaitu berkembangnya sistem monopoli. Sistem ekonomi yang dalam UUD 1945 didasarkan atas asas kekeluargaan ternyata memang demikian dalam prakteknya. Dalam arti, sistem ekonomi hanya mementingkan kepentingan satu "kelurga", atau satu golongan minoritas.

Keempat, praktek ekonomi terus berjalan dalam praktek yang di dalamnya sangat besar keterlibatan aparatus negara. Golongan atau keluarga atau bahkan pribadi yang memiliki hubungan dekat dengan aparatus negara atau pejabat tinggi dapat dengan mudah menguasai sektor-sektor perekonomian. Inilah sistem ekonomi yang dikatakan sistem *koncoisme* atau *kroniisme*. Dan pola seperti inilah yang menyebabkan tumbuh suburnya korupsi dan kolusi.

Kelima, pemusatan kekayaan dan penguasaan sektor ekonomi dan kekayaan yang memusatkan pada sekelompok orang, satu golongan, atau ciptakan produk-produk hukum baru, baik berupa UU maupun Peraturan Pemerintah. Akan tetapi ternyata produk hukum yang dihasilkanpun masih tetap membawa predikat bagi stabilitas nasional, sehingga sifat-sifat produk hukum yang dihasilkanpun masih mengandung unsur-unsur represif. Sebagi contoh adalah produk Undang-Undang Kepolisian yang disitu masih memberi peluang bagi polisi untuk bertindak melanggar hak asasi manusia, unsur represif yang diterapkan bagi obyek hukum masih begitu besar. Demikian juga dengan Undang-undang Lingkungan Hidup.

Disamping itu, kerja dari lenbaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum di negeri ini pun masih belum bisa bersifat mandiri sepenuhnya. Kekuasaan eksekutif masih sangat besar pengaruhnya pada kemandirian lembaga hukum. Sehingga kasus-kasus yang berhubungan atau bernuansa politik selalu diselesaikan dalam kerangka untuk kelangsungan rezim, selalu diutamakan pada keselamatan aparatus negara (rezim) yang ada di baliknya. Contoh paling nyata adalah Kasus Marsinah yang sampai sekarang tidak ada penyelesaian yang transparan, kmnudian kasus korupsi Edy Tansil yang tak lepas dari nuansa keterlibatan aparatus negara di dalamnya. Dan yang paling akhir adalah kasus kematian wartawan Bernas Udin yang sampai kini juga belum selesai. Teori yang berkembang di masyarakat, itu semua tak lepas dari keterlibatan pejabat atau mungkin satu golongan yang berkepentingan terhadap hilangnya Udin tersebut.

Hal tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dari peranan lembaga hukum. Peran lembaga hukum sebagai penyeimbang antara negara dan masyarakat, bahkan satu keluarga atau segelintir orang dibangun dan dipertahankan dengan menerapkan stabilitas nasional. Praktek tersebut mendasarkan pada praktek politik yang menerapkan kepatuhan dan ketaatan yang luar biasa kepada rezim orde baru, tidak ada oposisi, diwujudkannya dwi fungsi ABRI, tidak ada kebebasan pers, dan ditebasnya protes-protes politik.

Adalah suatu kenyataan yang tak bisa disangkal bahwasannya negara Republik Indonesia di masa orde baru lebih maju, jauh lebih maju dibanding saat orde lama berkuasa. Tingkat kemakmuran penduduknya meningkat, jumlah penduduk miskin berkurang, tempat-tempat pendidikan bertambah dan berkembang pesat, jalan-jalan semakin lebar. Prestasi yang belum terlupakan adalah saat negeri tercinta ini berhasil meraih penghargaan FAO di era 80-an, yaitu keberhasilan Indonesia dalam berswasembada pangan. Memang pantas di saat-saat tersebut, Soeharto sebagai presiden RI ke dua mendapat gelar Bapak Pembangunan. Keberhasilan tersebut adalah hal yang sangat wajar. Keberhasilan tersebut merupakan harapan semua pihak, negara dan rakyat dalam setiap proses pembangunan. Namun ada satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam setiap keberhasilan yang telah diperoleh, yaitu koreksi atas keberhasilan itu. Apakah keberhasilan yang gemilang yang berhasil diperoleh saat rezim orde baru berkuasa dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Apakah keberhasilan tersebut tidak diikuti dengan tumbuh dan berkembangnya virus-virus berbahaya bagi kehidupan bangsa ini di waktu selanjutnya. Apabila keberhasilan tersebut justru diikuti oleh berkembangbiaknya virus yang mematikan bagi dinamika dan kehidupan bangsa ini, maka beban beratlah yang akan ditanggung oleh generasi baru dari bangsa ini.

Satu sisi lagi peninggalan rezim Soeharto yang masih akan menjadi pekerjaan besar bagi rezim pasca Soeharto adalah bidang hukum. Memang dalam kenyataannya rezim telah berhasil men syarakat dalam pola hubungan tertentu. Yaitu agar bagaimana sebuah negara dapat berfungsi benar-benar sebagai abdi bagi masyarakat atau warganya. Dan tentu saja agar bagaimana masyarakat dapat mengharapkan pertolongan dan pengayoman dari negara. Menurut Gus Dur (KH abdurrahman Wahid, Ketua PB-NU) seperti yang dikutip *Paradigma, 09/11 Juli-September 1996* hukum mempunyai dua fungsi yang saling kontradiktif namun bila dapat diperankan secara baik akan menjadi komplementer. Fungsi hukum yang dimaksud adalah, *pertama*, hukum terkait dengan kekuasaan. Jadi hukum mempunyai peranan menyesuaikan antara hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban antara warga masyarakat maupun hak dan kewajiban antara negara dan masyarakat. *Kedua*, hukum mempunyai fungsi moral. Hukum mempunyai peran dalam menegakkan prinsip-prinsip atau kesepakatan-kesepakatan mulia yang telah dicapai para warga negara dengan segala konsekuensi kelembagaannya.

Pertanyaan yang timbul kemudian adalah sudah adakah hubungan yang baik antara kedaulatan hukum dengan perimbangan kekuasaan di negeri ini? Untuk menjawab pertanyaan inipun diperlukan jawaban atas pertanyaan sudah adakah kekuatan-kekuatan di masyarakat yang dapat mengimbangi kekuatan birokrasi di satu pihak dan kekuatan militer di pihak lain di negeri ini? Jelas, selama rezim Soeharto berkuasa perimbangan kekuasaan tersebut belum ada. Dan tentu saja akibatnya belum ada perimbangan antara kekuasaan dan hukum di dalamnya.

❑

Tim Fokus Utama

DWI FUNGSI ABRI,

Duri Dalam Daging?

Nasution melihat bahwa banyak tentara generasi baru yang mengartikan dwi fungsi sebagai kekuatan (sistem persenjataan) teknologi dan persenjataan sosial politik yang telah diberlakukan rezim Soeharto selama kekuasaannya. Dan selama itu indikasi adanya penyelewengan jabatan atau hal lain yang negatif dalam praktek dwi fungsi, misal tidak terkontrolnya perilaku tentara baik di bidang penafsiran ideologi, pers, politik maupun ekonomi memang tidak bisa disanggah begitu saja kalau tidak boleh dikatakan "ada benarnya".

Pemicu lahirnya dwi fungsi ABRI dapat diambil atau diletakkan pada pidato Jalan Tengah oleh A.H. Nasution yang dikenal sebagai *The Army's Middle Way* tahun 1958. Hal tesebut berawal dari kondisi politik yang memang mengkhawatirkan. Kejatuhan kabinet Ali menyebabkan Presiden Soekarno memberlakukan keadaan darurat perang. Otomatis kekuasaan tertinggi terhadap angkatan perang atau panglima perang langsung berada di tangan presiden. Sebagai antisipasinya Presiden Soekarno memerintahkan kepada Kabinet Juanda untuk membentuk Dewan Nasional, yang semua itu tidak terlepas dari strategi Soekarno untuk mengimbangi partai-partai politik yang ada.

Dalam situasi tersebut Nasution mendesak agar TNI masuk dalam Dewan Nasional. Lewat pidato Jalan Tengahnya Nasution menginginkan agar TNI diberi kesempatan untuk menggunakan kemampuan non militernya. Lebih jauh lagi tentara hendaknya juga ikut terlibat dalam politik negara, ekonomi dan hubungan internasional.

Setelah militer sedemikian jauh terlibat dalam dunia politik maka para pimpinan ABRI kemudian menyusun doktrin yang dikenal dengan *Tri Ubaya Cakti*. Doktrin ini memperkenalkan fungsi ganda militer yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan juga sebagai kekuatan sosial politik. Doktrin ini kemudian dikenal sebagai Dwi Fungsi ABRI. ABRI menyatakan diri sebagai kekuatan sosial politik yang diperkuat dengan TAP MPRS No. XXIV/MPRS/1966. Ketetapan MPRS ini melegitimasi ABRI sebagai sistem kekuatan senjata sosial politik dan kekuatan sistem senjata teknologi.

Menurut Syarwan Hamid (*Republika, 17 Mei 1995*), konsep dwi fungsi ABRI dipahami sebagai "jiwa, tekad dan semangat pengabdian ABRI yang bersama kekuatan-kekuatan sosial lainnya" memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia. Sejauh ini, selama praktek pemerintahan orde baru, dwi fungsi ABRI yang dalam perjalanannya sejak dicetuskan oleh Nasution telah mandapatkan legitimasi dalam GBHN melalui penetapan pembangunan bidang HANKAMNAS terus menimbulkan perbedaan pendapat antara yang pro dan kontra. Hal ini dapat dilihat dari semakin seringnya suara dari pihak intern ABRI untuk selalu mencoba memasyarakatkan dwi fungsi ABRI tersebut. Dan di lain pihak semakin banyak juga suara-suara dari kelompok kritis pro demokrasi yang menginginkan dicabutnya dwi fungsi ABRI tersebut. Mereka yang menghendaki dicabutnya dwi fungsi ABRI menganggap bahwa tidak seharusnya ABRI berkiprah di luar jalur hankam. Mereka menganggap bahwa porsi yang dikerjakan oleh ABRI tersebut merupakan bagiannya orang sipil, dan keberadaan ABRI di dalamnya hanyalah terbatas pada masa-masa darurat saat dicetuskannya oleh Nasution.

ABRI yang tangguh, kekuatan utama pertahanan dan keamanan negara.

Foto: Repro Jawa Pos

Masih menurut Syarwan Hamid mereka yang menghendaki dihilangkannya dwi fungsi ABRI tergolong dalam empat kelompok. *Pertama* adalah mereka yang menganut sistem demokrasi liberal. Kelompok ini melihat kiprah angkatan bersenjata dalam dunia politik merupakan intervensi militer yang mengarah pada militerisme. *Kedua*, mereka yang dapat menerima dwi fungsi ABRI, namun menganggap bahwa banyaknya karyawan ABRI menghambat karir dan perkembangan karyawan sipil. *Ketiga*

adalah mereka yang kurang memperoleh informasi secara lengkap tentang dwi fungsi ABRI. Dan *keempat* adalah mereka yang tidak memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia .

Terlepas dari hal tersebut dalam kenyataannya suara-suara yang menghendaki dicabutnya dwi fungsi ABRI ada yang tidak dapat dimasukkan ke dalam keempat golongan tersebut. Mereka boleh dikatakan memahami sejarah atau latar belakang diberlakukannya dwi fungsi ABRI tersebut. Yang mereka soroti adalah ruang gerak dari dwi fungsi tersebut yang "seakan-akan" membuat semua sektor kehidupan baik politik maupun ekonomi yang selalu saja dapat dijumpai adanya figur dari kalangan militer. Bahkan isyu yang belum lama sempat menjadi polemik yang ramai adalah klaim dari pihak ABRI yang mengatakan bahwa sipil belum siap untuk memimpin negara Republik Indonesia ini. Hal tersebut dapat dimaklumi karena selama kekuasaan rezim orde baru memang nyaris semua tempat kunci selalu dipegang pihak militer. Dan memang dalam kenyataannya kondisi internal dari ABRI sangat memungkinkan bagi pendidikan calon pemimpin, dan sisi atau dari kalangan sipil kurang begitu berhasil menghasilkan calon-calon pemimpin yang bisa diandalkan. Begitulah sebagian analisis tentang keadaan tersebut. Walaupun kesemua hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan mengapa keadaan yan demikian bisa terjadi. Dan jawaban yang bisa diperoleh tidak bisa dilepaskan dari sistem kekuasaan orde baru yang memang mempunyai basis militer, dan tentu saja tidak bisa meninggalkan sistem militer itu sendiri dalam perjalanannya.

Dalam sistem pemerintahan yang banyak dianut dikenal dua sistem dalam kaitannya dengan peranan militer di dalamnya atau profesionalisme militer. *Pertama* adalah konsep profesionalisme konvensional. Di dalamnya militer profesional diartikan sebagai militer yang memiliki kemampuan, ketrampilan dan kepemimpinan serta tanggung jawab di bidang pertahanan negara terhadap ancaman dari luar. Oleh karena itu militer harus mempunyai kemampuan tempur yang handal dan tangguh, serta militer tidak boleh disibukkan dengan urusan nonhankam karena akan melemahkan konsentrasi dan kesiapan dalam bidang hankam. Urusan tersebut adalah bagian dan jatah golongan sipil.

Untuk lebih memantapkan peran dwi fungsi ABRI, rezim Soeharto mengembangkan pemahaman akan peran sosial politik ABRI melalui pendidikan di SESKOAD. Pemahaman baru tersebut semakin menguatkan doktrin kekaryaan bagi ABRI. Keterlibatan ABRI dalam politik yang tidak bisa dipisahkan dari Golkar semakin menimbulkan dilema saat ABRI harus bersikap *kuersif*. Apakah tindakannya masih dapat dakatakan berdiri di atas semua golongan ataukah hanya bersifat mempertahankan kekuasaan yang ada, sebagai alat penjaga status quo atau sekedar mempertahankan hak-hak istimewa yang dimilikinya. Ketidakjelasan ini mengakibatkan ABRI dalam peranannya di semua sektor kehidupan bangsa ini mengakibatkan sifatnya yang cenderung arogan. Aspirasi rakyat, sebagai akibatnya menjadi mampat. Bahkan ada indikasi manipulasi terhadap sistem representasi sehingga rakyat tidak punya wakil yang benar-benar mampu menyalurkan aspirasi dan suara hati nuraninya.

Kedua adalah konsep profesionalisme baru yang berkembang tahun 1960-an. Konsep ini banyak dianut oleh negara-negara berkembang non komunis. Konsep ini didasarkan pada usaha pertahanan terhadap ancaman yang tidak hanya berbentuk serangan militer namun juga berbentuk serangan dalam bentuk kemiskinan, kebodohan, serta kesenjangan dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Untuk itulah diperlukan pendayagunaan seluruh potensi yang ada untuk menangkalnya. Kunci utamanya adalah bersatunya seluruh elemen hankam dan elemen non hankam. Dalam konsep inilah militer yang profesional adalah militer yang memiliki kemampuan untuk berkiprah dalam bidang hankam maupun nonhankam sekaligus.

Dwi fungsi ABRI sebagai konsepsi politik dituangkan dalam UU NO. 20/1982 tentang pokok-pokok pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia pasal 28 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

1. Angkatan bersenjata sebagai kekuatan sosial politik bertindak selaku dinamisator dan stabilisator yang bersama-sama kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggung jawab mengamankan dan menyukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, angkatan bersenjata diarahkan agar secara aktif mampu meningkatkan dan memperkokoh ketahanan nasional dengan ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai masalah kenegaraan dan pemerintahan, mengembangkan demokrasi pancasila dan kehidupan konstitusional berdasarkan UUD 1945 dalam segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional (*Syarwan Hamid, Republika 17/15, 1998*).

Ada hal yang tidak bisa dilupakan begitu saja berkaitan dengan semakin maraknya isyu demokratisasi. Ditambah dengan semakin nyaringnya tuntutan untuk mencabut dwi fungsi ABRI. Memang dalam kenyataannya isyu demokratisasi tidak bisa dipisahkan dari sejauh mana keterlibatan militer di dalam kehidupan sosial politik, tak terkecuali bagi ABRI dalam kahidupan sosial politik bangsa ini.

Menyikapi maraknya tuntutan dan gugatan terhadap dwi fungsi ABRI tersebut, tahun 1995 Presiden Soeharto (saat itu) mengharapkan agar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyelenggarakan seminar tentang hal tersebut. Dan akhirnya LIPI berhasil menyelenggarakan seminar dengan tema " Peran Sosial Politik ABRI, Masalah dan Prospeknya" yang ternyata membangkitkan kembali opini pro dan kontra. Seminar tersebut menghasilkan rekomendasi agar peran sosial politik ABRI hanya dibatasi sampai di MPR saja, yaitu sampai tahun 2007. Mayor Jenderal (Purn) ZA. Maulani, seorang penga-

Foto: Dok. LPM Kentingan

mat militer dan mantan Pangdam Tanjungpura, tidak menolak akan gagsan pembatasan peran sosial politik ABRI tersebut. Menurutnya untuk mengurangi peran sosial politik ABRI tersebut dibutuhkan kondisi yang mendukung yang menurutnya sampai saat ini belum terpenuhi. Kondisi yang dimaksud antara lain setiap anggota masyarakat telah berperan secara fungsional, kelas menengah harus kuat, semangat politik aliran harus benar-benar hilang dan ABRI sendiri harus rela dan bersedia mengurangi peran sosial politiknya. Kondisi sekarang memang belum bisa dikatakan memenuhi syarat-syarat tersebut. Perilaku politik masyarakat cenderung masih kekanak-kanakan. Bahkan di antara para ativis kaum pro demokrasi sendiri masih sering tidak mau saling menyapa bila berada dalam posisi yang berbeda pendapat.

Dari berbagai pendapat dan fenomena yang berkembang di masyarakat memang menunjukkan bahwa semangat berdemokrasi bagi bangsa ini masih rendah. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh berbagai kerusuhan yang timbul baru-baru ini. Main keras, main kuasa, rekayasa kekanak-kanakan masih menghantui kehidupan bangsa ini. Kondisi semacam ini mau tidak mau memang bisa menjadi semacam legitimasi dan pengesahan bagi ABRI untuk tetap mempertahankan peran dwi fungsinya. Lebih lanjut sesungguhnya peran sosial politik ABRI bukanlah kehendak dari ABRI sendiri. Tetapi lebih didorong oleh semangat patriotisme ABRI untuk menanggulanghi keadaan *chaos* di negeri ini, awal mula dimulainya sematamata dalam posisi ABRI sebagai *pemadam kebakaran*. Situasi keterlibatan ABRI dalam sosial politik ini berkembang terus dan berlanjut sampai sepanjang kekuasaan rezim orde baru. ABRI masuk ke dalam keanggotaan DPR tanpa melalu pemilihan umum atau dengan sistem diangkat. Lebih jauh lagi ABRI juga memasuki kawasan kabinet, serta organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. Keterlibatan ABRI di dalamnya juga tidak bisa dipisahkan dari organisasi pemegang legitimasi orde baru yaitu Golkar. Pernyataan Jenderal TNI R. Hartono (saat itu sebagai KASAD) dalam suatu acara yang diselenggarakan Golkar yang mengatakan bahwa setiap anggota ABRI adalah kader Golakar sempat kembali memunculkan polemik dan perdebatan tentang peran sosial politik ABRI. Keberadaan ABRI dengan dwi fungsinya bila dilihat dari motivasi awal berpijaknya mengesankan bahwa ABRI berdiri dan mengayomi semua golongan, namun dengan keluarnya pernyataan tersebut kemudian menimbulakn pertanyaan apa sebenarnya yang tengah terjadi di dalam tubuh ABRI yang tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sistem kekuasaan yang berkuasa di negeri ini.

Indikasi "keterlibatan yang terlalu jauh" dari ABRI dalam kehidupan sosial politik melalui dwi fungsinya mendapat tanggapan dari AH. Nasution. Nasution mencoba klarifikasi hal tersebut. Sebagai awal berpijak analisis dikatakannya bahwa dwi fungsi sebenarnya hanya bersifat sementara.Yakni hanya karena situasi dan kondisi negeri ini saat itu yang tidak stabil. Nasution melihat bahwa banyak tentara generasi baru yang mengartikan dwi fungsi sebagai kekuatan (sistem persenjataan) teknologi dan persenjataan sosial politik yang telah diberlakukan rezim Soeharto selama kekuasaannya. Dan selama itu indikasi adanya penyelewengan jabatan atau hal lain yang negatif dalam praktek dwi fungsi, misal tidak terkontrolnya perilaku tentara baik di bidang penafsiran ideologi, pers, politik maupun ekonomi memang tidak bisa disanggah begitu saja kalau tidak boleh dikatakan "ada benarnya".

Untuk lebih memantapkan peran dwi fungsi ABRI, rezim Soeharto mengembangkan pemahaman akan peran sosial politik ABRI melalui pendidikan di SESKOAD. Pemahaman baru tersebut semakin menguatkan doktrin kekaryaan bagi ABRI. Keterlibatan ABRI dalam politik yang tidak bisa dipisahkan dari Golkar semakin menimbulkan dilema saat ABRI harus bersikap *kuersif*. Apakah tindakannya masih dapat dakatakan berdiri di atas semua golongan ataukah hanya bersifat mempertahankan kekuasaan yang ada, sebagai alat penjaga status quo atau sekedar mempertahankan hak-hak istimewa yang dimilikinya. Ketidakjelasan ini mengakibatkan ABRI dalam peranannya di semua sektor kehidupan bangsa ini mengakibatkan sifatnya yang cenderung arogan. Aspirasi rakyat, sebagai akibatnya menjadi mampat. Bahkan ada indikasi manipulasi terhadap sistem representasi sehingga rakyat tidak punya wakil yang benar-benar mampu menyalurkan aspirasi dan suara hati nuraninya. Dan hal yang tidak aneh bila akhirnya ABRI muncul sebagai satu-satunya kekuatan politik yang riil dalam percaturan politik bangasa ini. ABRI masih yang paling kuat. Bahkan Samuel Huntington mengatakan bahwa di masyarakat saat ini telah terhadi pergeseran hubungan sipil-militer dari bentuk *objective civillian control* menjadi *subjectives civilian control*. Artinya ABRI tidak lagi menjadi alat negara, melainkan telah berfungsi sebagai pemain. Sehingga tuntutan dan perbedaan persepsi terhadap dwi fungsi ABRI tidak bisa didiamkan begitu saja.

❑

Ichwan, dari berbagai sumber

ANGKATAN 1998,

Aktor Politik Runtuhnya Rezim Orde Baru

Banyak ahli atau pengamat yang mengatakan bahwa gerakan mahasiswa memang telah terkooptasi oleh pemerintah sehingga mereka enggan berbagi dengan masyarakat luas. Anggapan ini ternyata keliru. Pada akhir Februari gerakan semakin marak, mereka bergerak di dalam kampus menggelar mimbar bebas yang melibatkan seluruh unsur civitas akademik. Dalam tuntutannya mahasiswa mnyerukan agar segera diadakan reformasi secara menyeluruh baik reformasi di bidang ekonomi, politik maupun hukum

Mahasiswa di dalam dinamika perjalanan sejarah Indonesia terbukti mempunyai peranan yang sangat besar. Aksi-aksi mahasiswa di semua negara termasuk di Indonesia selalu tidak terlepas dari masalah-masalah nasional yang sedang berkembang hangat di negaranya. Aksi protes mahasiswa tidak hanya marak di Indonesia dengan beberapa periode aksi yang boleh dikatakan aksi yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan sosial politik negara, namun juga terjadi di beberapa negara maju dan berkembang lainnya. Mahasiswa di Rusia membuktikan dirinya sebagai sumber oposisi yang konstan selama tahun-tahun terakhir pemerintahan Tsar; di Budapest dan Warsawa mereka mempunyai andil dalam menggerakkan peristiwa tahun 1956, di Perancis mereka menonjol dalam kampanye menentang perang Aljazair dan di Amerika Serikat dalam pergerakan hak-hak sipil; di Korea mereka membantu menjatuhkan pemerintahan Synghman Ree, juga di Muangthai dan negara-negara lainnya. Kalau dikaitkan dengan gerakan mahasiswa di indonesia akan timbul pertanyaan, apakah aksi-aksi mahasiswa di indonesia hanya terpengruh oleh gerakan-gerakan mahasiswa di belahan dunia lain, ataukah karena memang ada masalah mendesak yang menggerakkannya?

Berkaitan dengan aksi mahasiswa dan latar belakang yang menggerakkannya, memang tidak bisa disangkal bahwa memang dan bukan merupkan hal yang baru bila mahasiswa harus bangkait untuk menyelamatkan bangsanya. Dalam suatu konferensi Sosialis Asia di Bombay pada tahun 1956, tokoh nasional Sutan Sjahrir mengatakan dalam pidatonya:"para mahasiswa sebagai kelompaok pemuda harus harus bangkit melawan ketidakadilan sosial di negeri-negeri mereka sendiri.....para mahasiswa harus mengoreksi leadership formal di suatu negeri......" (H. Rosihan Anwar; *Perjalanan Terakhir Pahlawan Nasional Sutan Sjahrir*).

Reformasi diawali dengan pergantian elit politik. Foto:Dok. Kentingann

Aksi-aksi mahasiswa tentunya mempunyai latar belakang yang mencakup berbagai faktor. Menurut Umar Juoro dalam *Prisma, Februari 1981;* aksi mahasiswa di negeri tercinta ini antara lain didorong oleh; pertama, kegelisahan yang timbul dari rasa ketidakpuasan terhadap kondisi masyarakat yang ada sebagai akibat dari kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah membangkitkan sifat menentang pada diri mhasiswa. Sifat ini merupakan salah satu dari dua sifat kaum muda yang terdapat di dalam masyarakat modern yaitu sifat menentang dan apatis. Kedua, ketidakterikatan baik dalam hal birokrasi profesi maupun ideologi politik, sehingga kebebasan bergerak sangat luas. Ketiga, aksi protes terhadap sesuatu yang dianggap merugikan masyarakat luas adalah manifestasi dari pengabdaian pada masyarakat. Keempat, mitos terjadap angkatan '66 tentunya tidak dapat diabaikan, dan kelima, melalui berbagai aksi mahasiswa, terpampang harapan dapat menduduki posisi-posisi pada kekuasaan nantinya.

Menurut Baharuddin Lopa (*Kompas, 20 Mei 1998*) ada beberapa alasan mengapa mahasiswa dengan ikhlas dan terbuka meneruskan dan bergeming dalam perjuangannya meskipun menghadapi resiko cedera, ditahan atau bahkan mati tertembak serta harus menghadapi tekanan-tekanan berat lainnya. Pertama, mereka sadar bahwa mereka harus bersatu padu menghadapi penyelewengan-penyelewengan dari para penyelenggara negara yang merugikan masyarakat banyak dan tentunya termasuk mahasiswa sendiri demi menyelamatkan bangsa Indonesia yang pada saat ini sedang menghadapi ujian b e r a t, terutama dalam

mengahadapi krisis ekonmi saat ini. Kedua, mereka umumnya termasuk golongan yang bersih. Mereka bukan pejabat atau birokrat yang mungkin terlibat dalam konspirasi penyelewengan pejabat atau aparatus negara. Dengan posisinya yang bersih mereka tidak mengahadapi beban mental dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Ketiga, umumnya mahasiswa tidak mudah direkayasa untuk dialihkan perhatiannya kepada hal-hal atau kegitan lainnya karena mereka hanya terikat pada suara hati nuraninya. Keempat, mereka tidak mengharapkan dan tidak meyakini bahwa orang-orang birokrasi ataupun anggota institusi-instistusi lainnya sanggup dan bersedia melakukan perubahan.

Berbicara masalah dinamika gerakan mahasiswa Indonesia berikut akan diberikan sedikit gambaran tentangnya berdasar kutipan bebas dari makalah pada *Asian Studies Association of Australia Biennial Conference* di Perth, 13-16 Juli 1994 oleh E. Aspinali. Gerakan mahasiswa di Indonesia akhir-akhir ini semakin transparan dibanding dengan elit oposisi. Gerakan mahsiswa tahun 1966 telah menjadi pendukung bagi penggulingan rezim Soekarno, dan tentu saja memberikan legitimasi bagi berdirinya rezim baru (rezim orde baru). Di awal tahun 1970-an protes mahasiswa mulai beralih dari mengutuk rezim ke arah tema yang lain dengan terma berlapis. Mereka mulai beralih ke masalah regularisasi dan reformasi pada isyu-isyu korupsi, kebijakan pembangunan dan lemabag ekstra judicial (Kopkamtib di masa gerakan tahun 1970-an). Kejelasan yang semakin nampak dari adanya jenderal-jenderal korup dan aparatus negara yang demikian juga selam rezim Soeharto berkuasa memicu lahirnya gerakan mahasiswa di tahun 1974. Insiden Malari sebagai puncak dari gerakan tahun 1974 disebabkan sebagaian oleh perhitungan akan adanya unsur militer (Pangkobkamtib/Wapangab Jenderal Soemitro) yang akan bersedia naik ke elit politik menggusur Soeharto saat itu bila diberi kesempatan. Kesalahan perhitungan (ternyata Soemitro tidak pernah punya niat seperti itu) menyebabkan banyak aktivis mahasiswa yang ditangkap.

Munculnya gerakan mahasiswa tahun 1977-1978 ditandai oleh sikap yang semakin keras terhadap rezim, desakan kuat kepada Soeharto agar tidak lagi mencalonkan diri menjadi Presiden. Akibatnya memunculkan tindakan pemerintah yang lebih komprehensif dan efektif yakni dengan penerapan konsep NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan Koordinasi Kampus). Pengaruh lainnya dalah menyingkirkan aktivitas gerakan mahsiswa dari mainstream gerakan

Gairah baru radikalisme populis dalam gerakan mahasiswa memperlihatkan posisi aktivitas mahasiswa tahun 1980-an yang tersingkirkan, dimana para aktivisnya tersingkirkan dan berhenti hanya di dalam kampus saja, bekerja di ornop atau mencari pemecahan terobosan bagi masalah sosial dan politik

politik. Selama tahun 1980-an sama sekali tidak ada iklim yang menunjang bagi aktivitas gerakan mahasiswa secara terbuka di kampus. Mereka lebih banyak aktif dalam lembaga study atau kelompok-kelompok study, juga bergabung dalam gerakan organisasi non pemerintah (ornop). Keberadaan mereka bersifat semi under ground. Dalam aktivitasnya mereka mncoba mengevalusi aktivitas periode sebelumnya, generasi sebelumna, mencari strategi baru, dan mempelajari teori-teori kritis baru, seperti tulisan Mazab Frankfurt, teologi pembebasan Amerika Latin, trmasuk Marxisme kalsik.

Gerakan mahasiswa akhir tahun 1980-an kembali marak dengan tuntutan perubahan terhadap pemberlakuan NKK/BKK yang dirasakan sangat memasung dan mengkooptasi aktivitas mahasiswa. Protes ini menuntut agar mahasiswa diberi kebebasan bergerak dan beraktivitas serta menuntut kembalinya "otonomi kampus" yang marak di Yogyakarta, Bandung , dan Jakarta. Gerakan mahasiswa tahun 1980-an dalam beberapa hal sangat berbeda dari gerakan mahaiswa tahun 1960-an dan 1970-an. Protes mahasiswa tahun 1960-an dan 1970-an bersifat Jakarta-Bandung centris. Pada tahun-tahun setelah 1989 pengorganisasian yang kuat (tanpa menghilangkan pentingnya peran kedua daerah tersebut) muncul di daerah-daerah atau kota-kota besar di Jawa seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo, Salatiga, Jember, Malang, serta Surabaya. Kelompok-kelompok aktivitas mahasiswa juga mincul di Bali dan Lombok, juga di Manado dan Medan. Jawa Tengah terutama Yogyakarta kemudian muncul sebagai fokus gerakan dengan Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta (FKMY)-nya.

Berbeda dengan periode tahun 1960-an dan 1970-an, ketika aktivitas mahasiswa di Jakarta (UI) dan Bandung (ITB) menjadi semacam pusat gerakan yang tak tertandingi, gerakan mahasiswa tahun 1980-an lebih banyak melibatkan kampus-kampus yang lebih kecil ataupun kampus-kampus swasta. Posisi UI diambil alih oleh Universitas Nasional, Universitas 17 Agustus dan belakangan universitas elit, Universitas Tri Sakti. Bentuk organisasi juga mengalami perubahan. Tahun 1970-an gerakan mahsiswa lebih banyak diorganisir oleh dewan mahasiswa yang terpilih dan legal dalam struktur pendidikan tinggi. Cara ini kemudian dimatikan oleh NKK/BKK. Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an gerakan mahasiswa lebih banyak digerakkan oleh panitia-panitia aksi ad hoc yang temporer yang bergabung untuk kampanye menyikapi suatu permasalahn tetentu dan kemudian bubar. Contohnya adalah Kelompok Solidaritas Korban Pembangunan Waduk Kedung Ombo. Juga muncul organisasi kelompok kota yang mengorganisisr gerakan mahasiswa dalam satu kawasan, seperti FKMY. Sekitar waktu yang samajuga muncul gerakan-garakan yang sama di kota-kota lain seperti Badan Koordinasi Mahasiswa Jakarta (BKMJ), Badan koordinasi Mahasiswa Bandung, serta Forum Komunikasi Mahasiswa Surabaya (FKMS). Kemudian juga muncul koalisi yang lebih cair seperti Front Aksi Mahasiswa Indonesia (FAMI) yang dua puluh anggotanya disidangkan pada tahun 1994, dan Solidaritas Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi (SMID) yang diorganisir secara lebih ketat dan dimunculkan pada umum pada kongres tahun 1994, yang kemudian berkoalisi dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang belakangan dijadiakn kambing hitam dalam drama politik berdarah perpecahan Partai Demokrasi Indonesia, dan kemudian mengakibatkan di-OT-kannya organisasi ini oleh rezim Soeharto dan diadilinya semua pucuk pimpinannya dengan tuduhan klasik sebagai PKI atau komunis.

Gairah baru radikalisme populis dalam gerakan mahasiswa memperlihatkan posisi aktivitas mahasiswa tahun 1980-an yang tersingkirkan, dimana para aktivisnya tersingkirkan dan berhenti hanya di dalam kampus saja, bekerja di ornop atau mencari pemecahan terobosan bagi masalah sosial dan politik. Juga merupakan pengaruh munculnya teori struktural dan radikal yang dipelajari dalam kelompok studi. Sebenarnya gerakan mahasiswa itu sendiri sudah sering

diwarnai dengan konflik getir, saling menuduh dan curiga yang disebabkan oleh perbedaan pandangan politik. Di satu sisi kutub "populis" lebih konsisiten untuk memilih dan memiliki visi transformasi rakyat, dan terus menekankan pada aksi "massa" organisasi petani, buruh kota, dan terus menghindari elit politik. Mereka cenderung dipengaruhi oleh analisis radikal struktural, contohnya adalah SMID dan PRD. Di sisi lain juga terdapat kutub "politik moral" yang lebih dekat ke mainstream gerakan mahasiswa awal orde baru. Mereka lebih banyak mengangkat isyu elit politik seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Gaung besarnya adalah gerakan menentang kembali pencalonan Soeharto sebagai presiden pada tahun 1993 yang sangat mirip dengan gerakan tahun 1977-78.

Begitulah sekelumit periodesasi atau babak-babak gerakan mahasiswa dalam dunia sosial politik di negeri ini. Dan kini di tahun 1998 ketika Soeharto sebagai pribadi dan lembaga DPR/MPR sebagai manifestasi dari perwakilan rakyat membutakan dan menulikan diri terhadap tuntutan kelompok-kelompok kritis termasuk di dalamnya mahasiswa agar tidak menjadi presiden untuk masa jabatan ketujuhnya, akumulasi dari ketidakpercayaan pada rezim yang dibangun Soeharto semakin transparan. Dimulai dengan jatuhnya nilai rupiah, yang menurut versi pemerintah karena permainan spekulan asing yang memborong rupiah mengakibatkan krisis ekonomi yang berakibat langsung pada golongan masyarakat bawah. Teori ketidakpercayaan pada rezim semakin transparan, apalagi dengan pernyataan pemerintah bahwa fundamen ekonomi negeri ini masih cukup kuat namun dalam kenyataannya justru semakin terpuruk , semakin meningkatkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap rezim Soeharto dan juga terhadap Soeharto sendiri sebagai pemegang lembaga kepresidenan. DPR yang diharapkan mampu menyuarakan suara masyarakat akan ketidakpercayaannya terhadap rezim namun sama sekali tidak ada respon yang positif membuat tuntutan-tuntutan yang bergelombang tersalurkan melalui cara-cara di "luar jalur". Apalagi MPR yang tidak bisa merespon secara positif kehendak masyarakat yang menghendaki pergantian presiden (sebagai awal perbaikan sistem politik dan penyelenggaraan negara) membuat krisis kepercayaan tidak hanya tertuju kepada pemerintah saja namun juga kepada lembaga perwakilan rakyat tersebut. Komposisi atau susunan lembaga yang sangat nepotis, diwarnai bau korupsi dan kolusi, juga para aparatus negara, termasuk di dalamnya susunan kabinet bentukan Soeharto yang juga diwarnai nepotisme dan kroniisme semakin menampakkan alasan yang transparan bagi timbulnya krisis kepercayaan tersebut.

Gerakan mahasiswa tahun 1998 ini mempunyai corak yang sangat berbeda dengan gerakan-gerakan mahasiswa sebelumnya. Gerakan mahasiswa 1998 ini menurut Amien Rais bahkan telah menjadi salah satu pilar utama kekuatan politik di Indonesia. Eki Syachrudin bahkan mengatakan bahwa gerakan mahasiswa sekarang merupakan aktor utama dalam perpolitikan Indonesia saat ini. Secara faktual apa yang kedua tokoh tersebut katakan memang ada benarnya, di tengah kemandulan institusi politik formal seperti parpol, DPR/MPR, birokrasi dan sebagainya aksi-aksi mahasiswa bergerak menggulirkan ide-ide segar yang selama ini sebenarnya menjadi harapan masyarakat luas. Isyu reformasi politik, ekonomi dan hukum pertama kali muncul justru di tengah-tengah aksi mahasiswa, tuntutan tersebut lahir sebagai akibat yang dirasakan langsung oleh para mahasiswa dan kemurnian hati nurani mereka yang mampu mendengarkan suara hati nurani masyarakat.

Pengorbanan untuk sebuah reformasi. Foto:Dok. Kentingan

Menurut Marsilam Simanjuntak gerakan mahasiswa 1998 dengan tuntutan reformasinya, selanjutnya disebut gerakan reformasi, tidak muncul secara tiba-tiba (*Kompas, 31/05, 1998*). Dalam benak masyarakat dan mahasiswa sesungguhnya sudah ada tuntutan kekecewaan yang sudah direpresi ke sudut ingatan. Desakan kebutuhan begitu tajam, sementara perasaan akan ketidakamanan masa depan semakin mengancam. Hal tersebut kemidian dipertajam dengan blunder yang dibuat oleh pemerintahan Soeharto yaitu soal IMF dan pengangkatan Tutut dan Bob Hasan sebagai menteri kabinetnya. Hal tersebut merupakan pemicu meledaknya memori laten yang terbengkalai tersebut.

Lebih lanjut Marsilam simanjuntak mengatakan bahwa genesis munculnya gerakan mahasiswa 1998, ada soal tentang pemakaian jargon reformasi, dari sekedar tuntutan praktis agar tidak ditolak sampai menjadi sebuah tuntutan normatif. Bersamaan dengan berbagai peristiwa besar negeri ini sepanjang 1997-1998, sedikit emi sedikit nalar mulai bekerja secara terbuka. Ada dialektik berpikir dimana memori bersama kemudian mengambil bahan-bahan dari ingatna lama dan pengalaman masa lalu. Diam-diam telah terjadi perubahan penalaran dan sikaphingga bisa mengambil kembali kebenaran yang selam ini dikekang. Masyarakatpun kembali menemukan pijakan-pijakan untuk menjadi otonom, demikian papar mantan ketua presidium KAMI-Jaya tahun 1965-1968 ini.

Sejak Februari 1998 aksi-aksi mahasiswa 1998 mulai marak dalam skala kecil, memang semula seakan tidak ada sama sekali gerakan yang menunjukkan kepedulian mahasiswa terhadap persoalan yang sedang berkembang, terutama masalah krisis ekonomi yang mulai terasa sejak Agustus 1997. Banyak ahli atau pengamat yang mengatakan bahwa gerakan mahasiswa memang telah terkooptasi oleh pemerintah sehingga mereka enggan berbagi dengan masyarakat luas. Anggapan ini ternyata keliru. Pada akhir Februari gerakan semakin marak, mereka bergerak di dalam kampus menggelar mimbar bebas yang melibatkan seluruh unsur civitas akademik. Dalam tuntutannya mahasiswa mnyerukan agar segera diadakan reformasi secara menyeluruh baik reformasi di bidang ekonomi, politik maupun hukum. Tuntutan semakin mengkristal dengan tuntutan agar diadakan sidang istimewa. Bagi mahasiswa penyelesaian di bidang politik adalah langkah awal bagi penyelesaian krisis ekonomi yang berkepanjangan tersebut. Akibat tuntutan yang semakin semarak yan bahkan sudah melibatkan seluruh kampus di tanah air, apalagi dengan berjatuhannya korban selama aksi mahasiswa, dimulai dari korban cidera bentrokan dengan aparat, hingga jatuh korban meninggal di Yogyakarta yang disusul dengan jatuhnya korban di Universitas Trisakti Jakarta membuat akselerasi gerakan mahasiswa semakin intens. Puncak aksi mahasiswa digelar dengan menduduki sarana dan prasarana yang merupakan simbol kedaulatan

rakyat. Gedung DPR/MPR dikuasai, demikian juga gedung DPRD di daerah luar Jakarta, hingga pendudukan sarana komunikasi seperti RRI menunjukkan bahwa tuntutan mahasiswa bukan tuntutan yang main-main. Puncak perjuangan gerakan mahasiswa 1998 mencapai hasil saat Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari kursi kepresidenan.

Prof. Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif mengatakan bahwa pergantian kepemimpinan nasional di tahun 1998 ini mmenempatkan mahsiswa sebagai kekuatan pendobrak (*Kompas, 31/05, 1998*). Walaupun ada ide dari tokoh pembaharu, tokoh reformasi, tapi tanpa demonstrasi mahasiswa rasanya tidak akan berhasil sebab ABRI sebagai kekuatan utama peta politik di negeri ini sampai saat-saat terakhir masih mengambang.

Sosiolog Unair, Hotman Siahaan mengatakan bahwa gerakan mahasiswa 1998 ini membawa fenomena baru dengan terlibatnya para guru besar, rektor dan dosen (*D&R, 02/05, 1998*).

Gerakan mahasiswa 1998 mempunyai corak yang sangat khas yaitu dengan tidak adanya simbol pemimpin yang memimpin gerakan. Gerakan yang terjadi lebih merupakan gerakan yang didorong oleh kesatuan hati nurani yang sama-sama merasakan penderitaan, yang sama-samam emgetahui ketidakberesan rezim, dan sama-sama mempunyai akumulasi tuntutan yang sekian lama tidak pernah didengar penguasa. Gerakan-gerakan yang terjadi dapat dipilah dalam dua mainstream gerakan. Pertama adalah gerakan kelompok keras yang biasanya merupakan komite-komite non senat mahasiswa, kedua adalah kelompok yang lebih moderat dan berpegan pada aksi damai dan berakan moral secara kuat yang biasanya dimotori oleh senat mahasiswa. Kelompok keras contohnya adalah Solidaritas Mahasiswa peduli Rakyat (SMPR) di Solo, KPRP di Yogya, yan berusaha memebnagun basis massa dengan merangkul rakyat dalam arti yang sebenarnya, seperti buruh, petani, sopir, pedagang asongan, pengamen dan pelajar. Contoh lainnya adalah Forkot (Forum Kota) di Jakarta, Gerombolan Penghuni Kantin (GPK) dan Penghuni Kantin ITS (PKI), keduanya di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, juga Mahasiswa Proreformasi di Unair.

Di kampus Universitas Gadjah Mada aksi menuntut reformasi pertama kali tidak digelar oleh Senat Mahasiswa UGM, melainkan digerakkan oleh Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP). KPRP memang mempunyai corak gerakan yang jauh berbeda dengan SM UGM yang gerakannya bersifat elitis dan hanya di dalam kampus saja. Aksi-aksi yang diwarnai bentrokan dengan aparat di boulevard UGM adalah salah satu gerakan yang dimotori oleh KPRP, berbeda dengan aksi yang dimotori SM UGM yang berlangsung damai dan biasabnya berlangsung di dalam kampis. Selain KPRP, di Yogya ada kelompok yang menyebut dirinya Persatuan Perjuangan pemuda Yogyakarta (P3Y) yang tadinya bernama Dewan Mahasiswa dan Pemuda Yogyakarta (DPMY) yang lahir tahun 1996, merekalah yang aktif menggelar aksi di kampus IAIN Sunan Kalijaga. Kelompok lainnya adalah Liga Mahasiswa Muslim Yogayakarta (LMMY) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Secara keseluruhan gerakan mahasiswa 1998 menurut beberapa pengamat jauh lebih hebat dibanding tahun 1974 dan 1978. Isyu yang mengikatnya lebih kuat, yaitu krisis ekonomi dan politik yang dampaknya dirasakan semua lapisan masyarakat disamping mahasiswa yang terlibat adalah di seluruh kawasan nusantara ini. Namun gelombang aksi sekarang barulah pada tahap pemanasan, represi militer masih terkesan tanggung meskipun sudah menelan korban jiwa, karena tank-tank militer belum masuk kampus seperti di tahun 1978. Dan kemenangan gerakan mahasiswa dengan turunnya Soeharto barulah awal dari perjuangan reformasi yang sesungguhnya.

Di Solo gerakan mahasiswa dimotori oleh Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Muhamadiyah Surakarta (UMS). Di UNS gerakan aksi mahasiswa awalnya dimotori oleh lembaga formal kampus semacam senat mahasiswa, namun belakangan mereka terlihat mengendor. Sementara aksi garis keras yang dimotori SMPR semakin intens mengelar aksi setiap hari Rabu dan Jum'at di boulevard UNS. Merekalah yang dihadang oleh tembakan peluru karet dan lemparan granat gas air mata yan mengakibatkan ratusan korban bahkan diisyukan ada korban yang meninggal karena tembakan petugas. Selain kedua kelompok ini juga ada kelompok KAMMI yang juga menggelar aksi di kampus UNS.

Gerakan mahsiswa dilampung juga lumayan radikal, sepulh perginuan tinggi lebur menjadi satu grakan aksi massa, mereka mencoba membangaun gerakan basis aksi massa dengan merangkul pedaang kecil, pengasong , buruh, massa pendukung Megawati serta penduduk sekitar kampus. Di Bali gerakan mahasiswa dimotori oleh aktivis kampis Universitas Udayana.

Di Jakarta, terutama di kampus UI yang peertama kali menggerakkan aksi juga bukan Senat Mahasiswa UI, tetapi aksi pertama kali yang digelar di kampus UI Salemba digerakkan oleh Komite Mahasiswa yang lahir dari Keluarga Mahasiswa UI. Untuk selanjutnya aksi-aksi banyak dimotori oleh senat (terutama senat fakultas), Keluarga Besar UI, serta sebuah kelompok berhalauan keras. Universitas Kristen Indonesia (UKI) lebih radikal dalam corak gerakannya dibanding UI. Yang menjadi semua motor aksi di UKI adalah Keluarga Mahasiswa UKI, demikian dengan keadaan di kampus Universitas Nasional (Unas). Gong terbesar dari gerakan mahasiswa di Jakarta adalah tewasnya empat mahasiswa Universitas Trisakti karena tembakan aparat, gerakan di kampus Usakti ini juga tak kalah radikal dengan UKI. Di Bandung dominasi ITB dan Unpad dalam gerakan mahasiswa mulai digeser oleh kampus-kampus lain. Gerakan semakin merata di kampus Universitas Islam Nusantara (Uninus), Sekolah Tinggi Teknik Mandala, dan kampus kampus lainnya.

Secara keseluruhan gerakan mahasiswa 1998 menurut beberapa pengamat jauh lebih hebat dibanding tahun 1974 dan 1978. Isyu yang mengikatnya lebih kuat, yaitu krisis ekonomi dan politik yang dampaknya dirasakan semua lapisan masyarakat disamping mahasiswa yang terlibat adalah di seluruh kawasan nusantara ini. Namun gelombang aksi sekarang barulah pada tahap pemanasan, represi militer masih terkesan tanggung meskipun sudah menelan korban jiwa, karena tank-tank militer belum masuk kampus seperti di tahun 1978. Dan kemenangan gerakan mahasiswa dengan turunnya Soeharto barulah awal dari perjuangan reformasi yang sesungguhnya.

❑ **Ichwan,** dari berbagai sumber

Dari Demonstrasi Ke Revolusi

Perdebatan yang menghangat begitu Soeharto turun dan Habibie naik adalah masalah konstitusional atau tidaknya proses turunnya Soeharto dan naiknya Habibie. Bebebrapa pengamat mengemukakan pendapat dan pandangannya sendiri tentang keadaan tersebut, sebagaian berpendapat bahwa hal tersebut sudah konstitusional dengan berlandaskan pasal 8 UUD 1945. Sebagian yang lain berpendapat bahwa hal tersebut tidak bisa dikatakan konstitusional.

Aksi mahasiswa 1998 telah mencapai a n t i klimaksnya. Turunnya Soeharto setidak-tidaknya merupakan sebagian dari hal yang membuat para mahasiswa dan aktivis pro reformasi merasa lega. Dasar pemikirannya bahwa turunnya Soeharto paling tidak sudah membuka satu pintu bagi tuntutan selanjutnya, tuntutan bagi perubahan yang lebih mendasar yang akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi kehidupan bangsa ini. Namun demikian tuntutan reformasi tidak hanya berhenti dengan tuntutan reformasi dengan target utama turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan. Tuntutan reformasi lebih terfokus lagi, yakni tuntutan reformasi total, reformasi yang akan membawa perubahan mendasar atas rezim orde baru. Namun apakah memang turunnya Soeharto akan menjamin gerakan reformasi total akan berjalan damai tanpa jatuhnya korban jiwa yang lebih banyak lagi, tanpa pengorbanan harta benda yang lebih banyak lagi?

Reformasi ataupun reformasi total menurut Huntington lebih mengarah pada perubahan yang terbatas dalam cakupan dan moderat dalam laju kepemimpinan, kebijakan, dan pranata-pranata politik. Kesimpulannya reformasi yang dituju berbeda dengan revolusi yang berarti perubahan mendasar pada semua komponen dalam suatu sistem politik *(Kompas, 4/05, 1998)*. Dalam reformasi, yang diperlukan adalah kinerja sistem politik yang sedang berlangsung. Termasuk di dalamnya adalah kekuatan politik para pendukung reformasi, kekuatan pendukung status quo, perimbangan kekuatan keduanya dan strategi yang dipilih pendukung masing-masing. Namun dengan suara-suara tuntutan terhadap reformasi total memang bisa dikatakan bangsa bangsa ini sedang menapaki jalur revolusi, revolusi secara damai.

Turunnya Soeharto dan menurunnya aktivitas demonstrasi mahasiswa menuntut reformasi serta naiknya Habibie menggantikan Soeharto menimbulkan peta kekuatan

Amien Rais, Reformasi jalan terus. Foto: Ali, Kentingan

yang tidak transparan. Menurut Permadi SH setelah turunnya Soeharto dan naiknya Habibie kekuatan atau peta politik terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok pendukung Habibie. Kelompok ini mendukung naiknya Habibie sebagai presiden RI ke tiga dan mendukung agenda yang ditetapkannya untuk melaksanakan Sidang Umum MPR, kemudian Pemilu dan diikuti dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru. Kelompok kedua adalah kelompok pendukung reformasi total. Reformasi total yang dimaksud adalah pembongkaran seluruh produk rezim Soeharto, dengan demikian diharapkan negara ini akan hidup dalam alam kehidupan baru di era "Orde Reformasi" dengan sistem kehidupan yang sama sekali baru. Sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang terbebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme serta di alam kehidupan yang lebih demokratis. Ketiga adalah kelompok yang punya kecenderungan mementingkan kepentingan golongan atau kelompoknya sendiri. Yang bisa digolongkan di dalamnya menurut penggemar pakaian hitam-hitam ini adalah mereka yang begitu gencar menyuarakan pembebasan seluruh tapol dan napol rezim orde baru serta berlomba-lomba untuk mendirikan partai baru ataupun partai wajah lama yang dimunculkan kembali.

Keadan seperti itu mau tidak mau harus membuat seluruh elemen pro demokarsi dan pro reformasi berpikir lebih keras lagi terutama bagi mereka yang murni berjuang untuk kebaikan negeri ini tanpa pamrih sedikitpun. Perlu untuk diperhatikan dan dipikirkan perkataan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang mengungkapkan kesedihannya karena negeri ini seperti telah dikapling-kapling. Kalau memang demikian niscaya kehancuranlah yang menunggu negeri ini bukan kehidupan yang lebih baik.

Perdebatan yang menghangat begitu Soeharto turun dan Habibie naik adalah masalah konstitusional atau tidaknya proses turunnya Soeharto dan naiknya Habibie. Bebebrapa pengamat mengemukakan pendapat dan pandangannya sendiri tentang keadaan tersebut, sebagaian berpendapat bahwa hal tersebut sudah konstitusional dengan berlandaskan pasal 8 UUD 1945.

Sebagian yang lain berpendapat bahwa hal tersebut tidak bisa dikatakan konstitusional. Pernyataan berhenti itu menurut sejumlah pengamat seharusnya tidak dilakukan di Istana Merdeka. Karena Istana bukanlah gedung rakyat. Pernyataan berhenti seharusnya dilakukan di gedung DPR/MPR tempat dimana Presiden dan wakli presiden dulu diangkat dan diambil sumpahnya. Juga dipersoalkan karena penghentian jabatan itu tidak disertai pengembalian mandat kepada MPR. Pandangan ini mengingatkan bahwa Saoeharto diangkat sebagai presiden dengan sebuah TAP MPR yakni TAP MPR No. IV/MPR/1998, sedang Habibie sebagai wakil presiden diangkat dengan TAP MPR No. VI/MPR/1998. Pandangan tersebut menyaratkan dicabutnya dulu TAP MPR No. IV/MPR/1998. Demikian pula dengan pengangkatan Habibie sebagai presiden baru dan pengambilan sumpah seharusnya dilakukan pula di depam sidang DPR/MPR sesuai dengan pasal 9 UUD 1945. Memang dalam pengangkatan Habibie sebagai presiden dihadiri oleh pimpinan DPR/MPR tetapi bukanlah DPR/MPR itu sendiri. Presiden sebagai mandataris MPR di dalam proses pergantian Soeharto ke Habibie tidak bisa terpenuhi, karena naiknya Habibie seperti naiknya seorang putra mahkota menggantikan raja yan sudah tidak mampu lagi. Pergantian raja kepada putra mahkota adalah hak prerogatif raja tanpa harus memperhatikan elemen-elemen negara lainnya. Demikian sebagian pendapat yang berkembang menyikapi pergantian presidean dari Soeharto ke Habibie. Pendapat yang lain adalah tentang masa jabatan Habibnie. Menurut Soeharto Habibie akan menjadi presiden sampai tahun 2003 tetapi banyak kalangan tidak setuju dengan pendapat itu. Habibie hanyalah presiden sementara, presiden masa transisi, demikian pendapat Amien Rais dan Dr. Nurcholis Madjid. Terlepas dari hal tersebut kesimpulan yang bisa diambil bahwa kepemimpinan Habibie belum bisa diterima oleh semua elemen atau unsur bangsa ini. Pergantian Soeharto memang menimbulkan kutub-kutub baru yang bila tidak diwaspadai bisa mengakibatkan *chaos* yang lebih besar lagi pada bangsa ini.

Pergantian Seharto walaupun demikian tetaplah hal yang seharusnya terjadi, demikian menurut sejarawan UGM, Prof. Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif. Menurutnya sebenarnya perubahan ini sudah terlambat, karena selama ini seakan-akan seluruh elemen bangsa tersihir oleh paradigma-paradigma palsu yang dibangun Soeharto bersama para pendukungnya. Berakhirnya orde baru boleh dikatakan masih tidak begitu berbeda dengan jatuhnya orde lama, sama-sama meminta korban yang tidak ternilai lagi. Mengapa hal demikian bisa terjadi tidak lain salah satu penyebabnya adalah kesalahan elit politik maupun elit ekonomi yang seakan-akan sudah mati rasa. Bangsa ini terpedaya oleh penampakan yang semu. Bangsa ini seakan-akan terpadaya oleh gambaran fisik yang menampakkan seolah-olah kita berhasil. Data statistik yang menunjukkan kenaikan pendapatan perkapita yang tahun 1960-1970-an mencapai 70 dollar AS dan Juni 1998 mencaoai 1.180 dollar AS memang terkesan hebat dan menakjubkan dan tidak sadar bahwa fundamental ekonomi bangsa ini keropos.

Turunnya Soeharto dan menurunnya aktivitas demonstrasi mahasiswa menuntut reformasi serta naiknya Habibie menggantikan Soeharto menimbulkan peta kekuatan yang tidak transparan. Menurut Permadi SH setelah turunnya Soeharto dan naiknya Habibie kekuatan atau peta politik terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok pendukung Habibie. Kelompok ini mendukung naiknya Habibie sebagai presiden RI ke tiga dan mendukung agenda yang ditetapkannya untuk melaksanakan Sidang Umum MPR, kemudian Pemilu dan diikuti dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru. Kelompok kedua adalah kelompok pendukung reformasi total. Reformasi total yang dimaksud adalah pembongkaran seluruh produk rezim Soeharto, dengan demikian diharapkan negara ini akan hidup dalam alam kehidupan baru di era "Orde Reformasi" dengan sistem kehidupan yang sama sekali baru. Sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang terbebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme serta di alam kehidupan yang lebih demokratis. Ketiga adalah kelompok yang punya kecenderungan mementingkan kepentingan golongan atau kelompoknya

Pancasila dan UUD 1945 yang selama rezim orde baru begitu diagungkan sampai terkesan disakralkan nampaknya sudah "lelah" mengikuti dinamika dan perkembangan bangsa ini. Dan tuntutan reformasi total termasuk di dalamnya meninjau kembali Pancasila dan UUD 1945 adalah hal yang wajar, perubahan yang didinginkan adalah perubahan total, perubahan semua sisitem produk orde baru yangterbukti sudah tidak cocok lagi dengan sistem yang sama sekali baru yang akan membawa bangsa ini ke kehidupan yang lebih gemilang. Dan ini adalah revolusi, revolusi secara damai. Menarik sekali apa yang dikemukakan oleh seorang profesor filasafat dari Cina, Ding Zilin, seperti yang dikutip oleh kantor berita AFP bahwa pengunduran diri Soeharto dari jabatannya merupakan kemenangan bagi gerakan-gerakan demokrasi di Asia, karena Indonesia sudah mulai mengadakan perubahan yang akan mempengaruhi negara-negara lain di Asia seperti Cina, Myanmar, dan Korea Utara yang masih berada dalam kekuasaan kediktatoran lama. Indonesia menjadi pelopor gerakan reformasi atau bahkan revolusi di kawasan Asia.

❑ **Tim Fokus Utama**

Aidul Fitriciada,
Staf Pengajar Fakultas Hukum UMS Dan Pengamat Politik

Tumpas Kelor,
TRADISI PERGANTIAN KEKUASAAN

Foto: Kentingan

Maraknya aksi demonstrasi mahasiswa yang berpuncak pada aksi anarkhis rakyat dengan wujud penjarahan dan pembakaran merupakan suatu perwujudan partisipasi rakyat yang tersumbat. Diketika partisipasi rakyat ini tersumbat maka akan terjadi perlawanan secara eksplosif dan bersifat anarkhis dan menuntut adanya perubahan politik. Adanya ketetapan hukum yang membatasi dan bersifat represif pada saat terjadinya perlawanan ini akan menyebabkan ledakan amarah massa atau ketidakberlakuan hukum, segalanya akan dilakukan oleh rakyat. Jadi yang berlaku saat kondisi semacam ini adalah terpenuhinya tuntutan keadilan. Jika yang terjadi di Indonesia adalah kasus penjarahan dan pembakaran , dua kasus ini hanya merupakan simbol bagi rakyat untuk menuntut suatu keadilan bagi dirinya walaupun keduanya akan ditebus dengan sosial cost yang tinggi.

Adanya aksi-aksi mahasiswa yang menuntut reformasi tidak ditanggapi apakah akan menyebabkan revolusi ?

Revolusi tidak akan terjadi secepat itu, karena suatu revolusi adalah suatu proses yang memerlukan rantaian yang panjang. Kemungkinan untuk menjadi sebuah gerakan revolusi saat ini adalah kecil sekali karena *pertama*, komando tunggal tidak ada, *kedua*, ABRI sebagai kekuatan mileter tidak pecah walaupun secara internal sudah pecah tetapi tidak mencuat keluar. Suatu revolusi senantiasa menyertakan militer, militer disini karena menguasai persenjataan yang ada. Yang terjadi saat ini hanya sebatas kerusuhan karena ketidakhadiran keduanya diatas.

Secara khusus apa syarat-syarat terjadinya revolusi ?

Pertama, ketidakmapanan ekonomi, ini hanya merupakan pemicu. *Kedua*, sistem politik yang tidak demokratik sehingga menyebabkan partisipasi rakyat yang tersumbat. *Ketiga*, sistem sosial yang feodal. Maksudnya disini antara lain adanya diskriminasi. Misalnya kejadian di Sumatra Timur pada saat tumbangnya raja-raja Melayu dengan membunuh raja dan keturunannya. Kalau yang terjadi sekarang ini, adanya Cina yang diserang oleh pribumi hanya merupakan sasaran simbolik aja, bukan hakekatnya. Hakekat yang terjadi adalah diskriminasi antara rakyat dengan pemerintah. Mengapa yang diserang keturunan Cina karena adanya kebijakan politik orde baru yang bersifat longgar sehingga memungkinkan adanya simbiosis mutualisme antara pejabat dengan keturunan Cina, karena semua rakyat mengetahui adanya budaya kolusi yang dilakukan keturunan Cina. Mengapa kemarahan rakyat tidak langsung ditujukan kepada pemerintah, karena timbulnya kesadaran akan keselamatan jiwanya.

Apakah reformasi bagian dari revolusi ?

Reformasi hanya perubahan yang bersifat parsial dan bersifat perbaikan sedangkan revolusi adalah rombakan total atau pengubahan yang meliputi seluruh tatanan pemerintahan.

Seanadainya revolusi terjadi bgaiman cara untuk menghindari jatuhnya korban yan banyak?

Untuk menyedikitkan korban dalam suatu proses revolusi sangat tergantung dari moral perilaku politik. *Pertama*, kesediaan untuk mengambil tanggung jawab atau menyerahkan tanggung jawab apabila tidak mampu dengan usaha yan telah maksimal. *Kedua*, penanganan pada kasus ini jangan bersifat represif, terutama oleh Abri. Kalau di Indonesia, sedikit sekali tokoh-tokoh yang mentradisikan untuk mengambil tanggung jawab, dapat dihitung dengan jari kalaupun ada, misalnya jendral Soemitro dalam peristiwa Malari, Soedrajad Djiwandono dalam masalah krisis moneter, kemudian kabinet Natsir ketika ada mosi tidak percaya.Ini tidak menjadi tradisi dari moral pejabat karena adanya sifat rakus yang disebabkan oleh first interest yang tinggi atau kepentingan yang terlalu besar. Ini terjadi karena adanya kultur dari struktur orde baru yang bersifat hierarkhis patrimonial, semua terpusat pada satu figur yaitu Presiden. Jadi ketika ada perilaku pejabat yang di bawah mengambil hati yang di atas akan menyebabkan sifat first interest. Padahal negara kita bersifat republik yang suasana demokrasinya tinggi, tapi yang terjadi sebaliknya patrimonial dan ketidaktransparanan.

Usulan reformasi dengan menuntut presiden turun ?

Akan sangat berat bagi presiden karena banyak hal. Yang utama karena sistem pergantian kepemimpinan di Indonesia adalah "tumpas kelor", setiap pergantian kekuasaan keluarga dihabisi dan ini menganut tadisi kerajaan lama.

❑

Nurul. HW

UNS DI MATA WONG SOLO

Secara institusional UNS memang memiliki LP2M sebagai lembaga pengabdian pada masyrakat dan juga memiliki lembaga penelitian, tetapi sifatnya masih sebatas mengejar "cum". Penelitian yang dihasilkan masih bersifat akademik, belum ke arah yang berhubungan dengan interaksi sosial antara kampus dan masyarakat

UNIVERSITAS Sebelas Maret didirikan tanggal 11 Maret 1976 berdasarkan Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1976. Saat itu nama perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret. Akhirnya dengan Keppres No. 56 Tahun 1982 nama Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret diubah menjadi Universitas Sebelas Maret disingkat UNS.

Pada awal berdirinya, UNS merupakan integrasi dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Surakarta. Perguruan tinggi-perguruan tinggi tersebut adalah IKIP Negeri Surakarta, AAN, STO, PTPN dan sejumlah perguruan tinggi swasta di Surakarta.

Universitas Sebelas Maret sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki lambang sebagai identitas yang menggambarkan misi dan tujuan didirikannya. Lambang Universitas Sebelas Maret terdiri dari beberapa bagian antara lain lambang bentuk bunga dengan empat putik daun bunga melambangkan bangsa, maksudnya UNS mempunyai tujuan mendidik generasi muda bangsa yang kelak akan membawa keharuman nusa dan bangsa. Tiga daun bunga di bagian atas, samping kanan dan samping kiri melambangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Satu daun bunga di bawah melambangkan Pancasila. Garis pembentuk empat daun bunga dibuat secara berantai sedemikian rupa melambngakan kesatuan seluruh Civitas Akademika Universitas Sebelas Maret. Keseluruhan bagian ini berada dalam satu bentuk putik bunga yang digambarkan sebagai wiku. Tahun berdirinya UNS diwujudkan dalam candra sangkala berbunyi "**Mangesti Luhur Ambangun Nagara**" yang menggambarkan angka tahun Jawa 1908 atau tahun 1976 Masehi.

Tanggal 11 Maret 1998, UNS telah memasuki usianya yang ke-22 sejak kelahirannya 11 Maret 1976. Suatu rentang usia yang masih cukup muda namun juga cukup dewasa untuk menghasilkan prestasi yang membanggakan. Namun apakah memang sudah demikian keberadaan UNS? Dalam arti apakah memang dalam rentang usia tersebut UNS telah menghasilkan prestasi yang berguna bagi masyarakat banyak.

Secara kelembagaan UNS terus berusaha meningkatkan kinerja dan eksisitensinya sebagai institusi pendidikan tinggi di tengah persaingan dengan lembaga pendidikan tinggi negeri dan swasta lainnya. Usaha tersebut diwujudkan

dalam Rencana Strategis Pengembangan UNS tahun 1996/1997 sampai dengan 2005/2006. Rencana tersebut mencakup program secara umum dan program khusus yang terdiri dari program andalan dan program **Teaching University** *(UNS Menyongsong Masa Depan, Kentingan edisi 05 Tahun 1998)*.

Meskipun demikian menurut pengamatan M. Taufik, SH, alumnus Fakultas Hukum UNS yang kini menjadi Ketua Komisi E DPRD Tingkat II Surakarta, keberadaan UNS sampai kini masih kurang dalam kontribusinya terhadap kehidupan masyrakat secara umum. Masyarakat masih melihat UNS seperti **akuarium**. Tingkat partisipasinya kepada persoalan masyarakat masih sangat kurang. Secara institusional UNS memang memiliki LP2M sebagai lembaga pengabdian pada masyrakat dan juga memiliki lembaga penelitian, tetapi sifatnya masih sebatas mengejar "cum". Penelitian yang dihasilkan masih bersifat akademik, belum ke arah yang berhubungan dengan interaksi sosial antara kampus dan masyarakat. Lebih jauh anggota DPR ini mengatakan bahwa bisa saja orang tidak sependapat dengan pendapatnya namun kenyataan jelas berbicara demikian, sebagai contoh kalangan pers yang bila membutuhkan nara sumber kaum akademisi pasti memilih dari UNDIP atau UGM, kalau UNS dipandang mampu pasti mereka akan memilih dari UNS tetapi kenyataannya *kan* tidak demikian, tentu saja hal tersebut harus menjadi cambuk bagi UNS.

Berbicara tentang keberadaan UNS di Solo anggota DPR yang baru saja melaksanakan ibadah haji tersebut menemukan banyak hal yang bisa dipetik dari pendapat di atas. Misalnya berhubungan dengan persoalan-persoalan di Solo, UNS belum banyak memberikan sumbangan pemikiran. UNS seharusnya mengadakan kerjasama dengan Pemda dalam penyelesaian masalah budaya sebagai antisipasi bagi perkembangan dunia global dalam mempertahankan predikat Solo sebagai kota budaya. UNS seharusnya memiliki pakem pemikiran, dalam hubungan dengan sejarahnya serta arsitekturnya yang seharusnya mampu mengungkapkan bahwa inilah Solo yang sebenarnya. Sementara di Solo sendiri banyak terjadi penggerusan benda-benda budaya dan terkesan bahwa pemerintah dan pengusaha mengabaikan institusi UNS, disamping kepekaan masyarakatnya sendiri terhadap kelestarian budaya yang masih sangat kurang. Bila dibandingkan dengan UGM, jelas UGM sebagai institusi ilmiah terkesan memiliki wibawa yang tidak akan diabaikan oleh institusi lainnya.

Berkait dengan rencana pengembangan kota Solo sebagai kota budaya yang bertaraf internasional, mantan aktfis mahasiswa ini menegaskan bahwa sekarang bukan saatnya mencari warna dasar dari kota Solo. Tetapi bagaiman agar UNS dan pengembangan Bandara Adisumarmo sebagai bandara internasional bisa memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat Solo yang tentu saja ini adalah tugas dari institusi ilmiah seperti UNS. Sebab kalau kita telah menjadi bagian dari masyarakat dunia atau *"borderless world"* yaitu negara

yang kehilangan batas-batasnya, yang muncul kemudian adalah kompetisi dalam segala bidang. Tantangannya adalah mampukah UNS merumuskan hal-hal yang patut ditonjolkan tentu saja dengan kelebihan-kelebihannya. Misalnya aset budaya dan bandara internasional tersebut. Jadi nantinya masyarakat akan menikmati kemajuan tersebut bukan justru menjadi korban dari pergaulan "tanpa batas" dalam persaingan global tersebut. Yang terlihat sekarang rembesan budaya demikian kuat tetapi *income* daerah yang diperoleh dari sektor pariwisata rendah dan UNS belum memikirkan pemanfaatan potensi-potensi Solo. Orang di Solo hanya cenderung mampir saja, bukan singgah, daerah tujuan wisata masih Bali dan Yogya.

Kesimpulannya keberadaan UNS masih jauh dari harapan masyarakat. Persoalan masyarakat kurang disambut oleh civitas akademika UNS , misalnya kasus-kasus proyek yang tidak beres ataupun kasus-kasus budaya. Jadi secara umum civitas akademika UNS masih bicara pada tataran *elitis* dan belum kena pada sasarannya.

Untuk masalah aktifitas dari civitas akademika dinilai yang menonjol adalah peran mahasiswanya (dalam hubungan dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat). Misalnya diwujudkan dalam bentuk aksi-aksi gaya mahasiswa dalam merespon isu-isu yang berkembang di masyarakat luas sebagai bukti kepekaan terhadap berbagai persoalan masyarakat. Sementara untuk dosen dan tenaga peneliti (LP2M), sampai sekarang hanya berkutat pada teknis-teknis KKN. Menurut anggota DPR yang tidak segan bergabung dalam demonstrasi mahasiswa ini, hal tersebut sudah kuno. KKN seharusnya *implementatif* bukan dalam rangka memenuhi mata kuliah yang harus ditempuh dan mengejar jumlah SKS saja namun hendaknya lebih ke arah kemanfaatan bagi obyek KKN seperti membina pedagang kecil ataupun pengembangan wisata budaya melalui pembuatan atau penggagasan paket-paket budaya yang akan sangat berharga.

Senada dengan yang dikemukakan M.Taufik adalah apa yang dikatakan oleh seorang penduduk di sebelah timur kampus UNS, yang biasa mangkal di *cafe*-nya di depan Asrama Mahasiswa UNS, dan biasa dipanggil Pak Gimun. Dikatakannya bahwa keberadaan UNS selama ini sama sekali belum memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan sosial bagi kalangan orang kecil seperti dirinya. Keberadaan UNS masih sebatas pada institusi yang hanya bisa dirasakan manfaatnya oleh kalangan yang mampu membiayai pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi, jadi manfaatnya hanya sebatas penyediaan lembaga pendidikan bagi mereka yang tertarik dan mampu tentunya. Menyinggung program KKN, pedagang makanan yang selalu akrab dengan kalangan mahasiswa ini mengatakan bahwa program itupun masih sebatas pada pemenuhan kewajiban bagi subyek yang melaksanakannya, jadi memang belum ada gerak yang *implementatif* dari program KKN tersebut, kalaupun ada hasil yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dari hasil KKN masih sebatas *dadakan* saja. Maksudnya, memang mungkin dalam satu periode KKN menghasilkan suatu karya yang bermanfaat bagi masyarakat namun *toh* itu belum tentu lima tahun sekali dihasilkan dan itu *toh* diperuntukkan bagi daerah yang jauh dari UNS sementara masyarakat di sekitar UNS sendiri tidak pernah tersentuh.

Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri UNS tetap merupakan acuan bagi perguruan tinggi swasta di daerah Surakarta dan sekitarnya, demikian penilaian Prof. Drs. Dochak Latief, rektor Universitas Muhamadiyah Surakarta. Berkaitan dengan keberadaan perguruan tinggi swasta di Surakarta dan sekitarnya, keberadaan UNS menurut rektor UMS ini lebih sebagai partner berlomba bukan sebagai saingan. Suasana berlomba dalam peningkatan kualitas lembaga sebagai institusi pendidikan maupun berlomba dalam usaha menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan wawasan keilmuan yang mendalam.

Disinggung tentang ada tidaknya hubungan "pribadi" antara UNS dengan UMS rektor yang terkesan familiar dan terbuka ini mengatakan bahwa kerjasama antara UNS dengan UMS lebih bersifat informal. Kerjasama yang dimaksud adalah dalam hal penyediaan sumber daya pengajar atau dosen di UMS. Dosen-dosen di UMS sebagian besar berasal dari ITB, UGM dan yang paling banyak adalah dari UNS, sekitar 50% tenaga pengajar di UMS berasal dari UNS. Disinggung masalah mutu alumni UNS dalam mengajar dikatakannya bahwa memang belum ada pemantauan secara detail tentang kualitas tenaga pengajar di UMS. Namun adalah kewajiban dari mereka yang sudah memilih dosen sebagai profesi untuk selalu meningkatkan kualitas dirinya.

arifa'i

Senada dengan rektor UMS, rektor Universitas Slamet Riyadi (UNISRI), Drs. Sarwoto mengatakan bahwa menginjak usianya yang ke-22, UNS telah memberikan andil yang cakupan wilayahnya tidak hanya di Solo saja, namun sudah sampai ke tingkat Jawa Tengah. Wilayah garap UNS, menurut alumnus IKIP Negeri Surakarta tahun 1976 ini tidak terbatas pada bidang pendidikan saja namun juga sudah mencakup bidang sosial maupun ekonomi. Salah satunya adalah kerjasama dengan Bapeda. Namun demikian bagian yang paling menonjol tetap misi dasar UNS sebagai lembaga pendidikan tinggi, yakni dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal yang menonjol menurut rektor UNISRI ini adalah kesempatan studi lanjut bagi staf pengajar yang terbuka luas. Dan memang demikian kenyataannya, terutama dalam rangka pengembangan Fakultas Teknik dan Fakultas MIPA memang seakan ada unsur berlomba-lomba bagi staf pengajar untuk studi lanjut baik ke jenjang S2 maupun S3. Dan sekali lagi hal tersebut masih dalam tataran elitis, masih terbatas pada pengembangan UNS ke arah dalam.

Menyinggung aktifitas civitas akademikanya, kedua rektor perguruan tinggi swasta di Solo ini masih memandang mahasiswanya yang paling menonjol. Meskipun bagi rektor UMS kesempatan pengembangan diri mahasiswa ke arah pengasahan daya kritis terhadap fenomena sosial di sekitarnya masih lebih leluasa mahasiswa di universitasnya (universitas swasta. Red). Di universitas negeri jelas lebih banyak "hambatan" terutama yang berkaitan dengan alur birokrasi dibandingkan dengan universitas swasta yang agak lebih leluasa dalam menerapkan ide-ide yang lahir.

UNS sebagai institusi pendidikan tinggi jelas tak bisa dipisahkan dari keberadaan institusi pendidikan di bawahnya, yaitu pendidikan setingkat SMU dan SMK. Karena merekalah yang menyediakan sumber daya peserta didik yang nantinya akan dididik di UNS baik mereka masuk melalui jalur UMPTN maupun jalur non tes. Bahkan menurut Kuswanto, kepala SMU Negeri I Surakarta, 70% siswa-siswanya masuk ke UNS. Demikian juga dengan SMU Negeri IV, 50% lebih siswa-siswanya juga punya pilihan ke UNS. ❑

Indri/Himawan/Mukhlis/**Ichwan**

Drs. Ahmad Dahlan Rais, Staf Pengajar FKIP UNS

PERPUSTAKAAN BELUM OPTIMAL

Menginjak usianya yang ke-22, apa kontribusi keberadaan UNS yang bisa anda amati selama ini?

Saya melihat keberadaan UNS mewarnai kota Solo sebagai kota pendidikan. Bisa secara langsung atau tidak masyarakat Solo merasakan bahwa di kotanya ada sebuah perguruan tinggi yang bisa diharapkan. Karena realisasi sebagai lembaga yang dapat mendorong kemajuan masyarakat masih sangat kurang.

Keberadaan UNS tentu tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, bagaimana anda mengamati keselarasan UNS , baik program kerjanya maupun langkah-langkah dalam mempertahankan eksisitensinya dengan lingkungan Solo?

Suatu perguruan tinggi mestinya harus mengacu pada Rencana Induk Pengembangan atau RIP, harus berawal dari sana. Karena segala gerak dan dinamika, baik di tingkat universitas maupun fakultas harus mengacu pada Rencana Induk pengembangan itu. Di sana kita akan melihat apakah RIP yang dimiliki UNS sudah sejalan dengan keinginan masyarakat Surakarta yang menginginkan kotanya sebagai kota pariwisata dan budaya. Kalau kita mau melihat kita harus kembali ke RIP dan dari sana kita bisa melihat barangkali, kalau ada, hal-hal yang belum sinkron bisa disempurnakan lewat situ.

Terkait dengan kota Solo sebagai kota budaya dan perdagangan, lebih-lebih dengan dibukanya bandara Adisumarmo sebagai bandara internasional, apakah keberadaan UNS semakin mempertebal ciri khas Solo?

Saya kira itu masih merupakan tantangan, bagaimana UNS memainkan dirinya sebagai lembaga agar lebih nyata lagi. Memberikan warna yang jelas, mengambil bagian yang lebih konkret dalam pengembangan kota Solo ini. Solo sebagai pusat budaya, budaya Jawa khususnya dengan adanya dua kraton dan lain-lain, dan memang secara historis memang kebudayaan Jawa berasal dari Solo disamping Yogya. Kalau memang belum digarap oleh perguruan tinggi lain dan UNS bersedia menggarapnya, jelas akan menjadi ciri khas Solo, *trade mark*-nya Solo.

Apa harapan anda pada UNS?

UNS jangan kalah dengan perguruan tinggi lain. Memang tidak mudah mengejar ketinggalan dalam bidang keilmuan. Jika kita berlari, maka perguruan tinggi lain juga akan berlari. Kalau mau mendahului UI atau UGM ya, rasanya memang akan terkesan memaksakan diri. Dan memang bukan itu kan maksudnya. Jangan sampai ketertinggalan itu menjadikan kita mandeg, juga jangan terjadi pemborosan, jangan terjadi inefisiensi. Ya, yang namanya efisiensi dan produk oriented itu memang harus selalu dipegang dan harus selalu dikaji ulang. Sebab kadang-kadang bisa terjadi pencapaian sesuatu menyebabkan seseorang menjadi puas atau berhenti berkreaifitas, walau mungkin untuk sementara waktu. Jadi kita harus berpikir kreatif inovatif secara terus menerus untuk mengembangkan diri. Saya kira UNS sudah berkembang lebih baik lagi.

Apakah keberadaan UNS sudah memenuhi harapan tersebut?

Ada beberapa hal yang menjadi harapan saya. Khusus untuk penelitian-penelitian di lingkungan UNS hendaknya lebih ke arah memecahkan masalah-masalah yang berkembang di masyarakat. Berkaitan dengan ini, saya kira hubungan dengan pemerintah daerah sedapat mungkin harus lebih dioptimalkan. Kita sudah melihat kerjasama itu, tetapi apa ya hanya sebatas itu? Apa tidak bisa sikaji lebih jauh lagi? Masih banyak bidang-bidang lain seperti budaya, ekonomi, dan pengembangan masyarakat. Saya kira banyak sisi-sisi yang harus dan bisa dijamah UNS dalam rangka kontribusinya yang lebih nyata kepada *wong* Solo.

Unsur civitas akademik yang mana yang anda lihat paling menonjol dari keseluruhan civitas akademik di UNS?

Saya rasa tidak bisa begitu saja mengatakan yang mana itu. Hanya justru ada hal lain yang selama ini belum didayagunakan oleh UNS, yaitu alumni. Alumnus UNS semakin hari semakin bertambah dan yang punya posisi penting saya pikir juga tidak sedikit. Nah, bagaimana bisa menjalin kerjasama dan memanfaatkan keberhasilan alumni ini bagi pengembangan UNS. Khususnya untuk menjalin kerjasam adengan pihak-pihak di luar UNS. Kalau masalah kurangnya penampilan tenaga akademis UNS di forum-forum regional maupun nasional, saya rasa ya memang begitu.

Dan dalam kenyataannya memang terjadi proses saling menguntungkan. Contohnya UGM, sebagai institusi yang sudah dikenalakan secara langsung ataupun tidak langsung menguntungkan dosen-dosennya. Sehingga ada kecenderungan orang akan lebih percaya pada seseorang karena latar belakang institusinya. Tetapi bisa juga kebalikannya. Nama besar perguruan tinggi boleh jadi karena banyak melahirkan tokoh-tokoh yang memang berkaliber nasional maupin internasional. Tidak mudah memang untuk memecahkan kebuntuan ini, dan memang sedapat mungkin harus dipecahkan. Bagaimana kita bisa melahirkan seseorang yang bisa nampak unggul sdan sederajat dengan nama-nama populer lain.

Kalau masalh mahasiswanya, saya kira mahasiswa UNS bagus, tidak kalah dengan mahasiswa perguruan tinggi lain. Hanya ada satu keprihatinan di benak saya, yaitui mengenai pemanfaatan perpustakaan. Kalau kita bandingkan dengan Gadjah Mada misalnya, akan sangat jelas terlihat perbedaannya. Bagaimana mahasiswa di UGM memanfaatkan perpustakaan dan bagaimana mahasiswa UNS juga memanfaatkan perpuistakaannya. Tapi secara umum mahasiswa UNS bagus.

Masalah karyawan, tergantung juga pada pimpinannya. Apakah karyawan sudah bekerja dengan baik, apakah pembidangan atau penempatan posisi karyawan sudah sesuai dengan kemampuannya, apakah ketrampilan yang dimiliki sudah memadai, dan juga apakah mereka sudah bekerja seefisien mungkin. Khusus untuk karyawan jangan lupa pada tenaga lepas, tenaga harian seperti cleaning service. Tenaga kerja harian ini tidak bisa kita tuntut kerjanya agar optimal, karena mereka memang tidak memperoleh gaji secara tetap. Mereka hanya memperoleh sedikit honorarium yang jumlahnya jauh dari cukup..

❑Dinding/Ceria

HALIM. HD, Budayawan Solo

UNS Hidup Dan Tumbuh Di Alam Orde Baru Yang Penuh Dengan Rekayasa

Menurut pengamatan anda apa kortribusi yang telah UNS berukan kepada masyarakat selama ini?

Pertama, kalau kita lihat jelas bahwa kebaradaan suatu iniversitas di suatu daerah akan memberikan kontribusi pada daerah itu sendiri, hanya sekarang kontribusi itu dalam wujud apa dan dalam bentuk apa. Misalkan begini, secara umum yang kita hara[pkan dari keberadaan suatu universitas sebagai suatu wilayah masyarakat pemikir adalah adanya hasil-hasil yang bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan di masyarakat umum. Artinya kontribusi atau sumbangan-sumbangan pemikiran ini harus dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat umum. Disini bisa kita lihat melalui media masa, kalu UNS kita bandingkan dengan UNDIP, UGM atau yang lainnya, hal tersebut masih belum dapat dirasakan benar. Artinya kalau saya membandingkan dengan para pemikir dari UGM, ITB, Airlangga baik para sosiolognya, para pengamat politiknya, para ahli lingkungan hidup ataupun ahli kependudukannya secara umum apa yang mereka ulas atau analisa , peranan mereka sebagai pemikir secara umum merupakan suatu kekuatan moral untuk memberikan pemikiran kritis kepada masyarakat. Maupun dalam situasi sekarang ini yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baru dalam situasi yang tidak menyenangkan.

Kalau kita perhatikan memang ini akan berhubungan dengan latar belakang UNS sendiri. Pertama, UNS itu suatu universitas yang terbentuk da alam orde baru, artinya UNS merupakan universitas yang hidup dimana kekuatan orde baru sangatlah kuat. Akibatnya mau tidak mau UNS ini tumbuh di dalam lingkungan dimana rekayasa politik sudah membudaya dan begitu kuat. Semua ini membawa ke arah iklim berpikir yang lemah. Berbeda sekali dengan UGM, ITB ataupun Airlangga yang tumbuh dalam alam pergolakan pemikiran yang begitu hebat.

Bagaimana anda melihat keberadaan UNS bila dilihat dengan lingkungan Solo?

Eksistensi kampus mau tidak mau harus dilihat dari kapasitas yang ada di dalamnya. Sejauh mana probgam-progarm atau mimbar akademis di UNS seperti diskusi, seminar, mampu menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bisa disampaikan ke masyarakat luas. Terutama dalam kasus-kasus yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Seperti baru-baru ini, dengan giatnya para aktivis menggalang demonstrasi, ini kan suatu fenomena yang menarik bagi UNS.

UNS yang berdiri kurang lebih 22 tahun lalu menjadi sorotan bukan hanya di Indonesia namunjuga di dunia internasional. Ini merupakan kantribusi yang besar dalam kancah pemikian sosial politik, dan ekonomi yang populer sekaran dalam bentuk tuntutan reformasi. Tantangannya bisa tidak UNS menjadikan itu semua sebagai produk-produk pemikiran yang nantinya akan berperan dalam mengubah kehidupan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik. Tentu saja nantinya UNS ini akan menjadi kebanggaannya *wong* Solo. Seperti halnya perguruan tinggi di kota lain yang tidak hanya menghasilakn produk ilmiah tetapi juga mengahsilakan pemikiran-pemikiran dalam persepktif sosial politik juga budaya. Harapan kita, jelas agar UNS mampu berperan sebagai benteng bagi masyarakat dai kesewenang-wenangan penguasa.

Apakah keberadaan UNS sudah semakin mempertebal atau menjadi salah satu ciri khas kota Solo?

Seharusnya setiap kampus itu mempunyai semacam lembaga studi yang berhubugan khusus dengan area atau ciri khas tempatnya berada. Misalkan begini, bisakah UNS dalam hubungannya dengan letak geografisnya, ya, misalnya saja bisa tidak memiliki lembaga studi atau penelitian tentang batik di Solo. Pemikiran untuk menggali potensi-potensi atau pemikiran-pemikiran yang selam ini masih terpendam di lingkungan kraton Kasunanan dan Mangkunegaran. Begitu juga dengan sumber-sumber potensi budaya lainnya. UNS harus mampu dan mempunai perspektif studi yang luas terhadap wilayah in (Solo. Red) dengan satu perangkat berdasarkan pengalaman praktis terhadap wilayah sendiri sehingga lahir kecenderungan yang menjadi ciri khasnya. Seperti halnya di UGM atau IPB, mereka mampu memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan dan daerah tempatnya berada. Karena disiplin ilmu itu kan semakin spesifik tetapi juga membumi kan kerangka nilai dan kerangka pemikiran di wilayah masing-masing. Itu yang jadi persoalan ada nggak di UNS ini suatu lembaga studi wilayah yang mampu melahirkan pemikiran , kerangka teori dalam bidang sosial politik, ekonomi, antropologi, sastra dan lain-lainnya yang berlaku dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Harapan anda terhadap UNS?

Sebuah lembaga itu yang paling penting adalah SDM-nya. Mendirikan lembaga itu paling gampang tetapi mencari SDM yang berkualitas itu yang sulit. Berhubungan dengan tenaga dosen-dosen mudanya misalnya, jelas akan berbeda dengan dosen-dsen tua. Dosen muda akan membawa harapan kan lahirnya pemikir-pemikir baru. Dosen muda cenderung lebih bernas, memiliki perspektif pemikiran yang lebih terbuka. Dan tentu saja ada potensi yang besar untuk mengembangkan iklim dialog dan berdiskusi. Karena ilmu pengetahuan itu kan juga memiliki watak dan sistem yang terbuka.

Masih berhubungan dengan tenaga dosen-dosen mudanya, hendaknya juga dipacu untuk termotivasi belajar ke jenjang S2 paling tidak pada umur 26 tahun, terus untuk jenjang S3 diperoleh pada usia 35 tahun , berarti akan ada waktu 25 tahun bagi pengabdiannya. Daripada dosen yang umur 52 tahun baru S3, begitu dia selesai ya pensiun. Jadi sekali lagi sumber daya manusianya yang paling penting, sehingga nantinya kan terpacu untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran melalui lembaga studi yang ada dan yang akan ada yang lebih implementatif bagi masyarakat. Misalnya pusat studi kependudukan yang konsentrasinya pada masysrakat Solo.

Unsur civitas akademika yang mana di UNS ini yang anda lihat paling menonjol?

Saya kira unsur mahasiswanya, apalagi baru-baru ini dengan maraknya aksi demonstrasi mahasiswa. Kemudian teman-teman dari kalangan teater mengenal teater di UNS karena sering membaca di koran. Kalau saya pergi ke Bali,Ujungpandang atau Sumatera, mereka mengenal teater UNS pentas di Taman Budaya. Taman Budaya ini sudah terkenal di Indonesia dan menonjol sekali. Mereka punya image, teater kampus di Solo pasti teater dari UNS. Jadi kativitas kesenian mahasiswanya terkenal sekali. Dulu tahun 70-an teater dari UGM yang terkenal dari tetater kampusnya. Tetapi sekarang dari UGM ngak ada apa-apanya. Seperti mereka yang di fakultas Ekonomi, FISIP, FKIP, motivasi berkesenian mereka begitu kuat sekali namun ironisnya dukungan dari kalangan kampus sendiri sangat minimal.

Jadi ada indikasi bahwa kehidupan kesenian di UNS karena kativitas mahasiswanya, jadi ya, pokoknya jangan tergantunga pada taman budaya. Karena memang yang ideal kampus tidak hanya menjadi sumber kehidupan ilmiah saja namun juga menjadi sentra bagi kehidupan .

❑

Dinding/Ceria

Priyanto, FE-FU-Berlin

Pembangunan Ekonomi Orde Baru dan Resesi Ekonomi di Indonesia

"Lima tahun lagi saya akan kembali berdiri di mimbar ini untuk menyampaikan pidato pertanggung jawaban!"

Demikian Presiden RI setelah membacakan sumpah jabatan Presiden pada tanggal 1 Maret 1998 didepan sidang MPR dalam pelantikan jabatan Presiden RI untuk ke tujuh kalinya. Sementara itu para mahasiswa baik di pulau Jawa maupun di luar Jawa membuka mimbar bebas, berdemonstrasi menuntut reformasi politik dan memprotes praktek-praktek monopoli, korupsi, manipulasi jabatan dan represi terhadap rakyat tak bersenjata.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 30 tahun sangat pesat dan konstant. Pendapatan perkapita 1967: AS $ 80,- 1997 AS$ 990,- atau rata-rata 7% pertahun. Eksport meningkat dari AS $ 665 juta,- 1967 menjadi AS $ 52 Milyard AS$ 1997 atau tumbuh rata rata 9% pertahun. Pertumbuhan ekonomi yang sedemikian pesat mengakibatkan pemerintah RI di tahun 90-an mendapat pujian dari WB, MF,OECD, UNCTAD, berbagai institusi dan media internasional dan dari banyak negara maju maupun berkembang. Tahun 1985 organisasi PBB yang bergerak dibidang pangan, FAO memberi penghargaan pada Presdiden RI atas pencapaian swasembada pangan di Indonesia. Laporan ekonom profesional dari World Bank 19 Juni 1997 mengatakan bahwa awal milenium yang akan datang Indonesia akan menjadi salah satu dari 20 negara yang ekonominya terbesar/terkuat didunia. Pada 8 September 1997 Presiden RI kembali mendapat penghargaan, kali ini dari UNDP atas keberhasilannya dalam mengentaskan kemiskinan (beberapa bulan setelah itu kemiskinan dan kelaparan justru meningkat!). Di lain pihak hutang luar negeri tumbuh rata-rata 14% pertahun (dua kali lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi); pada tahun 1968 hutang LN berjumlah AS$ 2,8 milyard sedangkan pada tahun 1998 sudah mencapai AS$ 134 milyard). Selain itu selama 30 tahun pemerintahan orde baru mata uang rupiah telah terdepresiasi sampai sekitar 70% dan pernah sampai 98% yaitu pada 21 Januari 1998 ketika harga AS$ mencapai Rp. 16.000,- Direktur IMF Michel Camdesus pada 31 Okt. 1997 di Washington menyetujui *"rescue package"* IMF senilai AS$ 43 milyard,- yang dimaksudkan untuk menstabilkan nilai rupiah (reformasi sektor moneter) dan membiayai proyek-proyek pembangunan.

Ditengah tengah situasi ekonomi yang tersulit selama orde baru, figur-figur politik yang tidak kondusif dengan perkembangan ekonomi seperti "wapres aktif" B.J. Habibie (dikenal

sebagai penghisap devisa melalui proyek2 raksasanya), menperdag yang juga menperin Bob Hasan (pemegang monopoli sejumlah sektor produksi), mensos Siti Hardiyanti Rukmana (putri pertama Presiden RI, pemegang banyak usaha2 monopol), menkeu Fuad Bawazir (tidak kompeten untuk mengurus bidang keuangan yang tengah dilanda krisis), menpar Abdul Latief (pernah mengaku menyalahgunakan Rp. 3 triliun dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja) serta menteri pangan Haryanto Dhanutirto (dituduh korupsi oleh Irjenbang), justru muncul sebagai pembuat keputusan-keputusan pemerintah. Perseteruan pemerintah RI dengan IMF antara lain tentang penerapan CBS atau tentang program IMF yang terlalu liberal untuk Indonesia hanya justru menimbulkan ketidak percayaan para investor asing terhadap pengelolaan ekonomi di Indonesia. Menurut Dr. Komet Mangiri MA, direktur Center for Statistical Services (CSS), kebutuhan AS$ selama 1998 berjumlah AS$ 22,4 milyard,-(AS$ 20 milyard, -untuk membayar hutang jangka pendek dan AS$ 0,9 milyard, -untuk membayar cicilan hutang jangka panjang dan AS$ 1,5 milyard untuk menjalankan roda ekonomi). Sedangkan devisa yang tersedia pada awal April 1998 hanya AS$ 13,17 milyard (pengumuman BI 13 April 1998).

Pada tanggal 8 April 1998 untuk ketiga kalinya (pertama pada 31 Oktober 1997, kedua pada 15 Januari 1998) kembali pemerintah RI membuat suatu kesepakatan tentang reform ekonomi (Supplementary Memorandum) dengan IMF setelah dua kali pihak pemerintah RI dinyatakan oleh IMF tidak sepenuhnya melaksanakan komitmen-komitmen yang telah disepakati bersama dengan fihak IMF. Pada hal sebelumnya sudah ada sejumlah himbauan dari Presiden AS Bill Clinton, PM Inggris Tony Blair, Kanselir Jerman Helmut Kohl, PM Jepang Hashimoto, PM Singapur Goh Cok Tong, PM Australia John Howard, Menkeu Republik Federal Jerman Theo Waigel, meneteri pertahanan AS William Cohen, wakil menkeu AS Lawrence Summer dan direktur utama IMF Michel Camdesus agar pemerintah RI melaksanakan kesepakatan-kesepakatannya dengan IMF. Tahun anggaran 1998/1999 telah dimulai tetapi kurs dolar AS belum juga mencapai angka yang ditetapkan dalam APBN yang telah direvisi. Sementara tingkat harga-harga barang kebutuhan pokok (antara lain beras, kedelai, gandum, sayuran, susu, buah-buahan dan jasa transportasi) maupun produk-produk industri meningkat drastis; sedangkan sektor produksi berjalan lesu dan banyak terjadi PHK sehingga tingkat pengangguran meningkat pesat (menurut menteri tenaga kerja tingkat pengangguran 1998 mencapai 13,5 juta atau 14,7%). Kenaikan harga-harga tersebut, semakin menurunkan nilai riil rupiah yang sebenarnya nilainya sudah kehilangan sekitar 70% dihitung sejak sebelum krisis moneter (Juni 1997 ketika 1 AS$=Rp. 2500,-). Jika krisis moneter tidak terjadi, tingkat pendapatan perkapita masyarakat Indonesia 1998

akan melampaui AS$ 1000,- dengan adanya krisis moneter maka pendapatan perkapita turun menjadi AS$ 312,- atau kira-kira sama seperti tingkat pendapatan perkapita 23 tahun yang lalu. Disamping itu jumlah hutang LN terus meningkat pesat, menurut pengumuman BI 15 April 1998 hutang LN mencapai AS$ 133,7 milyard atau lebih dari dua kali lipat pendapatan nasional 1997. Persoalan-persoalan di atas menyebabkan penanganan krisis moneter dan ekonomi semakin lama semakin sulit, dan dukungan penuh ABRI terhadap pemerintah orba hampir tidak memungkinkan dijalankannya reformasi politik sebagai syarat bagi reformasi ekonomi untuk keluar dari krisis.

Tindakan-tindakan pemerintah untuk mengatasi krismon seperti menunda proyek-proyek yang kandungan importnya tinggi, mengganti segenap direksi BI, menaikan suku bunga SBI hingga mencapai tingkat 45%, menjamin dana deposito milik masyarakat, pencabutan izin 16 bank swasta, pengambil alihan pengelolaan 14 bank serta pengawasan khusus terhadap 40 bank oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional sempat memperkuat nilai rupiah terhadap dolar AS akan tetapi tindakan BI mencetak uang untuk membantu bank-bank yang mengalami kesulitan likwiditas malah menaikan laju inflasi yang akibat buruknya harus dipikul oleh seluruh rakyat Indonesia (yang paling terpukul atas tindakan BI tersebut adalah rakyat yang miskin). Jika Indonesia di masa orde lama dekade 50-an dilanda kemiskinan tapi mengalami kebebasan politik maka Indonesia masa orde baru saat ini tidak saja mengalami kemiskinan, ketidak amanan sosial, kesenjangan sosial tetapi juga pengekangan kebebasan politik serta kwalitas lingkungan hidup yang makin merosot. Mengapa Indonesia yang sejak 30 tahun mengekspor minyak, gas, emas, timah, bauksit, produk-produk perkayuan (hasil-hasil hutan), hasil-hasil laut, karet, kopra, teh, kopi, coklat dan produk-produk non migas lainnya dengan nilai rata2 AS$ 15 milyard,- justru terlilit hutang sebanyak AS$ 133,7 milyard dan dilanda krisis moneter yang memuncak menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan? Mengapa rezim orde baru yang mengandalkan stabilitas politik demi pembangunan ekonomi justru menghasilkan kemunduran ekonomi? Tulisan ini dengan segala keterbatasannya mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok ini. Pembahasan tulisan terdiri dari pembentukan kelompok-kelompok pemilik modal (I & II), referensi pembentukan kelompok-kelompok pemilik modal di Eropah barat, faktor-faktor internal dan eksternal pemicu krismon dan diakhiri dengan kesimpulan umum.

II.Pembentukan kelompok pemilik modal tahap I.

Sejak berdirinya orde baru, institusi-institusi politik masyarakat yang tertinggal adalah para partai politik yang konservatif ditambah dengan organisasi militer dan birokrasi. Dengan berlandaskan stabilitas politik untuk pembangunan ekonomi, pemerintah orba berhasil meyakinkan negara-negara barat untuk memberikan bantuan ekonomi mereka lewat IMF dan World Bank serta menawarkan iklim investasi yang menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan multinasional yang dapat memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia. Dengan bantuan IMF (*IMF adjustment programms*) pemerintah berhasil menurunkan peredaran uang, menurunkan APBN, melancarkan program peningkatan pengadaan pangan dengan mensubsidi pupuk tapi membatasi harga jual padi sehingga inflasi turun drastis dari sekitar 400% pada tahun 1965 hingga dibawah 10% diawal dekade 70 an.

Perkembangan ini menyebabkan dapat ditekannya upah buruh pabrik dan buruh tani sehingga menjadi faktor yang menguntungkan bagi penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri. Sementara itu mitra investor asing bermunculan sehingga pada awal masa orba sampai akhir dekade 70-an muncul kelompok pemilik modal yang kebanyakan terdiri dari mantan perwira ABRI yang bekerja sama dengan investor asing dan usahawan-usahawan lokal (misalnya Liem Sioe Liong, Mochtar Riady, Jusuf Wanandi dan Bob Hasan). Sejak 1965 Perusahaan-Perusahaan atau koperasi-koperasi ABRI diintegrasikan kedalam Inkopad, Inkopal, Inkopau dan Inkopak sementara dephankam pada tahun 1969 mendirikan perusahaan Tri Usaha Bhakti (pemegang konsesi pengelolaan hutan) sebagai induk perusahaan dari banyak perusahaan-perusahaan.

Tahun 1967 Yayasan Kartika Siliwangi mendirikan PT. Propelat yang mengelola hotel-hotel, perlengkapan militer sampai jasa-jasa konstruksi. Demikian juga kodam-kodam lain membentuk yayasan-yayasan yang melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Kebijaksanaan ekonomi orba berhasil memacu pertumbuhan ekonomi sambil melahirkan kelas pemilik modal yang tergantung pada alokasi proyek-proyek pemerintah yang banyak ditentukan oleh Presiden RI. Kenaikan harga minyak di pasaran dunia dari AS$ 4,-/barel menjadi AS$ 16,-/barel pada tahun 1973/1974 lalu dari AS$ 16 menjadi AS$ 32 pada tahun 1979 memungkinkan pemerintah RI untuk menghimpun devisa yang sangat banyak bahkan terbanyak dalam sejarah ekonomi Indonesia. Meningkatnya pendapatan kalangan elit perkotaan mendorong peningkatan kebutuhan akan produk-produk industri yang pada gilirannya mendorong perusahaan asing untuk menanam modalnya disektor industri di Indonesia sambil memanfaatkan murahnya tenaga buruh, tersedianya sumber daya alam dan stabilitas ekonomi. Karena pesatnya pertumbuhan ekonomi ,dan kemampuan pemerintah RI dalam mengumpulkan devisa, maka banyak pihak luar negeri terutama melalui IGGI (sekarang CGI) yang menawarkan pinjaman-pinjaman dalam bentuk dolar AS. Tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang, pemerintah RI disamping menerima pemasukan yang melimpah dari ekspor migas juga meningkatkan pinjaman luar negeri.

III. Pembentukan kelompok pemilik modal tahap II.

Pada dekade 80-an atas inisiatif Presiden RI terjadilah reform dan alih generasi di organisasi ABRI yang mengakibatkan meningkatnya ketergantungan ABRI pada Presiden sebagai panglima tertinggi ABRI. Sejak itu kaum pemilik modal tidak lagi didominasi oleh perwira militer tetapi oleh para konglomerat yang terdiri dari para pengusaha-pengusaha dan kerabat Presiden RI yang mendapat lisens monopoli/oligopoli dari pemerintah (Presiden). Kelompok-Kelompok konglomerat ini peranannya meningkat pesat setelah pemerintah menjalankan reform dibidang ekonomi (kebijaksanaan-kebijaksanaan liberalisasi/deregulasi ekonomi) yang dimulai sejak 1 Juni 1983 (Pakjun) sebagai jawaban atas menurunnya penerimaan ekspor migas. Kebijaksanaan 27 Oktober 1988 (Pakto) tentang liberalisasi perbankan memungkinkan para konglomerat itu meningkatkan omset mereka dengan cara mendirikan bank (beberapa bank) sehingga memudahkan mereka untuk memperoleh akses modal yang besar baik dari masyarakat maupun dari BI untuk membiayai grup-grup dan usaha-usaha mereka. Dengan demikian mereka dapat dengan cepat mengadakan usaha-usaha diversifikasi dengan bekerjasama dengan fihak investor asing. Pada tahun 1993 perusahaan yang total assetnya berjumlah lebih dari Rp. 1 triliun,- berjumlah 24 sedangkan tahun 1995 jumlah tersebut meningkat hampir 3 kali lipat menjadi 67 perusahaan. Nilai asset mereka dalam waktu hanya 2 tahun meningkat hampir 4 kali lipat dari Rp. 72 triliun,- (26% dari Pendapatan Nasional) pada tahun 1993 menjadi pada tahun 1995 nilai asset tsb berjumlah Rp. 272,8 triliun,- atau 83% dari Pendapatan Nasional.

Motif kerjasama pihak investor asing dengan konglomerat Indonesia terutama didasari oleh akses kekuasaan (monopoli/oligopoli) yang dimiliki konglomerat di Indonesia. Oleh sebab itu, kolusi tidak saja terjadi antara konglomerat dan pemerintah/birokrat didalam negeri tetapi juga melibatkan pihak asing yang terdiri dari perusahaan-perusahaan asing termasuk IMF dan World Bank (Prof. Jeffrey Winters mengatakan bahwa kurang lebih sepertiga dana pinjaman World Bank lenyap ditelan birokrasi pemerintah). Kebijaksanaan liberalisasi dekade 80-an hanya mengintensifkan proses pembentukan kelompok pemilik modal yang berdasar pada "patronage" dan tidak disertai dengan mekanisme kontrol, sehingga banyak terjadi kolusi dan manipulasi antara pihak bank swasta (atau para konglomerat) dengan pihak BI (meningkatnya kredit macet perbankan dan tidak dikembalikannya Kredit Likwiditas BI merupakan contoh-contohnya).

IV. Pembentukan Kaum Pemilik Modal di Negar-Negara Eropa Barat (Sebagai Suatu Contoh Perbandingan).

Munculnya kaum pemilik modal/industriawan di Eropah setelah revolusi industri abad 18 justru menyebabkan konflik kepentingan dengan negara yang represif (negara2 monarki) pada waktu itu. Dalam perkembangannya, peningkatan peranan kaum pemilik modal serta industriawan berhasil membuahkan revolusi-revolusi di AS (1776), Perancis yang disusul oleh revolusi-revolusi di negara-negara lain di Eropah barat pada pertengahan abad 19 dan berhasil membentuk institusi-instutisi negara modern yang lebih demokratis. Sebaliknya di Indonesia sektor negara yang represiflah yang melahirkan kaum industriawan/pemilik modal melalui mekanisme kolusi-manipulasi (nepotisme dan kolaborasi). Proses terbentuknya pemilik modal yang sedemikian tidak menghasilkan mekanisme kontrol terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi demi efisiensi dan akumulasi modal lebih jauh tetapi justru menimbulkan ketidak efisiensian dalam perekonomian nasional yang melemahkan daya saing Indonesia dengan pihak luar negeri. Perkembangan itu tidak mendorong para konglomerat di Indonesia untuk bersaing dengan produsen luar negeri di pasaran dunia karena posisi oligopoli mereka di Indonesia yang sangat menguntungkan, akibatnya devisa menipis karena meningkatnya impor dan pinjaman-pinjaman luar negeri.

V. Faktor-Faktor internal pemicu krismon di Indonesia.

Proses pembentukan kelompok pemilik modal di Indonesia mempunyai konsekwensi struktural yang dapat menjelaskan timbulnya krismon dan resesi ekonomi yang berkepanjangan. Berikut ini penjabaran dari konsekwensi2 tersebut.

1.1.Semakin meningkatnya defisit neraca tahun yang berjalan yang tidak diimbangi dengan peningkatan surplus neraca kapital yang memadai. Selama masa pemerintahan Orde "Baru"1 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata rata 7% pertahun. Selama 15 tahun terakhir penanaman modal asing tumbuh rata rata 23% pertahun dan hutang luar negeri bertambah rata rata 14,8% pertahun. Dengan demikian pertumbuhan investasi modal asing dan hutang luar negeri lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi. Transaksi kegiatan ekonomi Indonesia dengan luar negeri juga meningkat pesat; eksport barang dan jasa tumbuh sangat cepat hingga mencapai angka rata rata pertumbu han 28% pertahun. Pesatnya kenaikan arus modal asing dan hutang luar negeri mengakibatkan kenaikan pembayaran bunga dan cicilan dari modal asing dan hutang luar negeri pada tahun berikutnya. Demikian halnya dengan pesatnya kebutuhan akan import barang dan (terutama) jasa yang meningkatkan pembayaran atas import tsb. setiap tahunnya, selain itu juga karena kerawanan situasi politik akhir2 ini mendorong kecenderungan pelarian modal (a.l. dalam AS$) keluar negeri. Perkembangan2 ini mengakibatkan membengkaknya defisit "neraca tahun yang berjalan (current account)" yang menyebabkan permintaan akan AS$ yang semakin membesar sehingga mendorong naik harga AS$ di dalam negeri. Proses industrialisasi selama ini yang menggeser sektor pertanian mengakibatkan berkurangnya produksi bahan2 kebutuhan pokok produksi sektor pertanian, sehingga tahun 1997 Indonesia harus mengimport beras (6 juta ton), gula (400 ribu ton), kedelai (1 juta ton), sayuran (130 ribu ton) dan buah2an (90 ribu ton) 2. Dengan kata lain tidak saja sektor industri yang bergantung pada luar negeri tapi juga beberapa produk pertanian penting sebagai bahan konsumsi seluruh rakyat Indonesia. Sejak 3 tahun terakhir defisit neraca tahun yang berjalan naik 3 kali lipat dari AS$ 3,5 milyard tahun 1994 menjadi AS$ 10,1 milyard di tahun 1997. Kenaikan tsb. adalah konsekuensi logis dari industrialisasi yang tergantung akan impor barang modal, barang penolong, jasa2 pengangkutan, asuransi, perbankan, "transfer of income & profit" dari perusahaan asing keluar negeri dan jasa lainnya 3. Perkembangan tsb menunjukan bahwa selama ini pemerintah telah sukses menjalankan strategi "impor non migas" (bukan sukses dalam melaksanakan strategi ekspor non migas seperti yang sering digembar gemborkan selama ini).

Tindakan-tindakan pemerintah untuk mengatasi krismon seperti menunda proyek-proyek yang kandungan importnya tinggi, mengganti segenap direksi BI, menaikan suku bunga SBI hingga mencapai tingkat 45%, menjamin dana deposito milik masyarakat, pencabutan izin 16 bank swasta, pengambil alihan pengelolaan 14 bank serta pengawasan khusus terhadap 40 bank oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional sempat memperkuat nilai rupiah terhadap dolar AS akan tetapi tindakan BI mencetak uang untuk membantu bank-bank yang mengalami kesulitan likwiditas malah menaikan laju inflasi yang akibat buruknya harus dipikul oleh seluruh rakyat Indonesia

2.Meningkatnya jumlah uang beredar lebih cepat dari pertumbuhan barang dan jasa. Setelah pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan2 non moneter selama 1984-1988 4, maka pada 27 Oktober 1988 pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan deregulasi untuk bank2 swasta (dikenal dengan Pakto). Persyaratan pendirian bank swasta dipermudah (dengan hanya bermodalkan Rp.10 milyard siapapun boleh mendirikan bank!), batas maksimal pemberian kredit (legal lending limit) di perlonggar dari 15% menjadi 20% dan bank asing yang sebelum 1988 hanya boleh beroperasi di Jakarta, boleh mendirikan bank di kota2 besar di luar Jakarta sedangkan bank swasta nasional boleh beroperasi sampai di tingkat kabupaten. Sejak itu bank2 swasta dengan kantor2 cabangnya tumbuh menjamur. Tahun 1988 terdapat hanya 75 bank dengan 1640 kantor2 cabang sedangkan tahun 1996 terdapat 238 bank dengan 5639 kantor cabang diseluruh Indonesia. Dalam waktu kurang dari 10 tahun jumlah bank meningkat lebih dari 300% sedangkan jumlah kantor2 bank meningkat hampir 350%. Nilai alokasi kredit sejak 1988 hingga 1996 meningkat sampai 751%!!. Pada 1988 jumlah alokasi kredit Rp. 40,8 triliyun sedangkan 1996 meningkat menjadi Rp. 306,6 triliyun5. Peningkatan ini sangat mencolok terutama pada 2 tahun terakhir. Akibatnya jumlah uang beredar bertambah lebih cepat

BIDIK

Foto : Dok. SOLO POS

Di saat suasana tak ramah lagi terhadap anak bangsa, segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidup semakin sulit terjangkau, sementara hati nurani ini sudah tak bisa lagi menerima ucapan manis dari "sana" yang tak lain hanyalah kebohongan. Dan suara-suara ke arah kebaikan tak pernah di dengarkan, maka ... tak ada lagi yang bisa kami lakukan selain, "semua ini harus dihentikan..."

Foto : Ali Rustamaji (LPM)

Foto : Dodo (Surya)

Jeritan nurani yang selama ini tak pernah didengarkan bahkan telah sengaja disumbat agar tidak terucap hanyalah mengakibatkan akumulasi kekecewaan ... dan pelampiasan yang ada acapkali tak terduga ...

BIDIK

Foto : Ali Rustamaji (LPM)

Memakan waktu lama untuk bercita-cita, memakan waktu lama untuk mewujudkannya dengan pengorbanan yang tidak sedikit, namun semua itu hancur dalam waktu yang sesaat saja ...

Foto : Ali Rustamaji (LPM)

Foto : Ali Rustamaji (LPM)

Salah siapa bila batas yang boleh dan yang tidak boleh terhilangkan, salah siapa bila semua orang merasa berhak atas yang bukan haknya ... ?

BIDIK

Foto : Ali Rustamaji (LPM)

Semua yang tidak seharusnya, namun telah terjadi membangkitkan kembali kebersamaan yang selama ini telah terpendam, terkikis oleh ambisi masing-masing pribadi. Kebersamaan timbul kembali untuk bersama saling menjaga agar tidak termakan gejolak yang tidak seharusnya.

Foto : Ali Rustamaji (LPM)

Foto : Ali Rustamaji (LPM)

Gejolak yang tidak seharusnya itu pun membangkitkan kreativitas untuk menjaga diri, meskipun yang nampak justru seakan membawa ke masa silam dimana kotak-kotak tercipta hanya untuk mereka yang merasa menciptakan kotak itu. Haruskah bangsa ini tercerai berai kembali atas kotak-kotak yang selama ini terbungkus persatuan dalam kebhinekaan.

BIDIK

Foto : Dok. SOLO POS

Akhirnya kematian tiba-tiba menjadi sia-sia, nyawa menjadi tidak berharga, melayang untuk sesuatu yang kabur, tanpa kepastian. Mungkin sebuah kepastian yang digelapkan oleh air mata. Atau sebuah kepastian diperkosa dan diinjak-injak oleh, entah, siapa. Sepertinya semua harus menjawab. Oleh siapa ... ?

Foto : Dok. SOLO POS

Dia yang selama ini hanya bisa disentuh oleh sebagian manusia, yang di mata kebanyakan, mereka adalah sesuatu yang sulit dijangkau. Ya, akhirnya, dia tak lebih yang bernama sampah.

Perjuangan tak pernah berlangsung mulus, bukan seperti jalan tol. Berharap suka dalam perjuangan memang seperti hidup kita yang merindukan bulan di tengah hari. Mari kita sedikit merenung, pantaskah pengorbanan ini ... ?

Narasi : Ichwan, Foto : SOLO POS, Dodo (SURYA), Ali Rustamaji (Kentingan)

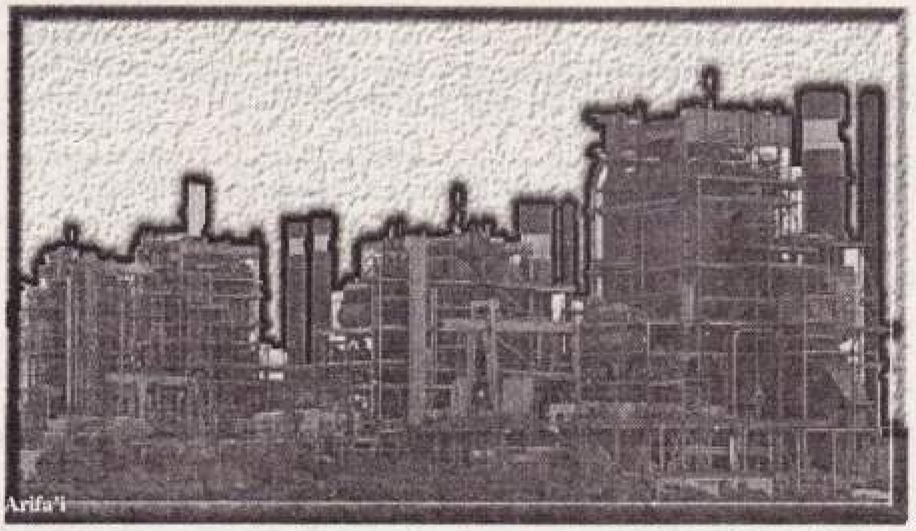

Arifa'i

daripada pertambahan barang dan jasa di pasaran dalam negeri, sehingga harga2 dalam negeri terdorong naik. Dengan demikian secara riil nilai Rupiah merosot; selain itu perbedaan tingkat inflasi di AS dan di Indonesia semakin tajam sehingga mendorong orang untuk menyimpan kekayaan mereka tidak dalam bentuk rupiah melainkan dalam AS$. Mengapa alokasi kredit sangat pesat? Sebagian besar pemilik bank swasta adalah konglomerat yang beroperasi berdasarkan kelompok bisnis "in group". Dalam tahun2 terakhir bank swasta banyak beralih fungsi menjadi penyalur kredit untuk group sendiri. Akibatnya kontrol bank sebagai pemberi kredit atas nasabah yang menggunakan kredit tidak berfungsi sebagai mestinya. Kalau ada kredit yang sudah lebih dari 3 bulan tidak dikembalikan maka kredit tsb dikatagorikan sebagai kredit macet. Dalam situasi seperti ini bank swasta boleh mengajukan kredit likwiditas (KLBI) pada BI. Untuk menyehatkan bank tsb BI terpaksa memberikan fasilitas KLBI itu (tentu saja ada faktor kolusi antara bank penerima KLBI dan fihak BI!!). Kasus ambruknya Bank Suma[6] dan kasus Golden Key (kasus Edi Tansil)[7] menunjukan lemahnya otoritas BI dalam mengontrol praktek bank2 di Indonesia. Pakto 88 memungkinkan peningkatan alokasi investasi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi, tapi akhirnya karena lemahnya kontrol BI (karena kuatnya pengaruh politik pemilik bank atau adanya kolusi antara pemilik bank dan aparat BI) atas kinerja bank2 di Indonesia, maka liberalisasi perbankan menjadi "boomerang" yang melukai sektor moneter Indonesia, sehingga IMF perlu

3.turun tangan membantu menyembuhkannya. Dalam mengatasi masalah "sektor perbankan yang tidak sehat[8]" BI sejak Desember 1997 hingga awal April 1998 malah mencetak uang untuk memberikan kredit sebanyak Rp. 80 triliun,-kepada bank2 yang bermasalah; selanjutnya Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dibentuk pada bulan Pebruari 1998 menyatakan bahwa masih dibutuhkan kira2 Rp. 50 triliun lagi untuk mengatasi masalah perbankan. Tentu saja tindakan tersebut meningkatkan jumlah uang beredar yang akhirnya menaikan laju inflasi. Tragisnya, praktek2 kolusi antara BI, bank2 negara dan para konglomerat (baik bank2 dan group perusahaan2) menyebabkan meningkatnya peredaran uang yang berakibat kenaikan harga yang harus dipikul oleh semua penduduk Indonesia.

4Meningkatnya pembayaran cicilan dan bunga hutang luar negeri pihak swasta yang jatuh tempo. Sejak awal tahun 90an sektor real estate di Indonesia mengalami jaman keemasan, yang ditandai dengan proyek2 kompleks perumahan, perkantoran, bungalow, lapangan golf yang tumbuh menjamur. Corak pembangunan yang sedemikian tidak saja berdampak negatif thdp kelestarian ingkungan dan menimbulkan ketegangan2 sosial (akibat penggusuran2) tapi juga menelan banyak kredit investasi (diperkirakan tidak kurang dari 40% total kredit dialokasikan ke sektor real estate). Sebagaimana lazimnya, kredit di sektor ini di salurkan dalam waktu singkat dengan nilai yang tinggi tetapi pengembaliannya sedikit demi sedikit dalam jangka waktu yang panjang. Sejak tahun yang lalu terdapat kelebihan pengadaan real estate sehingga banyak yang tidak laku dijual; akibatnya banyak perusahaan pemborong bangunan yang rugi dan tidak bisa mengembalikan kredit pinjaman mereka. Pengusaha swasta yang bergerak disektor ini bersama pengusaha dari sektor lainnya sejak tahun tahun terakhir mengambil kredit diluar negeri yang dinyatakan dalam AS$. Perusahaan2 asing banyak yang berkolusi dengan memanfaatkan posisi monopoli mitra usaha di Indonesia dan memberikan pinjaman kredit tanpa mengindahkan kaidah2 perbankan. Selama ini departemen keuangan ataupun BI tidak mewajibkan siapapun untuk melapor jika ia mengadakan pinjaman luar negeri. Alhasil BI tidak mengetahui berapa tambahan permintaan pihak swasta akan AS$ untuk membayar bunga dan cicilan hutang luar negeri mereka yang sudah jatuh tempo pada paruh kedua tahun 1997[10]. Berdasarkan indikasi2 yang menunjukkan memburuknya situasi moneter di Indonesia pada pertengahan 1997, maka banyak hutang luar negeri swasta yang jatuh temponya dipercepat oleh pihak luar negeri. Hal ini memaksa pihak swasta yang berhutang untuk memburu AS$ untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang luar negeri mereka. Hutang swasta menurut pengumuman BI tanggal 15 April 1998 mencapai AS$ 80,2 milyard (sama dengan 129% dari total pendapatan nasional) dan AS$ 7,4 milyard merupakan pinjaman dalam bentuk surat hutang jangka pendek. Hasil kesepakatan pemerintah RI dengan IMF serta negara2 pemberi kredit memungkinkan pihak swasta Indonesia menunda pembayaran hutang mereka dan mendapatkan fasilitas kemudahan devisa untuk membayar hutang2 mereka. Selain itu mereka akan menjual surat berharga yang memungkinkan kreditor untuk membelinya.

5.Ketidak pastian akan stabilitas politik saat ini dan masa datang. Pada akhir Oktober 1997 Presiden RI bertolak ke Kuala Lumpur untuk menghadiri koferensi G15. Pada 18 s/d 29 November 1997 Presiden RI mengadakan kunjungan kerja internasional dengan mengadakan perlawatan ke Afrika selatan, Kanada (menghadiri konferensi AP EC 24-25 November) banyak negara dan juga pada 27-28 November ke Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Perlawatan2 itu sangat melelahkan dan menyita banyak energi; pada 5 Desember 1997 Menteri Moerdiono mengumumkan bahwa sejak 5 hingga 15 Desember 1997 Presiden akan cuti sakit sehingga Presiden harus beristirahat selama 10 hari. Kunjungan Presiden Suharto ke Solo untuk mengunjungi makam almarhumah ibu Tin Suharto dan kunjungan ke Teheran untuk menghadiri sidang OKI di batalkan. Kunjungan ke Kuala Lumpur dalam rangka sidang tahunan ASEAN juga dibatalkan sekalipun pada 12 Desember menteri Moerdiono menegaskan bahwa Presiden akan menghadiri sidang tahunan ASEAN di Kuala Lumpur tsb. Kabar mengenai memburuknya kesehatan Presiden RI memperkuat dorongan para spekulan untuk memborong AS$ sehingga Rupiah terus merosot tajam; sejak 1 harga dolar AS naik terus hingga mencapai Rp. 6000,- atau turun 45% pada 17 November 1997. Tampilnya wajah Presiden Suharto di layar TV ketika beliau mewisuda perwira2 AKABRI pada 18 Desember 1997 di Bina Graha dan ketika Presiden mengundang segenap konglomerat pada 22 Desember sempat memperlambat turunnya nilai Rupiah tetapi tidak

bisa mengembalikan posisi Kurs Rp-AS$ ke posisi 1 November 1997. Pada 30 Desember 1997 PTUN memutuskan penundaan penutupan bank Jakarta (milik Probosutedjo, dengan anggota komisarisnya Dr. Didiek Rachbini, pengurus ICMI). Pemerintah RI sempat merencanakan untuk menerapkan CBS yang sebenarnya justru melanggar ketentuan IMF no.22 yang tertera dalam letter of intent yang telah ditanda tangani Presiden Suharto 15 Jan. 1998. Naiknya harga AS$ sebesar hampir 80% selama presiden Suharto dinyatakan sakit, dan ketidak jelasan tentang suksesi politik menandakan kekhawatiran sektor business terhadap kestabilan politik dan ekonomi saat ini dan masa datang. Akibatnya banyak investor (asing maupun dalam negeri) yang mengamankan/melarikan modalnya dalam bentuk AS$11.

VI. Faktor eksternal pemicu krismon di Indonesia.

Sejak akhir tahun 1996 ketika presiden AS Bill Clinton terpilih untuk kedua kalinya, ekonomi AS terus membaik (pertumbuhan ekonomi secara konstant yang relatif tinggi, tingkat inflasi yang rendah, tingkat pengangguran yang relatif rendah dibanding negara industri lainnya). Selain itu negara2 industri lainnya (negara2 EU & Jepang) sedang menjalankan politik konjungtur dengan menetapkan tingkat bunga rendah untuk mendorong investasi dan peningkatan lapangan kerja. Perkembangan2 tsb. ditambah dengan dugaan bahwa Alan Greenspan, gubernur Fed Res Bank (bank sentral AS) akan meningkatkan suku bunga utama AS, mendorong naiknya nilai AS$ di pasaran valuta asing (valas) dunia. Nilai DM Jerman dalam AS$ yang terkenal stabilpun sejak awal Januari hingga 6 Agustus 1997 turun sampai 22%. Kecenderungan yang semacam terlihat pada nilai mata uang negara2 industri lainnya (tapi cadangan devisa mereka memadai). Thailand, Philipina & Malaysia yang cadangan devisanya rendah (karena tingginya defisit dalam "neraca tahun yang berjalan" mereka) mengalami serangan2 para spekulan di negara2 yang bersangkutan yang memburu AS$ dan melepas Baht, Peso & Ringgit yang sebelumnya mereka tahan, akibatnya harga AS$ di negara2 tsb. naik dengan pesat. Demikian juga nilai kurs saham di negara2 ini turun drastis karena sebagian besar fund manager peserta pasar modal menjual saham2/kertas berharga dan menukarkan uang hasil penjualan tsb. dengan AS$ dipasar valas. Perkembangan ini memperkuat dorongan terhadap pemilik tabungan dalam Rupiah di I ndonesia untuk membeli AS$ dengan harapan bahwa nilai AS$ mereka akan terus meningkat pesat. Berbeda dengan di Indonesia, pemerintah di Thailand menutup lebih dari separuh bank yang ada dan lebih dari itu, tidak hanya menteri keuangannya yang mengundurkan diri tetapi juga perdana menterinya. Saat ini Thailand tengah menjalani kepulihan ekonominya dan ditahun mendatang para ahli meramalkan bahwa Thailand akan kembali mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Selama ini negara2 Asia lainnya (China, India, Vietnam, Burma, Pakistan dan Banglades) menjalankan reform ekonomi untuk menarik modal asing dan juga ekspor negara2 tersebut terus meningkat sehingga terjadi persaingan dalam usaha menarik modal asing serta dalam merebut pasaran dunia. Hal ini menyulitkan pengumpulan devisa negara2 Asia Tenggara seperti Thailand, Philipina dan Malaysia termasuk Indonesia sehingga awal Juli 1997 nilai Baht di Thailand didevaluasi sebesar 20% terhadap nilai dolar AS dan beberapa hari kemudian nilai disusul oleh jatuhnya nilai Ringgit dan Pesos terhadap dolar AS. Secara bersamaan faktor2 internal maupun eksternal tersebut meyebabkan menipisnya cadangan devisa di Indonesia sehingga harga dolar meningkat drastis dan menimbulkan krisis moneter yang mengantar masyarakat Indonesia ke jurang resesi ekonomi yang berkepanjangan.

dekade 80-an atas inisiatif Presiden RI terjadilah reform dan alih generasi di organisasi ABRI yang mengakibatkan meningkatnya ketergantungan ABRI pada Presiden. Sejak itu kaum pemilik modal tidak lagi didominasi oleh perwira militer tetapi oleh para pengusaha-pengusaha dan kerabat Presiden yang mendapat lisens monopoli/oligopoli Presiden

VII. Kesimpulan.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat selama masa orba dijalankan bersamaan dengan proses pembentukan kelompok2 pemilik modal yang pada awalnya didominasi oleh pihak militer (dekade 70an) dan sejak awal dekade 80an hingga kini di dominasi oleh konglomerat dan kerabat Presiden RI. Proses pembentukan itu tidak berdasar atas prinsip kewira swastaan/entreprenership tapi lebih pada hubungan patron-client sehingga mekanisme kontrol untuk menjamin efisiensi ekonomi serta akumulasi modal jangka panjang tidak berkembang. Ketidak efisiensian itu ditandai oleh posisi2 monopoli didalam negeri yang tidak diikuti oleh pengembangan daya saing industri dipasaran internasional sehingga mengakibatkan pemborosan devisa (AS$) melalui peningkatan impor kapital (hutang LN dalam bentuk AS$), impor barang dan jasa2 yang melampaui keseluruhan jumlah eksport . Proses itu berjalan sekian lama dan berhasil mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia (yang berakibat kerusakan2 lingkungan hidup) serta mendapat dukungan pihak luar negeri baik swasta maupun pemerintah serta organisasi2 ekonomi internasional (penjualan perlengkapan2 militer dan pemberian kredit dalam bentuk "hard currency"). Sistim ekonomi yang sedemikian sangat rawan terhadap gejolak ekonomi eksternal ("external shock") sehingga dengan adanya krismon di negara2 tetangga maka ekonomi Indonesia dengan sendirinya cepat dilanda resesi yang menyulitkan masyarakat dan menimbulkan keresahan2 sosial. Menjawab gejolak sosial, pemerintah menerapkan methode "politik keamanan". Dalam hal ini Presiden RI mempunyai pengalaman yang matang dibidang militer dan berhasil mengendalikan dan mereform organisasi ABRI sehingga sampai sekarang dukungan dari pihak militer berhasil menghindari reform dibidang politik. Bahkan memburuknya resesi ekonomi bisa ditolerir demi mempertahankan tatanan orde baru. Nampaknya hanya memburuknya kesehatan Presiden RI yang dapat mengancam tatanan politik orde baru.

Pulihnya sistim moneter di Indonesia dalam jangka pendek ini sangat tergantung dari kemauan politik Presiden Suharto untuk menjamin pengadaan bahan pangan sehingga inflasi dapat ditekan, menegakkan wibawa BI dalam mengendalikan stabilitas moneter dan memulihkan kembali kepercayaan investor dalam dan luar negeri sehingga proses produksi bisa kembali normal. Syarat yang penting untuk itu adalah mekanisme suksesi yang tranparans melalui proses "peaceful transition"(meminjam istilah pemerintah AS 2 tahun lalu tentang suksesi di Indonesia) sehingga stabilitas politik dapat menunjang pulihnya ekonomi dan meredam keresahan dalam masyarakat Indonesia. Perbaikan sistem masa pasca Orde Baru juga sangat tergantung pada kuatnya peran kekuatan sospol atau elit politik pro-Demokrasi, atau komponen2 dari masyarakat madani yang dapat memaksakan dijalankannya transparansi dalam sektor ekonomi dan sektor birokrasi negara termasuk pembangunan lembaga peradilan yang independen. Kecil kemungkinan pemerintah RI akan melaksanakan kesepakatannya yang ke 3 (supplementary memorandum) dengan IMF karena melaksanakan program IMF berarti melanggar kepentingan2 ekonomi dan politik kerabat Presiden RI. Kesimpulan terakhir adalah bahwasanya ada atau tidaknya rescue package IMF&WB yang bernilai AS$ 43 milyard,- itu, secara signifikan, tidak akan banyak merubah nasib rakyat kecil yang tetap merupakan sebagian besar dari penduduk Indonesia. Sekian! Berlin 20 April 1998. ❑

Artikel ini merupakan sebuah pengantar dalam diskusi di Forum Masyarakat Indonesia di Jerman Cologne 18 April 1998

❍ Agenda Reformasi ❍

Program Pembangunan Kekuatan Rakyat Menuju Demokrasi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya

Secara politik terdapat kebebasan mengadakan pendidikan politik untuk mendorong terbentuknya wadah-wadah politik rakyat di segala sektor, yang akan membuka pengawasan rakyat yang sadar politik terhadap semua kebijakan pemerintahan. Hanya dengan demikianlah maka akan mampu menjawab kebutuhan kesejahteraan rakyat dan tuntutan guna melaju ke tahap perwujudan sebuah Pemerintahan Koalisi Demokratik.

Tanpa tawar menawar lagi, tugas pertama dan utama bagi semua kalangan massa rakyat di Indonesia sekarang ini adalah bersama-sama menurunkan Soeharto dengan cara melibatkan massa rakyat yang dipimpin oleh kaum oposisi patriotik. Soeharto sekeluarga adalah akar masalah yang ada di Indonesia sekarang ini. Setelah itu harus segera dilakukan konsolidasi nasional seluruh kekuatan massa rakyat. Dengan hasil gemilang tugas tersebut telah dilaksanakan, meski tidak sedikit biaya ekonomi politik dan sosial yang harus ditanggung oleh rakyat. Namun dengan turunnya Soeharto bukan berarti agenda menuntut reformasi total dan demokrasi sejati.

Untuk mengkonsolidasikan kekuatan rakyat dan menegakkan demokrasi yang sejati di Indonesia, maka yang pertama-tama harus dilindungi adalah hak-hak dasar rakyat secara penuh. Rakyat harus tahu situasi/kondisi ekonomi-politik, memiliki pengetahuan, ketrampilan dan memiliki alat-alat perjuangannya, agar mampu menentukan, mengangkat, serta berjuang membela kepentingan-kepentingannya. Hal di atas hanya dapat diwujudkan melalui organisasi-organisasi rakyat yang bebas. Dengan demikian, secara bersama-sama rakyat akan memperkuat dirinya untuk menegakkan kepentingan-kepentingan mereka. Hanya sebuah tatanan politik yang demokratislah yang akan menjamin terkonsolidasinya kekuatan rakyat.

Tatanan demokratis ini hanya bisa diinstitusikan melalui sebuah Pemerintahan Koalisi Demokratik yang memiliki karakter : *pertama* merupakan sebuah koalisi kelas, sektor, dan kelompok masyarakat yang ada di Indonesia yang secara konsisten berjuang untuk demokrasi dan keadilan sosial, yang akan tunduk pada prinsip-prinsip pluralisme-demokratik, dengan tetap mempertahankan komitmen sepenuhnya untuk membela rakyat. *Kedua* merupakan perwakilan rakyat yang sejati dari tingkatan desa hingga tingkatan nasional, merupakan perwakilan yang dipercayai oleh rakyat, yang akan mengangkat dan membela kepentingan-kepentingan rakyat dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. *Ketiga* akan mempraktekkan proses penentuan kebijakannya secara terbuka, partisipatif dan demokratik. *Keempat* akan menghormati otonomi organisasi-organisasi politik rakyat dan organisasi lainnya serta menjalankan kerjasama dengan mereka dalam pembangunan ekonomi, politik dan budaya rakyat yang ilmiah, demokratis dan pro-rakyat. *Kelima* akan bertanggung jawab secara terbuka kepada rakyat melalui parlemen. *Keenam* akan membangun segala fungsi bela negara yang ada dalam masyarakat, dan bukan merupakan kekuatan bersenjata reguler yang terpisah dari rakyat. *Ketujuh* Menghormati hak-hak asasi manusia, hak menentukan nasib sendiri rakyat Maubere, dan akan turut menentang watak kolonial yang telah menyebabkan terjadinya penghisapan/penindasan ekonomi-politik terhadap Rakyat Aceh dan Rakyat Papua. *Kedelapan* menghapuskan Dwi-fungsi ABRI dan Paket 5 UU Politik. Dan *terakhir* menjalankan fungsi sistim peradilan internasional yang independen dan terbuka untuk penyelesaikan tuntutan rakyat Indonesia yang telah dilanggar hak-haknya.

Dengan karakter di atas, maka sebuah Pemerintahan Koalisi dituntut untuk menjalankan kebijakan pembangunan ekonomi yang merupakan pembalikan dari model pembangunan rejim Orde Baru dan akan melapangkan jalan bagi sebuah Pemerintahan Koalisi Demokratik.

Hal tersebut harus dilaksanakan dengan mengontrol sumber daya alam, menentukan program dan kebijaksanaan ekonomi yang bebas dari dominasi monopoli Internasional dan manipulasi modal monopoli domestik.

Secara politik terdapat kebebasan mengadakan pendidikan politik untuk mendorong terbentuknya wadah-wadah politik rakyat di segala sektor; yang akan membuka pengawasan rakyat yang sadar politik terhadap semua kebijakan pemerintahan.

Hanya dengan demikianlah maka akan mampu menjawab kebutuhan kesejahteraan rakyat dan tuntutan guna melaju ke tahap perwujudan sebuah Pemerintahan Koalisi Demokratik.

Program Ekonomi yang Harus Dijalankan

Program ekonomi yang harus dijalankan adalah program yang berlandaskan pada ekonomi dan kesejahteraan rakyat yaitu *satu* pembangunan industri dan pertanian yang akan mengarah pada pencapaian alih teknologi sebesar-besarnya dan produktifitas secara maksimal.

Dua pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan diarahkan untuk memperbaiki kapasitas seluruh produksi guna mendorong mekanisme kolektif di kalangan rakyat untuk meningkatkan produktifitas perekonomian rakyat.

Tiga mendukung sektor swasta yang memberikan sumbangan positif bagi pengembangan kapasitas produksi dan sumber daya.

Dan *empat* mendorong Reformasi Agraria untuk menciptakan sistim pertanahan dan pertanian kooperatif-modern di pedesaan.

Rakyat Pekerja

1. Penyediaan kesempatan kerja bagi seluruh rakyat, yakni dalam pekerjaan yang bermartabat, memenuhi kebutuhan bagi kesejahteraan rakyat pekerja dan masyarakat.
2. Perlakuan secara adil bagi rakyat pekerja dan perlindungan dari penghisapan/penindasan kerja.
3. Hak rakyat pekerja untuk berpartisipasi dalam kebijakan-kebijakan yang menyangkut rakyat pekerja dan masyarakat melalui wadah-wadah politik rakyat dari nasional sampai unit kerja.

Arifa'i

4. Pemilikan tanah bagi penggarap dan membantu peningkatan produktifitasnya melalui peningkatan keahlian dan teknologi yang mampu menyerap tenaga kerja.

Pemerataan Ekonomi dan Kelestarian Alam

1. Memprioritaskan pembangunan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat pekerja dan masyarakat secara adil sesuai dengan hak-hak dasar ekonominya, serta setara dengan kemampuan kerjanya.
2. Warga masyarakat yang tidak mampu, tidak layak bekerja, sedang menjalani studi bagi kepentingan masyarakat, serta anak-anak berhak memperoleh hak-hak dasar ekonominya dengan selayaknya.
3. Tersedianya jasa pelayanan sosial secara memadai dan terdistribusi secara efektif kepada seluruh masyarakat.
4. Penggunaan sumber daya alam secara bertanggungjawab dan dilindungi dari pengrusakan.

Dengan melaksanakan program-program diatas, maka sebuah pemerintahan Koalisi Demokratik akan mampu memenuhi hak-hak rakyat di bawah ini :

Hak Rakyat dalam Bidang Politik

Hak rakyat dalam bidang politik yakni;

a) Seluruh warga negara memiliki kebebasan berbicara, kebebasan pers, mengorganisir diri, melakukan rapat-rapat umum dan pemogokan.
b) Seluruh warga negara memiliki persamaan di depan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial/ekonomi, suku, agama dan keyakinan politiknya.
c) Seluruh warga negara berhak mengorganisasi diri untuk melawan setiap struktur dan sistim yang menghisap/menindas.
d) Kebebasan akademis bagi seluruh anggota komunitas akademis harus dilindungi oleh negara. Negara harus mendukung iklim yang memungkinkan terjaminnya kebebasan akademis.
e) Hak menentukan nasib sendiri bagi Rakyat Maubere melalui referendum di bawah pengawasan PBB.
f) Membuka dialog dengan perwakilan yang dipilih oleh Rakyat Aceh dan Rakyat Papua guna melindungi hak-haknya.

Hak Rakyat dalam Bidang Ekonomi

Untuk hak rakyat dalam bidang ekonomi meliputi

a) Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang bermartabat. Tidak boleh seorangpun diingkari hak-haknya untuk mendapatkan perkerjaan yang bermartabat, tanpa diskriminasi jenis kelamin status sosial/ekonomi, suku-bangsa, agama, keyakinan politik dan bentuk diskriminasi sosial lainnnya. Adalah kewajiban negara untuk menyediakan kesempatan kerja bagi seluruh warga negara dan menjamin kondisi-kondisi kerja yang manusiawi.
b) Setiap rakyat pekerja memiliki hak yang dijamin negara untuk beristirahat dan memperoleh waktu senggang setelah berkerja melalui pembatasan jam kerja, liburan berkala dengan tetap memperoleh pembayaran upah dan pembayaran upah yang berlipat untuk pekerjaan yang dilakukan pada hari libur umum.
c) Negara dan para pengusaha harus menjamin hak-hak rakyat pekerja untuk memperoleh jaminan sosial yang akan

d) melindungi kehidupan ekonomi warga negara yang berusia lanjut, cacat, para pengangguran struktural serta menyediakan pelayanan kesehatan rakyat. Negara dan para pengusaha harus menjamin dan bertanggung jawab terhadap cedera dan kematian yang disebabkan oleh kerja.

e) Negara harus mengakui dan melindungi hak mereka yang menggarap tanah untuk memilikinya dan memperoleh hasil serta manfaat dari kerja yang mereka lakukan. Negara harus menjamin distribusi tanah kepada penggarap, alat-alat kerja modern yang mendukung produktifitas dan hak untuk membentuk pertanian kolektif/kooperasi.

f) Negara harus mengakui dan melindungi hak-hak yang diberikan secara prioritas kepada rakyat nelayan agar bisa meningkatkan produktifitas melalui peningkatan keahlian dan teknologi modern dan tetap menjaga pemanfaatan sumber daya laut dan air tawar yang secara ekologi bertanggung jawab.

g) Seluruh warga negara berhak mendapatkan jaminan pelayanan sosial dan kebutuhan dasar dari negara.

h) Kaum ibu mendapatkan perlindungan khusus dari negara selama masa kehamilan dan perawatan anak, termasuk jaminan pembayaran upah selama cuti hamil, saat sebelum dan sesudah kelahiran, perawatan, pengobatan, dan wisma ibu/anak.

i) Anak-anak harus mendapatkan perawatan yang memadai, serta dilindungi dari perlakuan kejam dan eksploitasi ekonomi. Dijaminnya sistim perawatan umum bagi anak-anak. Harus dikeluarkan perundangan maupun peraturan oleh negara untuk mencegah penggunaan buruh anak-anak. Negara harus menjamin adanya program yang memadai bagi panti-panti asuhan dan perawatan anak-anak tuna wisma. Harus juga disediakan program gizi dan kesehatan bagi anak-anak oleh negara.

j) Orang-orang cacat memperoleh jaminan yang memungkinkan mereka terlibat dalam aktifitas produktif dan terbebas dari ketergantungan ekonomi.

k) Negera harus menyediakan pelayanan kesehatan dengan teknologi modern dan murah.

l) Negara menyediakan alat-alat transportasi modern dan murah, serta juga membatasi jam (waktu) penggunaan kendaraan-kendaraan pribadi.

Hak Rakyat dalam Bidang Sosial-Budaya

Sedangkan hak-hak rakyat dalam bidang sosial-budaya adalah:

a) Setiap warga negara berhak untuk menganut agama dan keyakinannya masing-masing sehingga memperoleh perlindungan negara dari diskriminasi. Harus ada pemisahan antara agama dan negara.

b) Negara harus menyediakan anggaran untuk sarana-sarana ibadah yang bisa mendorong proses toleransi antar agama.

c) Kaum perempuan harus dilindungi dari segala diskriminasi, pemerkosaan hak-hak, dan pelecehan seksual. Negara harus bekerja untuk menghapuskan diskriminasi dan pemerosotan hak-hak kaum perempuan.

d) Setiap warga negara berhak berekspresi secara artistis. Negara harus melindungi dan mengangkat kebudayaan rakyat yang ilmiah dan demokratis, serta mendorong kaum seniman untuk mengembangkan karya-karya mereka dan membebaskannya dari eksploitasi ekonomi.

e) Setiap warga negara berhak memperoleh lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan aman. Setiap warga negara berhak untuk menikmati keindahan alam. Negara harus menjamin perlindungan alam dari pengrusakan dan penghancuran yang ceroboh. Negara menjamin tersedianya taman-taman yang disediakan untuk umum dan cagar alam yang nyaman untuk menjaga keseimbangan ekologis.

f) Negara harus menjamin kondisi-kondisi kebudayaan dan sosial yang baik bagi anak-anak. Terjaminnya media massa dan program-program pendidikan yang akan mengangkat nilai-nilai kritis-ilmiah, demokratis, murah dan pro-rakyat serta berguna bagi kondisi-kondisi di atas.

g) Tersedianya taman-taman bermain umum bagi anak-anak, sistim perawatan anak, dan kelengkapan lainnya bagi aktifitas sosial dan kebudayaan anak-anak.

h) Mereka yang dinyatakan bersalah harus menjalani proses yang menjamin hak-hak para tertuduh, seperti asas praduga tak bersalah dan pengadilan yang jujur serta dapat menemukan akar penyebab suatu kejahatan. Hukuman yang dijatuhkan harus diarahkan guna membawa pembaharuan dan integrasi kembali ke dalam masyarakat. Seluruh hukuman yang tidak manusiawi dan bersifat kejam harus dilarang dan dihapuskan.

i) Seluruh warga negara memiliki hak untuk mendapatkan jaminan keselamatan dirinya maupun tempat tinggalnya. Mereka harus diselamatkan dari penangkapan yang sewenang-wenang, eksekusi-eksekusi yang tidak berdasarkan hukum, penyiksaan dan pengerahan sebagai tenaga kerja secara sewenang-wenang dan tindakan kejam lainnya.

j) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan ilmiah, demokratis dan pro-rakyat, yang harus dijamin oleh negara semenjak tingkat dasar hingga tingkat tinggi.

k) Rakyat-rakyat minoritas suku anak dalam harus dilindungi haknya untuk mengembangkan kebudayaan rakyat yang ilmiah dan demokratis tanpa dihambat oleh pengembangan bahasa dan bentuk-bentuk penulisannya, namun tidak berada dalam sekolah yang terpisah.

l) Negara harus menjamin sarana rehabilitasi dan pekerjaan bagi pecandu narkotika dan wanita tuna susila (WTS).

m) Negara harus menghormati dan mengakui hak-hak azasi kaum homoseksual dan transseksual. ❑

Untuk mengkonsolidasikan kekuatan rakyat dan menegakkan demokrasi yang sejati di Indonesia, maka yang pertama-tama harus dilindungi adalah hak-hak dasar rakyat secara penuh. Rakyat harus tahu situasi/kondisi ekonomi-politik, memiliki pengetahuan, ketrampilan dan memiliki alat-alat perjuangannya, agar mampu menentukan, mengangkat, serta berjuang membela kepentingan-kepentingannya.

George J. Aditjondro

YAYASAN-YAYASAN SOEHARTO

CAKUPAN, DAMPAK, DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Yayasan-yayasan yang diketuai anak, menantu, serta keluarga besan Soeharto, selain merupakan alat bisnis keluarga Soeharto, sekaligus menunjang politik luar negeri Soeharto

BERAPA sebenarnya kekayaan keluarga Soeharto dari yayasan-yayasan yang didirikan dan dipimpin Soeharto dan keluarganya, dari saham yayasan-yayasan itu dalam berbagai konglomerat di Indonesia dan di luar negeri? Pertanyaan ini sangat sulit dijawab oleh "orang luar". Kesulitan melacak kekayaan semua yayasan itu diperparah oleh tumpang-tindihnya kekayaan keluarga Soeharto dengan kekayaan sejumlah keluarga bisnis yang lain, misalnya tiga keluarga Liem Sioe Liong, keluarga Eka Tjipta Widjaya, dan keluarga Bob Hasan.

Tapi jangan difikir bahwa keluarga Soeharto hanya senang menggunakan pengusaha-pengusaha keturunan Cina sebagai operator bisnisnya. Sebab bisnis keluarga Soeharto juga sangat tumpang tindih dengan bisnis dua keluarga keturunan Arab, yakni Bakrie dan Habibie. Keluarga Bakrie sangat beragam kongsinya dengan keluarga Soeharto, a.l. dengan Bambang dan Sudwikatmono dalam bisnis minyak mentah Pertamina lewat Hong Kong (Pura, 1986; Toohey, 1990: 8-9; Warta Ekonomi, 30 Sept. 1996: 39-40), dengan Bambang dalam perkebunan karet di Sumatra (IEFR, 1997: 4), dengan Sudwikatmono dalam Bank Nusantara International (Toohey, 1990: 8); dengan Nusamba di PT Freeport Indonesia (Borsuk and Solomon, 1997), dengan Titiek Prabowo dalam proyek PLTU Tanjung Jati A (Gatra, 4 Nov 1995: 29), dan dengan Tommy dalam bisnis eceran Goro dan Gelael (Warta Ekonomi, 4 April 1994: 29-30, 5 Juni 1995: 64-65; Gatra, 8 Juli 1995; D & R, 10 Mei 1997: 92; Tiras, 2 Juni 1997: 31-33). Akhirnya, kekayaan keluarga Suharto bertumpang-tindih pula dengan kekayaan keluarga Habibie, yang berkongsi dengan Tommy dan Bambang dalam berbagai bisnis mereka di Pulau Batam, termasuk ekspor babi hidup ke Singapura, dan dengan Tutut dalam bisnis telekomunikasi dan pemetaan udara (Wibisono, 1995).

Enam kelompok

Betapapun susahnya, marilah kita coba melacak kekayaan yayasan-yayasan Soeharto. Untuk mempermudah usaha ini, saya bagi yayasan-yayasan itu dalam enam kelompok. *Pertama*, yayasan-yayasan yang diketuai Soeharto sendiri. *Kedua*, yayasan-yayasan yang diketuai Nyonya Tien Soeharto di masa hidupnya. *Ketiga*, yayasan-yayasan yang diketuai Soeharto secara tidak langsung lewat Habibie dan Bob Hasan. *Keempat*, yayasan-yayasan yang diketuai para anak dan menantu Soeharto. *Kelima*, yayasan-yayasan yang diketuai atau dikelola para besan Soeharto beserta anak serta sanak-saudara mereka. Dan *keenam*, yayasan-yayasan yang diketuai atau dikelola sanak-saudara Soeharto dan Nyonya Tien Soeharto dari kampung halaman mereka di Yogyakarta dan Surakarta.

Dalam *kelompok pertama* dapat dihimpun nama dua belas yayasan, yakni (1) Yayasan Supersemar; (2) Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais); (3) Yayasan Dana Abadi Karya Bakti (Dakab); (4) Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila; (5) Yayasan Serangan Umum 1 Maret; (6) Yayasan Bantuan Beasiswa Jatim Piatu Tri Komando Rakyat, disingkat Yayasan Trikora; (7) Yayasan Dwikora; (8) Yayasan Seroja; (9) Yayasan Nusantara Indah; (10) Yayasan Dharma Kusuma; (11) Yayasan Purna Bhakti Pertiwi; dan (12) Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Vatikiotis, 1990: 63; Pangaribuan, 1995: 60-61, 70; Sinar Harapan, 16 Juni 1985; Warta Ekonomi, 29 Okt. 1990: 26-29; Gatra, 27 Jan. 1996).

Dalam *kelompok kedua* termasuk (13) Yayasan Harapan Kita; (14) Yayasan Kartika Chandra; (15) Yayasan Kartika Djaja; dan (16) Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan (Gitosardjono, 1974; Robison, 1990: 343-345; Warta Ekonomi, 29 Okt. 1990: 27; Forum Keadilan, 23 Juni 1994: 36). Dalam *kelompok ketiga* termasuk yayasan-yayasan yang kini dikuasai secara tidak langsung oleh Soeharto lewat Bob Hasan sebagai presiden komisaris PT Astra International, Inc., yakni (17) Toyota Astra Foundation, (18) Yayasan Astra Dharma Bhakti, (19) Yayasan Dana Bantuan Astra, dan (20) Yayasan Dharma Satya Nusantara (Shin, 1989: 346). Sedangkan lewat B.J. Habibie sebagai Ketua Umum ICMI, Soeharto menguasai (21) Yayasan Abdi Bangsa, pemilik PT Abdi Bangsa yang menerbitkan harian Republika dan majalah Ummat , serta Yayasan Amal Abadi Beasiswa Orangtua Bimbing Terpadu (ORBIT) yang diketuai oleh Nyonya Habibie (Forum Keadilan, 1 Januari 1996: 107).

Kelompok keempat dapat dibagi dalam lima sub-kelompok. Sub-kelompok pertama adalah yayasan-yayasan yang diketuai atau didominasi oleh Tutut, yakni (22) Yayasan Tiara Indonesia, (23) Yayasan Dharma Setia, dan (24) sebuah ayasan pendidikan tinggi di Dili (InfoBisnis, Juni 1994: 13; Republika, 20 April 1995; Matebean, 12 Jan. 1998), (25) Yayasan TVRI, serta (26) Yayasan Tri Guna Bhakti. Lalu, sub-kelompok kedua adalah yayasan-yayasan yang dipimpin oleh Bambang Trihatmodjo atau isterinya, Halimah, yakni (27) Yayasan Bhakti Nusantara Indah, alias Yayasan Tiara Putra, yang dipimpin Tutut bersama Halimah (Indonesian Business Weekly, 25 Nov. 1994), serta (28) Yayasan Bimantara dan (29) Yayasan Bhakti Putra Bangsa yang diketuai Bambang sendiri.

Selanjutnya, sub-kelompok ketiga adalah yayasan-yayasan yang dipimpin atau didominasi oleh Tommy, yakni (30) Yayasan Tirasa, (31) Yayasan Bhakti Putra Bangsa, yang kerjanya mengurus pertandingan-pertandingan golf, serta (32) Yayasan IMI (Ikatan Motoris Indonesia) Lampung.

Sub-kelompok keempat adalah yayasan-yayasan yang dipimpin atau didominasi oleh Titiek Prabowo atau suaminya, Letnan Jenderal Prabowo Subianto, yang terdiri dari (33) Yayasan Badan Intelejen ABRI (BIA), yang dikuasai Prabowo bersama teman dekatnya, Mayor Jenderal Jacky Anwar Makarim, yang ikut mengelola sistem perparkiran di Jakarta (Gatra, 4 Februari 1995); (34) Yayasan Kobame (Korps Baret Merah), pemegang saham PT Kobame; (35) Yayasan Veteran Integrasi Timor Timur; (36) Yayasan Hati, yang dibentuk sejumlah "partisan" (orang- orang Timor

Leste dan Timor Barat) yang membantu Kopassus merebut Timor Leste di tahun 1975-1976; serta (37) Yayasan Kerajinan Indonesia dan (38) yayasan pencari dana KONI, yang diketuai Titiek Prabowo (Asiaweek, 12 April 1996: 39).

Sub-kelompok kelima adalah yayasan-yayasan yang dipimpin atau dikelola Siti Hutami Endang Adiningsih alias Mamiek Suharto, yang terdiri dari (39) yayasan pemilik obyek wisata Taman Buah Mekarsari (TMB) seluas 260 hektar di sepanjang koridor Cibubur-Cianjur dan (40) Yayasan Bunga Nusantara, yang didukung oleh Nyonya Christine Arifin, isteri bekas Kabulog Bustanil Arifin yang masih kerabat Nyonya Tien Suharto, pengelola Taman Bunga Nusantara (TBN) seluas 35 hektar di Kabupaten Cianjur (Tiras, 23 Nov. 1995: 15-16; Swa, 13-27 Maret 1997: 99).

Yayasan Tri Guna Bhakti, didirikan awal 1996, oleh sejumlah ulama NU yang berhasil dirangkul oleh Tutut dan teman dekatnya, Jenderal Hartono. Ketua yayasan ini adalah Drs KH Abd. Wahid Zaini, S.H. pimpinan pondok pesantren Nurul Jadid di Paiton, Probolinggo, yang masih keluarga jauh Hartono. Jenderal Hartono sendiri menjadi pelindung, sedangkan Tutut menjadi pembina yayasan ini (Tiras, 28 Maret 1996: 73). Sudah dapat diperkirakan bahwa yayasan ini sekaligus berfungsi untuk menetralisasi suara-suara tidak puas terhadap pembebasan tanah serta polusi PLTU Paiton I yang sedang dibangun Hashim Djojohadikusumo di daerah Paiton. Yang jelas, ketua mertua Tutut meninggal dunia, yayasan ini ikut memasang iklan dukacita yang cukup menonjol di harian Jawa Pos, 7 Maret 1996.

Yayasan TVRI, walaupun resminya selalu diketuai oleh Menpen, namun secara praktis dikuasai oleh Tutut bersama Bambang. Tutut menguasai Yayasan TVRI lewat TPI (Televisi Pendidikan Indonesia), yang bisa dengan seenak perutnya berhutang sedikitnya Rp 6 milyar fee pemasukan iklan pada (Yayasan) TVRI, serta lebih dari Rp 100 milyar ke rumah-rumah produksi yang sudah atau terancam bangkrut (Prospek, 6 Maret 1993: 18; Sinar, 4 Februari 1995: 37; Forum Keadilan, 17 Juli 1995: 109; Gatra, 3 Februari 1996: 106; Swasembada, 9-22 Oktober 1997: 90-92).

Bambang menguasai Yayasan TVRI lewat PT Mekatama Raya, yang sejak Februari 1992 diberi hak mengutip iuran TVRI dari pemilik televisi a/n Yayasan TVRI melalui suatu kontrak selama 15 tahun (Prospek, 7 Maret 1992: 68). Tak jelas bagaimana pertanggungjawaban uang hasil kontrak selama 7 tahun yang lalu, suatu bentuk monopoli keluarga Suharto yang pernah dipersoalkan oleh Ketua DPR/MPR waktu itu, Jenderal (Purn.) Kharis Suhud (Borsuk, 1992). Makanya dia tidak dipilih kembali menjadi anggota DPR.

Setelah Harmoko digantikan oleh Hartono, Yayasan TVRI tetap berfungsi sebagai pencetak uang bagi Tutut dan Bambang. Bahkan Hartono berjanji akan menggunakan tenaga militer untuk mengutip uang iuran TVRI bagi yayasan ini (Strait Times, 21 Agustus 1997).

Sedikit catatan tentang yayasan-yayasan yang dikuasai Prabowo atau isterinya, Titiek Prabowo. Semenjak Prabowo jadi Komandan Kopassus, PT Kobame mendapat kredit sindikat Rp 45 milyar dari BRI dan Bank Pelita (milik kel. Djojohadikusumo) untuk membangun proyek-proyek properti di daerah Cinjantung, serta berusaha mengambilalih 50% saham Hotel Horison (EBRI, 18 Juni 1997; Siar, 10 Des 1997). Tidak jelas siapa ketuanya, tapi jelas berada di bawah pengaruh Prabowo, walaupun menantu Suharto itu sendiri kini sudah naik pangkat (jadi' letjen) dan jabatan (jadi Pangkostrad).

Yayasan Veteran Integrasi Timor Timur, resminya dibentuk oleh Gubernur Timor-Timur, Jose Abilio Osorio-Soares, sekitar bulan September 1994. Namun yayasan itu telah dimanfaatkan untuk promosi bisnis keluarga Soeharto di Timor Timur. Hanya dalam tempo 10 menit, Nyonya Siti Hediati Prabowo, alias Titiek Prabowo, berhasil mengumpulkan sumbangan Rp 210 juta bagi yayasan itu. Kesempatannya adalah Lokakarya dan Temu Usaha se-Nusa Tenggara dan Timor Timur, pertengahan September 1994, di Dili. Sumbangan para pengusaha itu menanggapi himbauan Titiek dalam jamuan makan malam di rumah gubernur, konon untuk menghargai perjuangan para keluarga veteran pejuang "integrasi". Penyumbangnya: Titiek Prabowo sendiri (Rp 50 juta); wakil perusahaan kayu & ikan Jayanti Group, di mana paman Titiek, Sudwikatmono menjadi presiden komisaris (Rp 50 juta); serta wakil-wakil Sucofindo, Texmaco, Modern Group, dan lima perusahaan lain (Jawa Pos, 14 Sept, 1994). Ternyata, dari semua penyumbang di malam dana itu hanya Titiek dengan kelompok Maharaninya dan Marimutu Sinivasan dengan kelompok Texmaconya yang sudah menanam modal di bumi Loro Sae. Keduanya berkongsi dengan Yayasan Hati membangun pabrik tenunan Timor, PT Dilitex, bernilai US$ 575 juta.

Yayasan Hati, walaupun secara resmi dipimpin Gil Alves, menantu sang gubernur , sesungguhnya merupakan alat bisnis Titiek Prabowo juga. Selain di pabrik tekstil PT Dilitex, puteri kedua Presiden Soeharto itu juga partner pabrik garam Yayasan Hati di Manatuto. Kedua pabrik baru itu diresmikan Titiek di Dili, bulan Mei tahun lalu (Aditjondro, 1997a; EBRI, 5 Feb 1997: 34).

Yayasan pencari dana KONI, sudah dapat dipastikan tidak cuma akan mencari dana bagi KONI, melainkan juga bagi keluarga Soeharto, baik melalui Titiek Prabowo maupun melalui Wismoyo Arismunandar. Jenderal ketua KONI ini masih termasuk famili, sebab ia menikah dengan Datiet Siti Hardjanti, sanak saudara almarhumah Nyonya Tien Soeharto (Forum Keadilan, 4 Des 1995: 40). Wismoyo sekarang menjadi presiden komisaris perusahaan penerbangan Mandala

Airlines, mewakili Nusamba dan Sigit Harjojudanto (Iklan InfoBisnis, Nov 1994; Indocommercial, 26 Jan 1995: 2). Karuan saja Bambang "dipercayai" oleh Wismoyo untuk mengetuai konsortium bersama Grup Mulia dan perusahaan Titiek Prabowo untuk membangun hotel, apartemen dan mal di bekas lapangan tembak Senayan guna memanfaatkan pesta olahraga SEA Games ke-19 di Jakarta, 11-19 Oktober yang lalu. Sementara itu, Tutut "dipercayai" untuk mengelola armada taksi SEA Games dengan 15000 mobil Proton Saga yang diimpornya di Malaysia (Swa, 24 April-7 Mei 1997:94-96; Siar, 7 Okt 1997). Itulah enaknya punya paman jadi Ketua KONI.

Yayasan-yayasan yang diketuai anak, menantu, serta keluarga besan Soeharto, selain merupakan alat bisnis keluarga Soeharto, sekaligus menunjang politik luar negeri Soeharto. Yayasan Tiara misalnya, digunakan Tutut untuk mencoba menggemboskan gerakan perlawanan siswa-siswa Timor Leste dengan cara merekrut mereka menjadi buruh di pabrik-pabrik yang dekat atau ikut dimiliki keluarga Soeharto, seperti pabrik semen Indocement di Cibinong, pabrik tekstil Kanindotex di Bawen (yang kini telah resmi diambil-alih Bambang Trihatmojo), pabrik tekstil PT Sritex di Sukoharjo, serta kilang kayu Barito Pacific di Kalimantan milik Prajogo Pangestu, teman bisnis Bambang maupun Tutut (Aditjondro, 1994: 48).

Makanya tidak mengherankan bahwa PT Sritex, yang anak perusahaannya juga melibatkan adik Ketua Golkar, Harmoko, berhasil menembus embargo Portugal terhadap barang-barang Indonesia dengan mengekspor 15 ton benang kapas ke pabrik tekstil milik Manuel Macedo, teman bisnis Tutut di Portugal, yang juga menjadi pelobi utama bagi rezim Soeharto di Portugal dan bekas jajahannya di Afrika (Santos dan Naia, 1997).

Pembongkaran produk Sritex di pelabuhan Leixoes, menggegerkan pers Portugal serta para aktivis Timor Leste di sana. Tapi karena ekspor Sritex itu resminya transaksi bisnis biasa, pemerintah Portugal tidak dapat melarang. Berkat "pijakannya" di Portugal itu, awal tahun lalu

Sritex berhasil memenangkan order 1/2 juta seragam tentara Jerman, senilai US$ 10,4 juta, atau Rp 25 milyar waktu itu (Aditjondro, 1994: 49; FEER, 13 Maret 1997: 63).

Kegiatan Yayasan Bimantara resminya juga bersifat nirlaba, tapi ujung-ujungnya juga berbau bisnis merangkap politik. Berkat promosi kain Timor dalam busana modern rancangan Prajudi Admodirdjo yang disponsori Yayasan Bimantara (Kompas, 11 Sep, 4 Des. 1994), produk PT Dilitex mendapatkan popularitas secara nasional, bahkan internasional.

Selain Yayasan Tiara, Tutut berniat mendirikan sebuah yayasan untuk mengelola sebuah perguruan tinggi di Timor Timor. Untuk itu ia telah memilih Kepala Desa Komoro, Vitorino, sebagai ketua yayasannya. Menurut kantor berita alternatif, Matebean , 12 Januari lalu, faktor bisnis melatarbelakangi maksud pembangunan perguruan tinggi itu, yaitu mendidik tenaga ahli untuk mendukung perluasan bisnis keluarga Suharto di Timor Timur.

Dugaan Matebean cukup berdasar. Setelah jatuhnya Jenderal Benny Moerdani dari puncak kekuasaannya di ABRI dan munculnya Mayor Jenderal (kini Letnan Jenderal) Prabowo Subianto sebagai penjaga keamanan keluarga Soeharto, bisnis anak-anak Soeharto mulai berkembang pesat di koloni Indonesia ini. Tutut sendiri berhasil menyingkirkan Robby Sumampouw, cukong peliharaan Benny Moerdani, menjadi "raja kopi" di Timor Leste, dengan pasaran ekspor di Amerika dan Australia. Dia juga telah mendapat konsesi batu pualam di Manatuto, yang tadinya juga dikuasai oleh Robby Sumampouw.

Kerabat Tutut yang lain sudah mulai merambah Timor Leste. Pamannya, Probosutejo, telah menyatakan minatnya membuka perkebunan kopi. Sedangkan sang adik, Tommy, yang paling tidak suka melihat suatu kesempatan emas berlalu, berhasil membujuk ayahnya untuk memperoleh konsesi perkebunan tebu seluas 30 ribu hektar di pantai selatan koloni itu. Perkebunan yang sebagian besar akan menggunakan buruh tani dari Jawa direncanakan akan menghidupi pabrik gula PT Putra Unggul Sejati di Manufahi, senilai Rp 500 milyar. Belakangan ada perubahan: perkebunan dan pabrik gula Tommy dipindahkan ke Lospalos, 320 km sebelah timur Dili, sedangkan suami Tutut, Indra Rukmana, lewat PT Tridant, mendapatkan konsesi perkebunan tebu dan pabrik gula di Manufahi (Aditjondro, 1996a, 1997; Jawa Pos, 12 Nov. 1997; Matebean, 12 Jan. 1998).

Dari rencana-rencana investasi keluarga besar Soeharto itu, keinginan Tutut untuk mendirikan satu perguruan tinggi di sana cukup masuk akal. Namun di balik keinginan mendapatkan tenaga kerja berpendidikan tinggi, rencana itu juga berbau politis: perguruan tinggi swasta yang sudah ada, Untim, sudah berkembang menjadi basis perlawanan pemuda-pemudi Maubere terhadap pendudukan Indonesia, menyusul adik-adik mereka di SLTA. Berarti, setelah gagal menggemboskan perlawanan para siswa SLTA, Tutut kini berusaha merambah ke benak para lulusan SLTA.

Yayasan Bhakti Putra Bangsa dan Yayasan IMI Lampung lebih berhubungan dengan hobi-hobi Tommy yang menghasilkan uang - golf - dan balap mobil. Yayasan Bhakti Putra Bangsa yang diketuai Tommy menyelenggarakan pertandingan golf di Palm Hill Country Club Sentul, dekat Bogor, Jawa Barat, bulan Maret 1995 (iklan Bisnis Maritim, 30 Jan-5 Feb 1995). Dan kita sudah sama-sama tahu, bahwa golf di Indonesia lebih merupakan sarana negosiasi bisnis ketimbang olahraga yang serius.

Yayasan Tirasa, yang diketuai Tommy Soeharto, dengan anggota badan pengurusnya Tungky Ariwibowo, Moerdiono, dan Tinton Suprapto, adalah pemegang saham PT Sarana Sirkuitindo Utama, yang pada gilirannya adalah pemilik sirkuit balap mobil Sentul. Jadi Sentul bukan milik Tommy Soeharto. Begitu keterangan presdir PT SSU, Tinton Suprapto pada pers, 6 tahun lalu (Surya, 26 Juni 1993). Memang secara Sentul resmi bukan milik Tommy pribadi, tapi de facto, ya.

Yayasan IMI Lampung, walaupun tidak diketuai Tommy secara langsung, merupakan instrumen untuk memperluas hobi merangkap bisnis balap mobilnya dari Sentul ke Lampung. Tarif ganti rugi tanah rakyat seluas 157 hektar di Lampung ditentukan langsung oleh Tommy selaku investor merangkap pengurus pusat IMI (Bola, Minggu I Des 1992: 4; Kompas, 15 & 27 Juli 1996).

Dalam kelompok kelima tercatat (41) Yayasan Pembangunan Jawa Barat, (42) Yayasan 17 Agustus 1945, dan (43) Yayasan Pendidikan Triguna yang ketiga-tiganya berafiliasi ke mendiang Eddi Kowara Adiwinata, ayah mertua Tutut (iklan dukacita Suara Merdeka, 23 Januari 1995 dan Jawa Pos , 7 Maret 1996); serta (44) Yayasan Balai Indah yang diketuai Hashim Djojohadikusumo, yang dibentuk untuk menggalakkan ekspor barang dan jasa Indonesia ke negara-negara bekas Uni Soviet.

Seperti halnya Yayasan Tiara, kegiatan Yayasan Balai Indah juga memadu agenda politis dengan agenda ekonomis: sambil berdagang di Asia Barat dan Eropa, berusaha menetralisasi para pendukung Timor Leste di arena internasional. Yayasan Balai Indah yang sehari-hari dikelola isteri Dubes RI di Moskow, Erna Witoelar, ikut melicinkan jalan barter teh Indonesia dengan kapas Uzbekistan. Kapas itu selanjutnya dijual ke Portugal, di mana pembelinya membayar tunai sebesar US$ 17 juta (Gatra, 25 April, 6 Mei 1995).

Perdagangan barter Hashim dengan Uzbekistan dilakukan bersama-sama kelompok Texmaco, kelompok Bakrie, dan perusahaan keluarga Ibnu Sutowo, PT Nugra Santana. Walhasil, kelompok Texmaco kemudian maju ke depan, menggandeng raksasa kimia Jerman, Hoechst, untuk membangun lima pabrik serat polyester (bahan baku tekstil sintetis) di Eropa. Salah satu pabrik itu adalah anak perusahaan Hoechst di Portugal (EBRI, 12 Agustus 1995: 23; Jakarta Post, 14 Juli 1997).

Karuan saja pers dan polisi Portugal geger sekali lagi, karena Texmaco, yang muncul dengan nama Multikarsa Investment, merupakan perusahaan kedua yang tampaknya akan berhasil menembus embargo perdagangan Indonesia - Portugal. Selain karena alasan politis, Partai Hijau Portugal (Partido Ecologista Os Verdes) dan asosiasi pedagang kecil dan menengah secara keras menentang rencana pembangunan pabrik kongsi Multikarsa-Hoechst di Portugal itu.

Kedua perusahaan Indonesia yang berada di ujung tombak usaha mendobrak embargo barang-barang Indonesia di Portugal, punya hubungan erat dengan keluarga Soeharto. Sritex, yang melibatkan seorang adik Harmoko dalam beberapa anak perusahaannya, menurut kalangan perbankan di Solo juga dekat dengan Nyonya Tien Soeharto (alm.). Sedangkan Texmaco, sebelum bisnis bersama Titiek Prabowo di Timor Leste dan bersama ipar Titiek, Hashim Djojohadikusumo di Uzbekistan, Texmaco jugalah yang menolong Titiek membeli banknya, Bank Putera Sukapura, ketika sedang anjlog. Anjlognya bisnis bekas bank milik Titiek itu a.l. karena kegagalan usaha investasinya di bidang real estate di Afrika Selatan bersama satu yayasan milik ANC (Aditjondro, 1996b).

Akhirnya, dalam kelompok keenam termasuk (45) Yayasan Mangadeg, yang dikelola sanak saudara dan orang dekat Nyonya Tien Suharto yang berasal dari Solo; dan (46) Yayasan Kemusuk Somenggalan yang dikelola sanak-saudara Soeharto di Dukuh Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Yayasan Mangadeg resminya didirikan tanggal 28 Oktober 1969 untuk membangun dan mengelola Astana Giribangun, kuburan orang-orang yang mau dianggap keturunan keraton Mangkunegaran, walaupun sesungguhnya tidak berdarah bangsawan. Dengan kata lain, dengan dikuburkan di situ, keluarganya seolah-olah dapat "membeli" darah bangsawan itu. Itulah mausoleum di mana

Nyonya Tien Soeharto, seorang adiknya, dan kedua orangtuanya dikuburkan.

Menurut akte pendiriannya, Soeharto dan Nyonya Tien Soeharto adalah pelindung dan ketua umum yayasan itu, sedangkan Mangkunagoro VIII ketua kehormatannya. Ketua hariannya waktu itu adalah usahawan asal Solo, Sukamdani Sahid Gitosarjono, yang ikut menyumbangkan Rp 30 juta untuk modal pertama yayasan itu. "Saya lakukan hal itu dengan harapan mendapat imbalan pahala berlimpah. Nyatanya ada berkahnya -- usaha-usaha saya jadi lancar," jelas Sukamdani pada Tempo , 3 Desember 1977, hal. 8.

Dalam dasawarsa 1970-an, ketika masih menjadi wartawan Tempo , saya mendengar bahwa para pemegang HPH harus menyetor sejumlah dana ke rekening Dirjen Kehutanan Sujarwo, yang merangkap Bendahara Yayasan Mangadeg. Menurut Sukamdani Gitosarjono, seluruh biaya pembangunan kuburan itu, yang dikerjakan secara padat karya selama dua tahun (1974-1976) dengan mengerahkan 700 orang penduduk desa setempat, "cuma" menelan biaya Rp 437,8 juta. Begitu katanya dalam konferensi pers, akhir November 1977, menanggapi kritik mahasiswa dan desas-desus bahwa kuburan itu menelan biaya Rp 4 milyar (Tempo, 3 Des 1977: 8-9).

Selain memeras para pemegang HPH, sampai akhir 1980-an Yayasan Mangadeg juga punya bisnis lain, lewat Bernard Ibnu Hardoyo, adik kandung Nyonya Tien Soeharto. Atas nama Yayasan Mangadeg, Ibnu Hardoyo dan ayahnya, Soemoharjomo (= Soemoharmanto), mendirikan PT Gunung Ngadeg Jaya pada tanggal 8 Juni 1971, yang memiliki 30% saham pabrik semen PT Semen Nusantara di Cilacap.

Selain itu, lewat PT Gunung Ngadeg Jaya, Mangadeg masih punya sejumlah saham dalam pabrik kabel Gajah Tunggal, PT Kabelmetal Indonesia, punya tiga perusahaan kongsi dengan kelompok Miwon dari Korea, dan punya saham dalam PT Pasopati, satu holding company yang dioperasikan Bob Hasan. PT ini menguasai sejumlah saham perusahaan pelayaran PT Karana Lines dan PT Garsa Line, perusahaan pengangkut kayu kongsi Karana Lines dengan sejumlah investor Jepang.

Kemudian, lewat Sukamdani dan Soemoharjomo, Mangadeg juga mendapat pemasukan dari kelompok hotel Sahid, hotel Kartika Chandra, dan konsesi hutan PT Sahid Timber. Belum lagi pemasukan Mangadeg dari peternakan sapi "3-S" seluas 600 hektar di Desa Tapos, Kecamatan Cibedug, dekat Bogor, yang dikelola oleh Sigit Harjojudanto, a/n PT Rejo Sari Bumi. Ayah Nyonya Tien Soeharto, Soemoharmanto, tercatat sebagai direktur perusahaan yang dibentuk tanggal 25 November 1971. Selanjutnya, PT Rejo Sari Bumi juga menjadi pemegang saham perkebunan tebu PT Gunung Madu Plantations dan pabrik gula PT Gula Putih Mataram, di Lampung, bersama-sama Yayasan Dakab, Salim Group, dan raja gula Malaysia, Robert Kuok. Bisnis yang manis itu kini dipegang oleh Bambang lewat kelompok Bimantara (Gitosardjono, 1974; Akhmadi, 1981: 74, 115, 173-176; Pura dan Jones, 1986a; Robison, 1990: 260-261, 343-347, 362; Shin, 1989: 250-251; Warta Ekonomi, 22 Juni 1992: 16, 7 Nov. 1994: 17; Prospek, 22 Jan. 1994: 27; Swa, 30 Jan.-19 Feb. 1997: 21, 3-16 Juli 1997: 87).

Besarnya dana mausoleum Mangadeg serta pembangunan peternakan Tapos seluas 600 hektar, yang tanahnya diambil dari petani setempat, tanpa ganti rugi wajar, dikecam secara keras oleh mahasiswa ITB dalam Buku Putih 1978. Dokumen itu serta penolakan terhadap pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden mengakibatkan Ketua Dewan Mahasiswa ITB, Heri Akhmadi, diseret ke pengadilan (Akhmadi, 1981: 74). Kurang lebih bersamaan dengan itu, berlangsung pengadilan Sawito Kartowibowo yang juga menyerukan agar Soeharto meletakkan jabatan. Tokoh kebatinan itu dalam pembelaannya juga mengecam pembangunan musoleum dan peternakan keluarga Soeharto itu (Bourchier, 1984: 55).

Dua Pesaing Baru

Berbeda dengan kedua pesaing lama, Harapan Kita dan Trikora, ada dua pesaing baru, yakni Yayasan Purna Bhakti Pertiwi dan Yayasan Amalbhakti Muslim Pancasila (YAMP), yang penghasilannya dengan cepat melambung tinggi. Yayasan Purna Bhakti Pertiwi lebih dikenal sebagai pengelola museum senama milik Soeharto dan isterinya di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Museum Purna Bhakti Pertiwi tempat memamerkan sebagian besar cendera mata yang pernah diterima Kepala Negara dan Ibu Negara, dibangun atas biaya sejumlah pengusaha top, yang perusahaannya boleh jadi ikut memiliki saham yayasan itu.

Para pengusaha itu pertama-tama adalah Probosutejo dan Sudwikatmono, yang masing-masing menyumbangkan paling kurang Rp 300 juta untuk pembangunan museum itu. Kemudian, ada tujuh orang usahawan lain yang masing-masing menyumbangkan Rp 200 juta, yakni Tommy Soeharto; Robby Sumampouw, pemilik kasino di Pulau Christmas yang pernah merajai semua bisnis basah di Timor Leste; Tonny Hardianto (direktur PT Binareksa Perdana, perusahaan milik Tommy Suharto yang menjadi motor BPPC); A.R. Ramly (waktu itu Presiden Komisaris PT Astra International); Prayogo Pangestu (Barito Pacific); Usman Admadjaja (Bank Danamon); dan Henry Pribadi (Kelompok Napan) (Prospek, 7 Maret 1992: 78; Bisnis Indonesia , 15 Febr. 1994, 5 Maret 1994; Surya, 15 Febr. 1994).

Tapi itu semua masih kecil dibandingkan dengan pemasukan Yayasan Purna Bhakti Pertiwi dari 22 % sahamnya dalam perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Tahun 1997, laba bersih perusahaan jalan tol pimpinan Tutut itu mencapai Rp 123,6 milyar (IEFR, 1997: 538). Berarti dividen Yayasan Purna Bhakti Pertiwi dari jalan-jalan tol CMNP, sebelum devaluasi, tahun lalu telah mencapai Rp 27 milyar!

Belum lagi dividen yayasan ini, setelah jalan-jalan tol yang dibangun dan dikelola kongsi-kongsi CMNP di Malaysia, Filipina, Burma, Cina, Polandia, Bosnia, dan di Timur Tengah, untuk masa kontrak 30 tahun mendatang, mulai beroperasi (Info Bisnis , Juni 1994: 11; Business Week , 19 Agustus 1996; 16;Swa , 5-18 Juni 1997: 46; EBRI , 5 Maret 1997: 44; Prospek , 18 Agustus 1997: 49).

Yang jelas, Yayasan Purna Bhakti Pertiwi terus terjamin pemasukannya dari jalan-jalan tol yang dibangun sang putri sulung berkat dorongan sang ayah sebagai tokoh ASEAN, APEC, Gerakan Non-Blok dan Gerakan Negara-Negara Muslim.

Berkat pemasukan dari jalan tol itu, Yayasan Purna Bhakti Pertiwi kini telah menyaingi Yayasan Amalbhakti Muslim Pancasila (YAMP), yang terutama menikmati masa jayanya ketika Sudharmono menjadi Kepala Sekretariat Negara (Sekneg). Selain menjadi Ketua Tim Keppres 10 yang menyaring semua proyek pembangunan daerah yang nilainya di atas Rp 500 milyar, Sudharmono juga menjadi Ketua Umum Golongan Karya dan Sekretaris YAMP. Posisi 'penjaga gawang' itu memungkinkan Sudharmono membesarkan sejumlah pengusaha pribumi, termasuk menantunya sendiri, Bambang Rachmadi, pemegang franchise McDonald di Indonesia, Agus Kartasasmita (adik Ginanjar Kartasasmita), dan kelompok Medco, salah satu perusahaan keluarga Eddi Kowara Adiwinata, mertua Tutut.

Bersama-sama Yayasan Dakab, YAMP menjadi sumber utama pembiayaan Golongan Karya, didukung "sumbangan wajib" antara Rp 50 dan Rp 1000 sebulan bagi setiap pegawai negeri yang Muslim. Berkantor di gedung Setneg, YAMP ikut mengelola proyek-proyek Bantuan Presiden (Banpres). Terang saja para pengusaha yang ingin produk atau jasa dagangannya digunakan dalam proyek-proyek Banpres, mau tidak mau harus 'menyumbang' Yayasan ini, yang pada gilirannya mencari dukungan umat Islam bagi Golkar dan Suharto

khususnya dengan menyumbang pembangunan mesjid di mana-mana. Dewan pengurusnya ini terdiri dari Suharto sebagai ketua, Alamsyah, Widjojo Nitisastro, Amir Machmud, K.H. Tohir Widjaja, dan Haji Thayeb Gobel (alm.) sebagai wakil ketua, serta Sudharmono, Bustanil Arifin dan E. Soekasah Somawidjaja sebagai sekretaris (Vatikiotis, 1990: 63; Pangaribuan, 1995; IEFR, 1997: 35).

Berapa Nilai Total Kekayaan Yayasan-Yayasan Suharto?

Sampailah kita sekarang pada pertanyaan pokok: berapa nilai total kekayaan yayasan-yayasan itu?

Jawabannya: tidak ada yang tahu pasti, kecuali Soeharto dan keluarga dekatnya, serta bendahara yayasan-yayasan itu, yang hanya bertanggungjawab kepada Suharto pribadi dan selalu menjalankan gerakan tutup mulut kepada wartawan. Namun satu ketika Wakil Ketua II Yayasan Dharmais yang eks Menteri Koperasi merangkap Kepala Bulog, Bustanul Arifin sesumbar bahwa: "Empat yayasan yang dipimpin Presiden Soeharto secara pribadi kini telah menjadi yayasan terkaya di dunia, jauh melebihi Rockefeller Foundation dan Ford Foundation di AS". Keempat yayasan yang dimaksud adalah Dharmais, Supersemar, Dakab, dan Amalbhakti Muslim Pancasila (Surabaya Post , 29 Juli 1994). Namun berapa persis kekayaan yayasan-yayasan itu, tidak diungkapkannya.

Menurut penelitian koresponden Far Eastern Economic Review , Michael Vatikiotis, total kekayaan, bunga bank, dan sumbangan tiga di antara keempat yayasan itu di tahun 1990, adalah sebagai berikut (FEER , 4 Okt. 1990: 63):

- Yayasan Supersemar, memiliki kekayaan senilai Rp 222 milyar, dan menerima bunga bank setiap tahun senilai Rp 24 milyar. Sumbangan yang diberikannya s/d bulan Maret 1990, adalah Rp 46 milyar.
- Yayasan Dharmais, memiliki kekayaan senilai Rp 60,8 milyar, menerima bunga bank setiap tahun senilai Rp 9 milyar, dan memberikan sumbangan sebesar Rp 15,4 milyar s/d bulan Maret 1990.
- Yayasan Dakab, yang terkecil di antara ketiganya, memiliki kekayaan senilai Rp 43 milyar, tidak diketahui berapa besar bunga bank yang diterimanya, dan hanya memberikan sumbangan sebesar Rp 2,4 milyar, sampai dengan bulan Maret 1990.

Itu data tahun 1990 dan sebagian besar berasal dari otobiografi Suharto sendiri. Misalnya, dalam otobiografinya yang juga dikutip dalam laporan Warta Ekonomi (29 Okt. 1990: 28-29), Suharto hanya menyebutkan kekayaan yayasan-yayasannya yang berasal dari deposito, surat berharga, dan giro.

Pendek kata, itu baru pendapatan dari bank. Bukan dari saham di sekian perusahaan raksasa, seperti di pabrik-pabrik Indocement, pabrik-pabrik penggilingan gandum Bogasari, dan pabrik pupuk Kujang II. Atau dari dividen kelompok Nusamba.

Data lebih baru diungkapkan Suara Independen, edisi Januari-Februari 1996. Kekayaan Yayasan Dharmais yang ada di kas diperkirakan Rp 900 milyar. Walaupun angka kekayaan Dharmais itu belum yang dibenamkan di berbagai tempat seperti surat berharga, penyertaan uang, penyertaan saham di berbagai perusahaan, angka Rp 900 milyar itu sudah menunjukkan lonjakan luarbiasa dibandingkan dengan angka kekayaan Dharmais tahun 1990 yang menurut catatan Vatikiotis, 'hanya' Rp 60 milyar. Apalagi kalau dibandingkan dengan kekayaan Dharmais di tahun 1978, yang menurut pengakuan Suharto waktu itu baru berjumlah Rp 7 milyar (Tempo , 4 Febr. 1978).

Kalau seluruh dividen yang diterima dimasukkan dalam daftar kekayaan yayasan-yayasan itu, maka apa yang dikatakan Bustanil Arifin sangat masuk akal. Tahun 1994 misalnya, trio Dharmais -Dakab-Supersemar meraup dividen sebesar Rp 29 milyar dari penyertaan sahamnya di Bank Duta. Sedangkan tahun sebelumnya, trio yang sama meraup dividen sebesar Rp 1 trilyun dari penyertaan sahamnya dalam kelompok Nusamba (Suara Independen, Jan.-Febr. 1996).

Salah satu "pameran kekuatan" trio itu, ialah ketika mereka sekaligus menyuntikkan dana segar sebesar US$ 419,6 juta ke Bank Duta, tahun 1990, ketika bank itu kalah bermain valuta asing sebanyak Rp 770 milyar, atau US$ 420 waktu itu (Vatikiotis, 1990: 62; Forum Keadilan, 26 Mei 1994: 38). Nah, kalau US$ 400 juta lebih dapat dikeluarkan dalam sekejap mata, berapa duit yang tersisa di kas ketiga yayasan itu, silakan tebak sendiri.

Taksiran di luar negeri terhadap total kekayaan yayasan-yayasan yang diketuai Soeharto dan isterinya sangat beragam. Paul Hunt yang menulis di koran Guardian & Mail yang terbit di Inggris, 1 Agustus dua tahun lalu, memperkirakan bahwa nilai kekayaan tak teraudit dari yayasan -yayasan Soeharto sendiri sekitar US$ 5 milyar. Dengan kurs terakhir di mana US$ 1 melonjak -lonjak di sekitar Rp 12.000, berarti kekayaan yayasan-yayasan Suharto sekitar Rp 60 trilyun. Namun menurut taksiran badan rahasia AS, Central Intelligence Agency (CIA), sebagaimana dikutip dalam tesis Ph.D. Jeffrey Winters tahun 1991, kekayaan Presiden Suharto sendiri mencapai US$ 15 juta. Jumlah itu harus dilipat dua, kalau kekayaan seluruh anggota keluarga besarnya mau dimasukkan juga (Vriens, 1995: 49).

Itu baru taksiran tahun 1991, delapan tahun yang lalu, sebelum Nusamba menguasai saham -saham empuk di tambang tembaga-emas-perak PT Freeport Indonesia di Irian Jaya, serta raksasa automotif PT Astra Internasional. Makanya taksiran nilai total kekayaan seluruh keluarga besar Suharto, sebesar US$ 40 milyar (Newsweek, 26 Januari 1998), cukup masuk akal. Juga, cukup untuk menebus bangsa Indonesia dari kemelut moneter sekarang ini, tanpa harus berhutang pada IMF.

Dampak sosial, politis dan ekonomis yayasan-yayasan Soeharto: Secara sosial, politis dan ekonomis, yayasan-yayasan yang dipimpin atau dikuasai oleh Soeharto bersama kaum kerabatnya punya limabelas dampak sebagai berikut:

Pertama, dana trilyunan rupiah yang dikuasai yayasan-yayasan itu telah membantu Soeharto menguasai faksi-faksi di dalam ruling elite Indonesia dengan membuat faksi-faksi itu saling mengimbangi, dan dengan menggeser favoritisme dari satu faksi ke faksi lain. Ini terang saja membuat politik nasional Indonesia menjadi sangat personalized , tanpa aturan main tertulis yang telah disepakati bersama. Dari kajian mendalam terhadap pasang-surut berbagai yayasan itu, sebagaimana dicatat oleh sejumlah pengamat (Robison, 1986; Shin, 1989; dan Pangaribuan, 1995) dapat kita amati liku-liku permainan Soeharto sebagai berikut: Dalam dasawarsa pertama pemerintahannya, ketika Soeharto masih kecipratan petro-dollar Pertamina dari kawan baiknya, Ibnu Sutowo, dan pada saat ia masih sedang mengonsolidasi kekuasaan lewat basis lamanya di Kostrad, Soeharto banyak memberikan angin pada perusahaan -perusahaan yang "dihinggapi" saham-saham Yayasan Dharma Putera Kostrad serta yayasan -yayasan TNI/AD yang lain. Setelah meninggalnya Brigadir Jenderal Sofyar, pengelolaan perusahaan-perusahaan di bawah panji-panji Kostrad itu diserahkan pada bekas aktivis 1966, Sofyan Wanandi, yang berada dalam kubu Jenderal Ali Murtopo yang bermarkas di CSIS (Centre for Strategic and International Studies).

Sesudah kubu Ali Murtopo (kelompok Tanah Abang) mulai kehilangan pamor, a.l. karena ketergantungannya pada sejumlah pakar keturunan Cina (Jusuf Wanandi, Harry Tjan Silalahi) serta pengusaha-pengusaha keturunan Cina pula (Liem Sioe Liong, alm. Nyoo Han Siang), Soeharto mulai membesarkan kubu CKH (Corps Kehakiman TNI/AD), yakni para jenderal bergelar S.H. (Sudharmono, Ali Said, Ismail Saleh, alm. Mudjono) dengan membesarkan yayasan-yayasan Dakab, Dharmais, Supersemar, dan YAMP, sambil mendekati umat Islam lewat proyek-proyek bantuan pembangunan mesjid dan pembiayaan MTQ.

Ketika kubu CKH semakin kuat berakar di Golkar, peranan yayasan-yayasan itu mulai diimbangi oleh Soeharto dengan memperlakukan Habibie sebagai sumber dana taktis, sebagaimana ia dulu memanfaatkan Ibnu Sutowo. Dan sebagaimana ia dulu memanfaatkan para pemegang HPH sebagai sumber dana taktis lewat Yayasan Mangadeg yang dibendaharai Sujarwo, Menteri Kehutanan terlama dalam sejarah Orde Baru, di era Habibie Bob Hasanlah yang diberikan peranan lebih besar untuk menggemukkan trio Dakab, Dharmais, dan Supersemar, lewat kelompok Nusamba yang mulai mengambilalih peranan orang-orang lama yang dulunya dekat dengan kelompok CKH dan kelompok Tanah Abang.

Sinerji antara sektor kehutanan dan sektor high tech , yang merupakan andalan Suharto untuk me-nina-bobo-kan rakyat Indonesia lewat proyek-proyek mercusuar seperti pesawat Gatotkaca Habibie dan pesawat jet nasional (yang digugurkan oleh IMF), terlihat dari suntikan Dana Reboisasi ke IPTN. Dana Reboisasi itu, yang dikutip dari para pemegang HPH, dikuasai oleh Masyarakat Perkayuan Indonesia (MPI) yang diketuai kawan golf Suharto, Bob Hasan. Seperti di zaman Menteri Kehutanan Sujarwo, di zaman "Menteri Kehutanan bayangan" Bob Hasan pengelolaan Dana Reboisasi oleh MPI juga sangat tidak transparan.

Selama dua dasawarsa pertama masa pemerintahannya, anak-anak Suharto sudah dilibatkan dalam berbagai perusahaan yang mengandung saham yayasan yang diketuai orang tua mereka, baik perusahaan yang berafiliasi ke Yayasan Mangadeg (seperti PT Rejo Sari Bumi), maupun yang berafiliasi ke trio Dakab, Dharmais dan Supersemar. Sebab jangan lupa, sebelum mereka membentuk konglomeratnya sendiri, Sigit dan Tutut bersama-sama sudah menguasai 32 % saham Bank Central Asia (BCI), banknya kelompok Salim, sedangkan Sigit sendiri jadi partner Bob Hasan dalam Nusamba.

Dalam kurun waktu itu, Nyonya Tien Soeharto sendiri sudah menjadi pemegang saham dan direksi berbagai perusahaan yang berafiliasi ke Mangadeg, Kartika Jaya, Kartika Chandra, dan Hanurata.

Setelah anak-anak Soeharto ingin muncul sendiri sebagai "usahawan", artinya, sebagai "kapitalis rente", mulailah mereka dilibatkan dalam kepengurusan yayasan-yayasan yang diketuai orangtua mereka, di mana mereka dengan mudah -- tanpa sorotan pers -- berinteraksi dengan para pembantu Soeharto di pemerintahan. Itulah kitchen cabinet di mana banyak keputusan telah digodog sampai matang, sebelum disajikan ke ruang depan di mana kabinet yang resmi bersidang (untuk konsumsi wartawan).

Sesudah konglomerat-konglomerat anak-anak Soeharto semakin besar, mulailah Tutut dan Bambang mendirikan yayasan-yayasan mereka sendiri, sambil juga mendirikan perusahaan media massa elektronik dan cetak untuk mempengaruhi opini massa. Dengan dipelopori si anak sulung, Tutut, para P-3 (putra-putri presiden) juga mulai tampil menguasai kepengurusan Golkar, bersama para partner bisnis mereka, seperti Anthony Salim. Sementara itu, ekspansi bisnis mereka semakin menjadi-jadi, yang ikut "menyumbang" pembengkakan hutang swasta Indonesia ke bank-bank internasional, yang diperkirakan antara 65 sampai 100 milyar dollar AS.

Politik pemerintahan yang begitu personalized inilah yang selama tiga dasawarsa dipupuk lewat yayasan-yayasan Soeharto ini. Celakanya, pada saat pembenahan administrasi pemerintahan dan politik negara diperlukan, Soeharto bukannya lebih dahulu meminta persetujuan DPR-RI bagi komitmen-komitmennya ke IMF, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UUD 1945, di mana paling tidak pembicaraan tentang syarat-syarat IMF dapat disaksikan oleh wartawan dan aktivis. Sebaliknya, ia kembali ke "kabinet dapur"nya, dengan mengajak Anthony Salim (putera mahkota kelompok Salim), The Nin King (juragan tekstil dari Pintu Kecil) yang dulu ikut membiayai Operasi Khususnya Ali Murtopo. Para P-3 (putra-putri Presiden) pun diikutsertakan dalam pembicaraan luarbiasa penting yang dapat menentukan nasib bangsa dan Negara. Sedangkan kehadiran Widjojo Nitisastro dan Radius Prawiro dalam tim inti itu, hanyalah sebagai alat pemikat negara-negara dan bank-bank Barat.

Kedua, yayasan-yayasan yang telah mewabah ke berbagai bidang usaha dan bergerak hampir di seantero tanah air telah menimbulkan dualisme antara aparatur pemerintah yang resmi versus konglomerat-konglomerat yang secara de facto jauh lebih berkuasa ketimbang aparatur resmi.

Ketiga, yayasan-yayasan yang sangat besar kekuasaannya ini membaurkan batas-batas antara urusan pribadi dan urusan dinas. Inilah korupsi pada tingkat tertinggi di negara kita, yang jauh lebih besar dari pada skandal Pertamina di pertengahan 1970-an.

Keempat, proyek-proyek "Bantuan" Presiden (Banpres) dan "Instruksi" Presiden (Inpres) yang dikelola Sekretariat Negara dan Sekdalopbang, yang dananya berasal dari beberapa yayasan yang diketuai Suharto, selain merusak displin anggaran (karena berada di luar APBN) dan melanggar Pasal 23 UUD 1945 (karena tidak dipertanggungjawabkan kepada DPR), juga memupuk kultus individu (karena dana Banpres/Inpres itu seolah-olah berasal dari kantong pribadi Presiden yang begitu dermawan). Berarti, bertolak-belakang dengan komitmen Orde Baru sendiri yang menolak kultus pada presiden yang terdahulu.

Kelima, yayasan-yayasan ini menciptakan ekonomi biaya tinggi, yang tidak saja mengurangi daya saing produk-produk Indonesia di gelanggang internasional, tapi juga menambah beban rakyat Indonesia dan Timor Leste sebagai pembayar pajak dan cicilan dan bunga hutang luar negeri pemerintah Suharto.

Keenam, karena yayasan-yayasan ini telah memanfaatkan jasa sejumlah pegawai serta fasilitas pemerintah, mulai dari gedung, personil dan sarana komunikasi Sekretariat Negara oleh YAMP, terminal bandara Sukarno-Hatta oleh Sempati Airlines (milik trio Dakab, Dharmais, Supersemar), pesawat terbang TNI/AU dan kapal TNI/AL untuk modal dan pengembangan usaha peternakan Tapos (salah satu sumber dana Yayasan Mangadeg), s/d fasilitas KBRI di Moskow oleh Yayasan Balai Indah dan KBRI di Paramaribo oleh anak perusahaan Yayasan Kemusuk Somenggalan, maka "subsidi terselubung" rakyat Indonesia bagi akumulasi kekayaan keluarga besar Suharto sudah mencapai milyardan rupiah, apabila seluruh jam kerja pegawai dan ongkos sewa fasilitas pemerintah dinilai berdasarkan pasaran tenaga kerja, ruang kantor, serta sarana komunikasi dan transportasi setempat.

Ketujuh, pada saat yang bersamaan, yayasan-yayasan Suharto telah mengfasilitasi capital outflow dari sebagian besar sarana usaha Negara dan simpanan pegawai negeri dan karyawan perusahaan-perusahaan negara ke rekening-rekening bank keluarga besar Suharto. Keterangannya adalah sebagai berikut: Dalam fase ekspansi konglomerat-konglomerat yang berafiliasi ke keluarga besar Suharto, dana dari yayasan-yayasan Suharto dirasakan tidak cukup, sehingga dana-dana pensiun, dana-dana asuransi tenaga kerja, serta fasilitas Yayasan TVRI dan Yayasan Dana Bantuan Kesejahteraan Sosial (Depsos) dilibatkan secara habis-habisan sebagai pemegang saham atau sebagai penyedia prasarana dan personalia. Di atas kertas, para pegawai negeri dan perusahaan-perusahaan negara tersebut dapat ikut "kecipratan" keuntungan konglomerat-konglomerat keluarga Suharto. Tapi kenyataannya, akibat kekuasaan yang ada di belakangnya, berbagai instansi negara, seperti TVRI, Pertamina, dan Garuda, telah melaporkan tunggakan-tunggakan rekening perusahaan anak-anak Suharto, sementara Jasa Marga mengeluh tentang pembagian keuntungan tidak adil dari PT Citra Marga Nusaphala Persada.

Kerugian peralatan serta personalia pemerintah itu saat ini sangat diperparah akibat krisis moneter yang sedang kita hadapi. Buat keluarga besar Suharto, krisis moneter ini tidak

begitu besar dampaknya, sebab dengan mudah mereka dapat membubarkan semua yayasan keluarga Suharto itu atau menyatakannya bankrut, karena badan hukum semacam ini memang hanya bertanggungjawab kepada pendirinya. Sementara itu, kekayaan pribadi para anggota keluarga besar Suharto, tinggal dialihkan ke luar negeri lewat transaksi perbankan biasa.

Kedelapan, penggunaan bentuk badan hukum yayasan demi akumulasi kekayaan pribadi, merupakah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia tentang yayasan sebagai organisasi nirlaba. Pemilihan bentuk badan hukum yang hanya bertanggungjawab kepada pendirinya ini, barangkali bukan suatu kebetulan. Apalagi selalu tidak jelas apakah yayasan yang bersangkutan, atau ketuanya yang menjadi pemegang saham. Juga tidak ada mekanisme yang secara yuridis memungkinkan para jatim-piatu Trikora atau Operasi Seroja, misalnya, untuk meminta pertanggungjawaban pengurus yayasan yang mengatasnamakan mereka.

Kesembilan, dengan mengambil-alih Bank Umum Koperasi Indonesia, mengubahnya menjadi PT yang menjadi salah satu sumber rezeki trio Dakab, Dharmais dan Supersemar lewat kelompok Nusamba, yayasan-yayasan Suharto punya andil dalam melumpuhkan gerakan koperasi di Indonesia, khususnya koperasi di kalangan TNI/AD, TNI/AL, Polri, dan pengusaha batik, yang uangnya kini terbenam dalam PT Bank Bukopin, yang sebentar lagi akan dilebur dalam Bank Nusamba yang baru.

Kesepuluh, kembali ke soal "subsidi terselubung" rakyat Indonesia demi akumulasi kekayaan keluarga besar Suharto. Subsidi itu tidak terbatas pada penggunaan tenaga dan sarana pemerintah untuk yayasan-yayasan Suharto, melainkan ada yang lebih struktural dengan pengaruh ke kelas bawah di desa maupun kota. Monopoli terigu impor demi memperkaya Yayasan Harapan Kita, telah membantu menggencet nilai-nilai tukar (terms of trade) petani padi, di samping tekanan Bulog lewat operasi pasarnya. Dumping produk Bogasari dalam bentuk berbagai merek mi kemasan produksi Indofood, di mana rakyat miskin mengalami erosi gizi karena di-nina-bobo-kan oleh nikmatnya supermi dengan rasa ini dan itu. Padahal nilai gizi makanan kemasan ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan berbagai jenis makanan murah buatan orang desa.

Kesebelas, melalui konsesi-konsesi hutan, perkebunan, dan peternakan yang dikuasainya, yayasan-yayasan Suharto ini memberikan contoh buruk kepada rakyat dan aparat pemerintah lainnya, bahwa UUPA 1960, yang menolak pemilikan tanah berlebihan (excessive land-ownership) maupun pemilikan tanah guntai (absentee landownership), sebagaimana dituangkan dalam UU Land Reform 1960 serta UU Bagi Hasil 1960, secara de facto tidak berlaku di Indonesia.

Keduabelas, dengan beroperasi dari gedung Sekretariat Negara, dipimpin oleh pengurus yang terdiri dari pejabat negara yang secara resmi tidak diangkat karena ke-Islamannya, dan dengan mewajibkan setiap pegawai negeri yang Muslim menyumbang antara Rp 50 dan Rp 1000 sebulan, Yayasan Amalbhakti Muslim Pancasila yang mencari dukungan umat Islam bagi sang presiden dengan "menyumbang" pembangunan mesjid di Indonesia dan Timor Leste, Suharto secara de facto telah memperlakukan Indonesia dan Timor Leste sebagai Negara Islam.

Ketigabelas, dengan dalih kerjasama antar anggota ASEAN, antar anggota APEC, antar Negara Selatan, dan antara Negara Islam, dan dengan dalih menangkis serangan kelompok-kelompok "anti-integrasi" di luar negeri, sebagian yayasan Suharto, khususnya Yayasan Tiara, Balai Indah, dan Kemusuk Somenggalan telah mengambil-alih tugas Departemen Luar Negeri RI, sambil memperkaya perusahaan yang berafiliasi ke yayasan-yayasan itu.

Keempatbelas, keterlibatan sejumlah panti asuhan Seroja dalam penculikan anak-anak yatim piatu Timor Leste, di mana identitas mereka sebagai anak Timor Leste yang beragama Katolik Roma sengaja berusaha dihilangkan (Tomas Alfredo Gandara, komunikasi pribadi, Juli & November 1997; Timor Leste , 15 Okt. 1997), berarti bahwa Suharto, sebagai pembina Yayasan Seroja yang membawahi panti-panti asuhan itu (Sinar Harapan, 16 Juni 1985), terlibat dalam salah satu bentuk genosida menurut Pasal (e) Konvensi Genosida 1948 (Kuper, 1981: 19).

Kelimabelas, ada indikasi bahwa salah satu yayasan keluargaSuharto, yakni Yayasan Harapan Kita lewat anak perusahaannya, PT Harapan Insani, telah terlibat dalam "pencucian uang" (money laundering) lewat Vanuatu. Tindak kriminal semacam ini, berada dalam wilayah kekuasaan Interpol, yang berhak secara sefihak melakukan investigasi. Kalau terbukti benar, ini dapat menurunkan derajat Kepala Negara Republik Indonesia menjadi seorang tokoh kriminal tingkat internasional, seperti Manuel Noriega, bekas "orang kuat" Panama yang kini mendekam dalam penjara di AS.

Pertanggungjawaban, Setelah Monopoli & Kartel Dihapus

Marilah kita sekarang meminta pertanggungjawaban para pemilik dan pengelola yayasan-yayasan itu kepada rakyat Indonesia, sebelum pembukuan hasil keuntungan monopoli gandum dan cengkeh serta kartel semen dan kayu lapis yang akan segera dibubarkan (?), lenyap bersama angin lalu.

Dalam hal cengkeh saja, misalnya, BPPC telah menumpuk Rp 2,3 trilyun dana hak petani selama 4 tahun. Jumlah kerugian petani itu berasal dari Dana Penyertaan petani di KUD sebesar Rp 2000 per kg, uang titipan petani di KUD sebesar Rp 1.900, serta penerimaan petani yang hilang akibat ketidak-efisienan tata niaga cengkeh selama masa kejayaan BPPC (1991-1996) sebesar Rp 541,6 milyar, lebih besar dari dana IDT setiap tahun (INDEF, 1997: ii).

Kita tentunya belum lupa bahwa hasil pemasukan SDSB, yang ikut dinikmati anak-anak Suharto – misalnya, membangun hotel berbintang lima Bali Cliff Resort seharga US$ 50 juta milik Sigit Harjojudanto di Bali (Aditjondro, 1995: 1-2; Loveard, 1996: 38) – , juga belum pernah dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Hal ini sekedar mengulangi peristiwa tahun 1985, di mana Sigit jugalah yang terlibat dalam penyelenggaraan Porkas, yang ditentang dengan keras oleh pemerintah daerah Sumatra Barat dan DPRD Jawa Barat atas dasar agama. Waktu itu, kritikan-kritikan terhadap Porkas sekedar dibungkam oleh pemerintah dengan dalih bahwa Porkas bukan judi (Shin, 1989: 248). Dan Sigit pun bebas meraih keuntungannya.

Selain menyangkut kekayaan Rakyat Indonesia dan Timor Leste yang dirampas oleh keluarga besar Suharto, pertanggungjawaban Suharto juga perlu dimintakan untuk berbagai dampak sosial dan politis, serta dampak ekonomis yang lain, sebagaimana diutarakan dalam bagian terdahulu.

❑ Puri Baru (Newcastle), 31 Januari 1998
(diperbaharui, 11 Maret 1998)

○ Ali Rustamaji ○

KORBAN DAN REKAYASA POLITIK

Indonesia saat ini berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan, seandainya tidak mendapat respon dari pemerintah (elit politik) dengan cepat dan arif mengatasi situasi caos ini, maka akan menggiring bangsa ini kepada kehancuran total.

Indonesia saat ini berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan, seandainya tidak mendapat respon dari pemerintah (elit politik) dengan cepat dan arif mengatasi situasi caos ini, maka akan menggiring bangsa ini kepada kehancuran total.

TUNTUTAN YANG SAMA DI TAHUN 70-AN

Bila kita tengok kebelakang pada era 70-an, kejadian saat ini identik dengan kejadian di tahun-tahun tersebut. Pada tahun 70-an juga muncul isu sentral mengenai korupsi diberbagai badan milik pemerintah yang menjadi sorotan mahasiswa hingga melahirkan berbagai demonstrasi.Bahkan isu kenaikan bensin juga bergulir, awal tahun 1970 mahasiswa UI yang tergabung dalam kelompok diskusi mengadakan gerakan menentang kenaikan bensin dan berantas korupsi dengan organisasi "Mahasiswa Bertanya". Gerakan ini cukup berhasil dalam mempengaruhi opini publik. Gerakan protes ini diikuti berbagai mahasiswa di daerah lain seperti Bandung dengan "Bandung Bertanya". Karena desakan semakin kuat pemerintah dengan segera membentuk "Komisi Empat" dengan fokus perhatian pada pemberantasan korupsi terutama di dua BUMN, Pertamina dan Bulog yang menjadi sorotan publik.

Aksi mahasiswa berlanjut hingga tahun 1973, walaupun sifatnya hanya sporadis saja, seperti Komite Kebanggaan Nasional (KKN), Gerakan Mahasiswa Indonesia untuk Rakyat Indonesia (Gemiri) dan berbagai aksi lainnya. Ini mengarah pada isu suksesi nasional, siapa kelak pengganti Suharto.Dan puncaknya timbul demonstrasi yang cukup menghebohkan karena terjadi kerusuhan besar dan huruhara pada tanggal 15 Januari 1974. Yang lebih dikenal dengan peristiwa Malari. Dalam aksi tersebut yang menjadi sasaran adalah produk-produk Jepang , terutama mobil dan barang elektronik.Namun aksi mahasiswa yang seolah-olah murni tersebut ternyata hanyalah rekayasa politik dari segelintir orang. Yang mempunyai ambisi dalam menduduki posisi paling kuat di republik ini, dengan melakukan berbagai trik politik, yaitu mengarahkan massa pada isue sentral sehingga membentu frame of reference. Dan akhirnya dengan mudah massa bertindak anarkhis. Jika keadaan caos telah terjadi, maka dengan mudah lawan politik merebut posisi kunci dalam pemerintahan. Namun ternyata waktu itu posisi Soeharto sudah cukup kuat sehingga perebutan kekuasan menjadi gagal. Tapi pintarnya Soeharto tidak bertindak gegabah, dengan halus Soeharto menggilas lawan-lawan politik yang berani menggoyang kedudukannya. Dengan kejadian itu, maka Soeharto memperoleh pengalaman yang sangat berharga demi kelangsungan kursinya, dengan membuat akar-akar kekuatan hingga tiga puluh tahun.

POLITIK PINJAM TANGAN

Ada hal yang perlu kita cermati berkenan dengan situasi saat ini, pergerakan massa yang telah mengarah pada anarkhi. Suatu kesimpulan bisa kita dapatkan dari pergerakan mahasiswa yang di teruskan pergerakan massa dengan tindakan brutalnya. Pertama, mereka benar-benar merasakan suatu kepedihan yang berlarut-larut. Diawali dengan situasi global yang tidak menguntungkan sehingga ribuan karyawan dan pekerja kena PHK. Dilanjutkan dengan naiknya kebutuhan pokok yang membumbung tinggi, dan terakhir dibakar dengan BBM yang naik cukup fantastis. Dengan keadaan yang demikian parah, maka massa pun melampiaskan kekesalan ketika ada kesempatan.Kedua, adanya tarik-menarik beberapa kutub yang mengarah pada suksesi nasional baik dengan terang-terang maupun tidak. Bagi yang punya massa untuk bargaining dengan pemerintah akan berani secara terus terang. Namun yang menjadi masalah adalah mereka yang tidak mempunyai massa tapi hanya mempunyai anak buah yang bisa diperintah, maka mereka akan menggunakan posisinya untuk menggoyang elit politik dengan menggunakan massa bahkan mahasiswa sekalipun.

Ini bisa kita lihat dari rangkaian peristiwa yang selama ini terjadi, contoh kecil adanya penculikan beberapa aktivis LSM. Menurut Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto tidak ada perintah penculikan, walaupun berbagai kalangan menyangsikan ucapannya itu atau sekedar kata-kata apologi saja. Namun bagi dunia politik hal apapun bisa saja terjadi,

adanya penculikan yang jelas ada dalangnya, minimal dari sistem penculikan yang dilakukan menunjukan sang penculik merupakan orang yang profesional bukan sembarang orang , dan menunjukan indikasi adanya perintah.

Kedua, adanya kekerasan di berbagai kampus ini bisa digerakan oleh orang-orang yang sengaja membuat suasana semakin panas dengan sasaran akhir mengoyang stabiltas elit yang berkuasa. Kalaupun tidak, aksi yang sudah panas dibuat lebih panas lagi, dengan membuat korban para demonstran. Ini bisa dilogika dimana dalam setiap demonstrasi mahasiswa, maka disekitar lokasi ditempatkan aparat guna mengamankan jalannya demo, baik yang berpakain dinas maupun preman atau yang tersembunyi sebagai penembak gelap para snipper. Dari sini bila terjadi dualisme komando maka hasilnya akan berbeda dari yang diinstruksikan pimpinan militer.

Jika dari pimpinan resmi ada komando dalam menghadapi mahasiswa bertindak persuasif, namun dilain pihak ada komando bagi personel tertentu agar demo tersebut diwarnai dengan kekerasan dengan jatuh korban, baik dengan luka parah ataupun sampai meninggal.Maka hasilnya sudah dapat dipastikan demonstrasi mahasiswa berakhir dengan keributan dan korban berjatuhan, walaupun para pemimpin militer yang terjun langsung mengamankan jalannya aksi tidak menginstruksikan untuk menembak, tapi ternyata ada korban jiwa berjatuhan yang jumlahnya cukup mengejutkan seperti dalam kasus di Universitas Tri Sakti. Ini pasti membuat pemberi komando menjadi pusing. Sehinga dengan segera para komando memberikan konfirmasi yang bersifat apologi, walaupun masyarakat sudah menduga aksi yang terjadi sebenarnya.

Dengan banyaknya korban maka suhu politik meningkat disertai pergolakan yang memanas. Dilain pihak rakyat akan bersimpati pada mahasiswa dan sebaliknya semakin tidak percaya pada eilt penguasa yang tidak bisa mengamankan situasi. Bahkan dunia internasional pun akan memberikan nilai merah pada pemerintah serta sanksi dan dikucilkan dalam pergaulan dunia internasional dengan tuduhan pelanggaran HAM. Kedudukan yang demikian akan memperlemah posisi elit. Situasi ini mempermudah untuk menggoyang elit politik bagi kubu-kubu yang menghendaki posisi elit seperti sekarang tanpa melibatkan diri secara langsung. Kemungkinan lain, kerusuhan yang terjadi yang diawali dari demo mahasiswa di seluruh tanah air direkayasa oleh elit politik dengan maksud mengkambing hitamkan gerakan mahasiswa. Dengan mengambil dalih demo mahasiswa akan menimbulkan kerusuhan maka elit bisa memberangus aksi mahasiswa, seperti kasus 27 Juli dimana aksi mahasiswa pasca itu mengalami stagnasi bahkan boleh dibilang tiarap. Namun perhitungan elit politik jika mengambil contoh kasus yang sama tentu akan salah. Karena akumulasi kemarahan masyarakat memang telah memuncak, sehingga masyarakat sudah tidak mempercayai segala tindakan elit penguasa saat ini, akhirnya menghantam mereka sendiri. Sehingga akibatnya cukup fatal dengan berakhirnya rezim penguasa yang lebih dikenal dengan orde baru.

Runtuhnya elit penguasa bukan berarti para oposan akan muncul begitu saja guna merebut posisi puncak. Mereka masih menunggu saat yang tepat dengan tidak menampakkan diri secara transparan, tentunya berusaha mengikuti aturan yang diinginkan masyarakat itu sendiri. Karena situasi yang serba belum pasti akan sulit untuk menjajaki kehendak rakyat yang sebenarnya dan merangkulnya untuk bergabung dalam kelompoknya.

Kita masih ingat ketika pengumuman para menteri kabinet pembanguna tujuh, bagitu diumumkan hampir semua menteri yang ditunjuk oleh presiden merasa bersuka cita dengan bertepuk tangan dari keluarganya. Mereka begitu lupa akan amanat yang akan dipikul. Ternyata memang benar kekeroposan kabinet tersebut yang diliputi koncoisme mengambil istilah Amin Rais

Apalagi akan banyak yang merebutkan posisi puncak yang lama terpendam, bisa mereka dari golongan-golongan yang selama ini tidak muncul atau telah dilarang oleh rezim yang berkuasa selama ini. Pengorbanan mahaswa memang tidak sia-sia demi suatu perubahan, dan akan dikenang oleh bangsa ini dikemudian hari. Namun pengorbanan tersebut semoga tidak merupakan tumbal dari segelintir orang yang tamak akan kekuasaan dan menjadi penguasa yang sama otoriternya walaupun dengan dalih yang bermacam-macam.

Kita masih ingat ketika pengumuman para menteri kabinet pembanguna tujuh, bagitu diumumkan hampir semua menteri yang ditunjuk oleh presiden merasa bersuka cita dengan bertepuk tangan dari keluarganya bahkan sebagian telah menyediakan hidangan bagi para wartawan dan kerabatnya. Mereka begitu lupa akan amanat yang akan dipikul. Ternyata memang benar kekeroposan kabinet tersebut yang diliputi koncoisme mengambil istilah Amin Rais. Lain dengan Abu bakar ketika mau diangkat jadi pemimpin tidak langsung bersyukur tapi malah beristigfar. Wallahu alam.❑

PULANG

BRONTO ARY SENO

Entah mengapa tiba-tiba saja aku malas menekuni hobiku selam ini. Tak bergairah kuliah, nove-novel masih tertumbuk di meja tak terbaca, jarang mengarang novel dan cerpen, dan aku hanya bisa diam, namun kadang masih tersenyum dengan teman, itupun sekedar menutupi apa yang kurasakan saat ini. Yang jelas dalam benakku hanya terpikir untuk pulang, pulang, dan terus pulang. Tak lebih dan tak kurang itulah yang aku inginkan saat ini. Bahkan dalam hatiku berbisik, aku tak ingin kembali lagi ke tempat ini. Ah....., entahlah. Siang itu aku sudah tidak sabar lagi menanti saat berakhirnya kuliah hari itu. Aku lebih banyak melamun dan tak menyapa satu ilmupun yang dikuliahkan dosenku. Cepatlah selesai dan pulang. Itulah sisa-sisa permintaanku di saat yang membosankan waktu itu.

Kehidupan kampus yang begitu komplek, menuntutku untuk bersikap tegas dan berprinsip. Karena aku harus menghadapi orang-orang yang beragam karakter. Kadang aku menjumpai seseorang yang biasa-biasa saja, ya seperti halnya aku ini. Sibuk sendiri dengan kuliahku tanpa menghibur diri dengan kegiatan di luar kampus, seperti ikut teater kampus, aktiv dalam dunia pers kampus, masuk senat mahasiswa dan beragam aktivitas lainnya. Kalau aku menghadapi orang yang demikian, maka aku akan mudah menempatkan diri dalam hati mereka. Aku bisa mengambil hati mereka untuk bercanda, berbagi pengalaman dan bahkan berani mengungkapkan hal-hal yang sifatnya pribadi sekalipun. Namun di lain situasi aku juga mengenal karakter yang berbeda jauh dengan yang aku paparkan di atas. Totok, dia pemudn yang baru aku selami isi hatinya. Orangnya tidak banyak omong, terkesan berwibawa dengan pancaran mata yang boleh dikagumi banyak gadis-gadis kampus, tenang dari yang jelas ia adalah mahasiswa yang bisa menempatkan diri dimanapun ia berada. Dengan teman-teman seprogram dia oke, dengan mahasiswa luar ia banyak dikenal, dan dengan dosenpun ia tak segan-segan bergaul. Kemudian aku juga mengenal Fajar, pemuda gondrong, produk era modern, selalu mnyelipkan batang rokok di sela-sela jarinya, dan yang paling kentara ia sering dikerubuti gadis-gadis manis. Wajar memang, Fajar pemuda ganteng, pandai main gitar, periang, dan tatapan matanya yang konon mampu meluluhkan hati setiap wanita. Maka tak heran kalau ia mendapat julukan mahasiswa pengoleksi wanita. Dan masih banyaka lagi karakter-karakter yang tersembunyi yang belum aku selami lebih dalam lagi.

Entah mengapa tiba-tiba saja aku malas menekuni hobiku selam ini. Tak bergairah kuliah,

nove-novel masih tertumbuk di meja tak terbaca, jarang mengarang novel dan cerpen, dan aku hanya bisa diam, namun kadang masih tersenyum dengan teman, itupun sekedar menutupi apa yang kurasakan saat ini. Yang jelas dalam benakku hanya terpikir untuk pulang, pulang, dan terus pulang. Tak lebih dan tak kurang itulah yang aku inginkan saat ini. Bahkan dalam hatiku berbisik, aku tak ingin kembali lagi ke tempat ini. Ah....., entahlah. Siang itu aku sudah tidak sabar lagi menanti saat berakhirnya kuliah hari itu. Aku lebih banyak melamun dan tak menyapa satu ilmupun yang dikuliahkan dosenku. Cepatlah selesai dan pulang. Itulah sisa-sisa permintaanku di saat yang membosankan waktu itu.

"Kamu jadi pulang hari ini, Ratri?" tanya ibu kost siang itu.

"Iya, Bu."jawabku tanpa basa-basi.

"Lho, kan baru minggu kemarin pulang, masak belum satu minggu sudah pulang lagi."

"Entahlah, Bu."jawabku tan[pa beralasan.

"Kangen ya dengan kampung halaman. Atau mungkin........rindu dengan seseorang?"selidik ibu kostku.

"Sudah ya Bu, saya mohon diri dulu, salam kagem Bapak." Jawabku tanpa memperdulikan pertanyaan beliau yang bertubi-tubi

Matahari kian panas menyengat, debu-debu berhamburan mengusik perasaanku, asap hitam menyebar mengganggu pernafasanku. Sesak dan aku terbatuk-batuk, namun tak lama. Aku melangkah menyusuri trotoar Jl. Ir. Soetami menuju ke halte bus depan boulevard UNS. Pandanganku tertuju satu arah, yaitu arah timur. Dari arah tersebut akan meluncur bus yang akan membawaku ke Terminal Tirtonadi. Sebenarnya ada juga bus jurusan Surabaya-Yogya yang bisa langsung membawaku ke tujuan. Tapi entahlah, pokoknya aku harus ke terminal dulu. Tak lama dari arah timur meluncur deras bus besar ke arah tempat dudukku menunggu."Minal, minal, terminal mBak!" teriak kernet bus tersebut menjajakan dagangannya. Tanpa ragu aku berdiri dan memasuki tangga pintu masuk ke dalam bus.

Suasana terminal siang itu tak beda jauh dengan suasana dalam hatiku. Riuh, gemuruh, gersang, penuh dengan gejolak, dan entah apa lagi yang kurasakan. Yang jelas hatiku mulai menyatu dengan keadaan terminal Tirtonadi siang itu. Mungkin dengan alasan seperti ini, sehingga nuraniku mengajak tubuhku untuk singgah ke terminal dulu dan bukan langsung ke Yogya. Mungkin hanya sekedar memadukan suasana yang seragam. Aku lapar dan haus. Segera kakiku membawa kepala, tangan, dan perutku menuju ke warung makan sesampainya di terminal Tirtonadi.

Sampai di Yogya aku membawa oleh-oleh setumpuk persoalan, sebungkus penyesalan dan seikat keraguan. Aku telah pulang Bapak Ibu tercinta. Sambut aku dalam peluk kasihmu, dan singkirkan segala aral melintang yang menghalangi setiap langkahku. Itulah yang menjadi pembicaraan serpihan-serpihan hatiku yang ingin berunjuk rasa.

"Lho, belum satu bulan sudah kembali lagi?" sambut ibu dengan senyuman lepasnya.

"Bapak mana, Bu. Kok tidak kelihatan?" aku malah balik bertanya tanpa menjawab pertanyaan ibu terlebih dahulu.

"Lho, ditanya kok malah ganti bertanya. Bagaimana to kamu itu?"

"Entahlah, Bu. Aku hanya ingin berkumpul dengan keluarga."

"Ya sudah, sana istirahat, mungkin kamu letih."

Terasa sulit bagiku untuk memejamkan mata. Segala persoalan silih berganti bermain dalam alam pikiranku. Tentang nilai semesteran yang selalu menurun, belum lagi masalah si Gondrong sialan yang selalu mengusik hatiku, tambahan semprotan dari PA-ku belum lama ini, ah mengapa rasanya semua masalah selalu menimpa diriku. Lebih baik aku bertapa di sini, mudah-mudahan perasaanku menjadi lebih enak dengan mengendapnya persoalanku. Kulihat ada tape recorder di sudut kamar, mungkin kakak yang meletakkannya. Aku bangkit dan kunyalakan, karena masih ada kaset di dalamnya. Volume aku besarkan. Jelas terdengar olehku suara Katon Bagaskara melantunkan "Yogyakarta". Namun lagu tersebut ternyata hampir habis, mungkin tadi sempat dinyalakan kakak namun belum selesai keburu dia tinggal pergi. Kira-kira masih bait terakhir, begini kira-kira bunyinya : Walau kini kau t'lah tiada tak kembali. Namun kotamu hadirkan senyummu abadi. Ijinkanlah aku

untuk s'lalu pulang lagi. Bila hati mulai sepi tak terobati......... Perlahan air mataku luluh dan sirna meresap ke dalam pori-pori bantal. Sejuta kenangan mengembang di pelupuk mata. Yogyakarta memang penuh warna dan cerita. Dimana kini mereka semua berada? Oh, Tuhan, rasanya aku selalu dihantui perasaan-perasaan yang tak menentu. Aku kira aku akan tenang bila sudah berada di rumah, namun ternyata aku malah ditikam seribu kenangan. Aku bertanya pada diriku yang terpampang di dalam bingkai foto," Apa bedanya aku pulang ke Yogya dan tinggan di Solo?"

Sepintas memang sama saja, banyak persoalan. Namun bila aku renungkan lebih jauh lagi, ada satu perbedaan yang menjadi biangnya. Kalau aku berada di Yogya berarti aku akan hidup bersama kenangan masa laluku. Namun bila aku tinggal di Solo, seribu tantangan menghadang langkahku. Aku harus berhadapan dengan pesona si Gondrong, belajar dsan terus harus belajar, membiarkan diri terkurung di kamar berkutat dengan segala macam teori dan sebagainya, dan juga harus berpikir tentang pengeluaran ahrian yang semakin mencekik leher. Aku harus mampu memutuskan dan memilih satu di antara mereka. Pilih hidup dengan kenangan-kenangan masa lalu atau hidup menghadapi tantangan. Tanpa sengaja mataku menatap pada bingkai foto Bapak di dinding, tiba-tiba aku teringat naihatnya waktu melepasku kuliah di Solo. Anak muda harus berjiwa besar dan sanggup menghadapi tantangan sesulit apapun. Sederhana namun begitu dalam maknanya, dan dalam pul amenghujam sanubariku. Bapak, terimakasih telah menyadarkan diriku. Besok pagi aku akan kembali dan menghadapi seribu tantangan yang sudah menantiku.

"Pagi-pagi kok sudah mandi to nduk, ada janjian sama teman ya?"

"Tidak kok Bu, saya akan kembali ke Solo".

"Lho, lho, piye to, baru semalam kok sudah balik lagi".

"Bapak mana, Bu?"

"Masih tidur".

"Sampaikan pada Bapak kalau saya selalu menuruti nasihat-nasihatnya".

Sejak kedatanganku hari itu, ibu jadi tak habis mengerti. Apa sebenarnya yang telah terjadi pada putri bungsunya ini. Namun ibu tak pernah mendesakku untuk menumpahkan segala masalahku. Aku sudah besar dan tahu mana yang baik dan mana yang buruk, dan tak mungkin aku salah langkah. Sejak semula tujuanku hanya satu, yaitu menyelesaikan kuliah. Karena yang menentukan kehidupanku kelak adalah segala keputusan yang diambil dengan akal sehat. Aku telah lepas dari pelukan ibu, dan sampai saat inipun ibu belum tahu bagaimana kehidupan anaknya di rantau. ❑

BUDAYA INTELEKTUAL MAHASISWA : SUATU IMPIAN

apatisme mahasiswa tidak lahir begitu saja, tetapi ia lahir dari kondisi yang tercipta. Sebaliknya sikap kritis mahasiswa pun sama. "Kekritisan muncul dan lahir ditengah-tengah mahasiswa tidak seketika, tetapi ada proses yang dilalui"

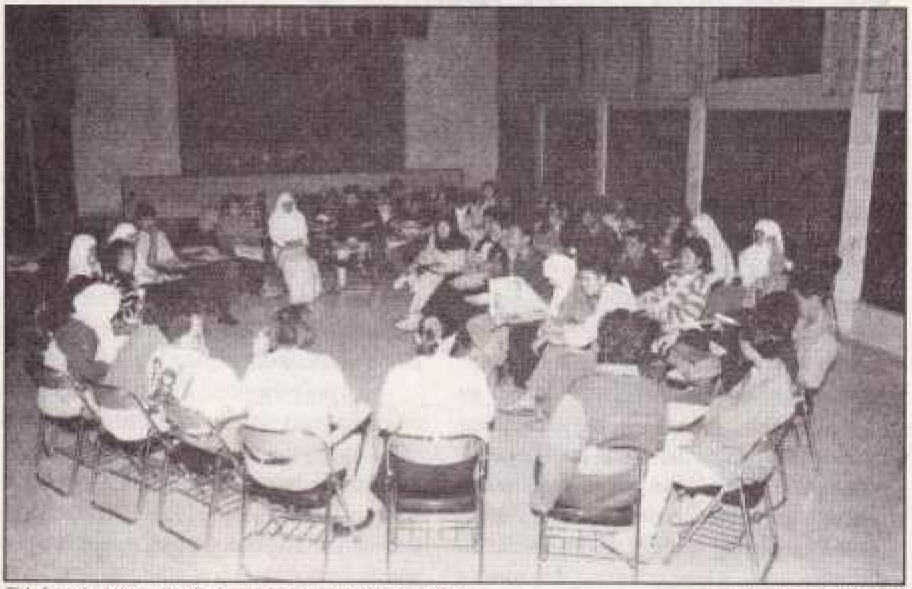

Diskusi mengasah ketajaman intelektual Foto:Dok.kentingan

Kampus sebagai institusi ilmiah, senantiasa diharapkan melahirkan manusia-manusia yang unggul, terdidik, bermartabat, dan memiliki kepekaan nurani yang tajam dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Harapan ini sangatlah beralasan mengingat kampus merupakan tempat pendidikan tertinggi, tempatnya para calon-calon pemimpin bangsa belajar. Sama halnya dengan UNS, sebagai perguruan tinggi yang memiliki lebih dari tujuh belas ribu mahasiswa, dari sanalah diharapkan calon-calon pemimpin bangsa yang benar-benar memperjuangkan rakyat lahir. Namun, dalam usianya yang hampir seperempat abad ternyata disadari banyak kalangan belum mampu menghasilkan mahasiswa yang kritis. Bahkan yang nampak selama ini adalah kecenderungan mahasiswa yang menunjukkan sikap masa bodoh, hedonis bahkan lebih kepada bermental budak yang terwujud ke dalam budaya bisu.

Budaya Intelektual Mahasiswa UNS: mandeg ?

Sikap masa bodoh, atau sering kita sebut apatis yang nampak begitu menonjol di kalangan mahasiswa menjadi satu indikator memudarnya budaya intelektual, di samping sedikitnya kegiatan penalaran seperti diskusi maupun seminar. Hal ini dikemukakan Vera Kartika Giantari, karena beranggapan bahwa intelektulitas mahasiswa tidak hanya diukur dari pandainya dia menghafal materi kuliah, tetapi yaag lebih esensial adalah bagaimana mahasiswa itu mampu merespon setiap fenomena yang terjadi. Hal serupa juga diungkap Barley Abdul Halim, aktivis Kelompok Studi Mangkubumen, "Ketika ruang-ruang dialog, baik itu dalam perkuliahan maupun dalam diskusi sudah tidak ada, berarti intelktualitas kaum akademisi dipertanyakan." Namun anggapan akan apatis dan hedonisnya mahasiswa UNS ini dibantah dr. Ambar Mudigdo DSPA. Menurutnya anggapan tersebut sangatlah relatif, dan tidak 100 % benar, karena masih banyak mahasiswa yang kritis, responsif terhadap perkembangan sosial yang ada meskipun ia sadar bahwa tugas utamanya adalah mempersiapkan diri untuk bekal bekal berperan di masyarakat nantinya. "Kenyataanya, masih banyak mahasiswa yang kritis, persoalan eksplosif atau tidak itu tergantung mahasiswanya,"bantahnya. Memang harus diakui bahwa masih ada mahasiswa yang kritis, namun jumlahnya sangat tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa yang cenderung apatis dan hedonis. Sehingga wajar jika kemudian muncul anggapan mandeg atau memudarnya budaya intelektual mahasiswa, seperti diungkapkan Agung Cahyo Nugraha, " Masih jauh, karena ruang dialog antara mahsiswa dan dosen masih sedikit."

Sementara itu, M. Yulianto alumni FISIP yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Badko HMI Jawa Bagian Tengah menyebutkan bahwa apatisnya mahasiswa ini karena terkondisikan oleh situasi. Menurutnya, mahasiswa sekarang dilahirkan di tengah isme yang begitu banyak, dan materialisme lah yang paling menonjol, karenanya sebagian besar mahasiswa hanya mau enaknya, individualis serta yang paling parah,mereka hanya mengejar nilai, tidak perduli lagi dengan kondisi lingkungannya. Hal senada diungkapkan Agung, Mahasiswa Komunikasi FISIP angkatan 93, "Kawan-kawan mahasiswa terkungkung pada formalitas, study oriented." Padahal ilmu itu harus dikontektualisasikan dengan situasi dan kondisi yang ada, sehingga mahasiswa benar-benar menjadi manusia yang intekctual, menguasai disiplin ilmunya secara mendalam, tanggap dan kritis terhadap kondisi yang terjadi, tambah Ketua BPM ini.

Di samping itu, memudarnya budaya intelektual ini bisa dilihat dari sedikitnya kegiatan-kegiatan yang bersifat penalaran seperti diskusi ataupun seminar yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga kemahasiswaan baik di tingkat fakultas, maupun UKM di tingkat universitas. Diskusi, seminar atau kegiatan lain yang bersifat penalaran dirasa sangat perlu untuk memperdalam ilmu yang disampaikan dosen melalui kuliah, sekaligus mengkritisi fenomena yang ada dengan disiplin ilmunya. Namun pernyataan ini dibantah oleh Ambar, karena menurutnya itu semua kembali ke mahasiswa, kesempatan sudah diberikan, agar mahasiswa dapat menuangkan ide-idenya melalui jalur yang ada baik yang formal maupun yang tidak

formal. Namun nampaknya hal ini kurang mendapat respon dari mahasiswa. Pembantu Rektor I ini lebih jauh menjelaskan bahwa kegiatan mahasiswa yang bersifat intelektual, seperti diskusi, seminar dan kegiatan penalaran lainnya sangat terkait dengan disiplin ilmu yang ditekuni mahasiswa. Ambar menambahkan, " Memang untuk masalah-masalah seperti itu (diskusi/seminar, red.) lebih banyak disukai mahasiswa bidang ilmu sosial politik, sastra, hukum, dan KIP." Lain halnya dengan mahasiswa yang menekuni ilmu-ilmu eksak, mereka cenderung disibukkan dengan kuliah dan tugas-tugas, sehingga wajar kalau mereka tidak begitu tertarik dengan kegiatan-kegiatan penalaran tersebut.

Menurut M. Yulianto yang juga mantan Pemimpin Umum Majalah VISI FISIP ini, belenggu teknokratis dan pragmatis inilah yang mematikan budaya intelektual mahasiswa, karena mahasiswa hanya berpikir akan dirinya sendiri, kepentingannya, sehingga beranggapan bahwa perkuliahan yang diikuti tak lebih hanyalah untuk bekal mencari kerja semata. "Karena dilahirkan di tengah-tengah budaya materialis, teknokratis, mereka cenderung mau enaknya saja, bahkan sering cari jalan pintas termasuk untuk urusan nilai," tambahnya. Nampaknya kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa kegiatan-kegiatan penalaran, seperti diskusi hanyalah menjadi monopoli mahasiswa ilmu-ilmu sosial, karena merekalah yang menggeluti ilmu tersebut. Nampaknya inilah yang mesti dirubah!

Birokrat Kampus Tidak Mendukung

Sikap masa bodoh dan bisu tak bisa dilepaskan dari peran setiap elemen yang ada di dalam perguruan tinggi, tidak terkecuali peran para pengambil kebijakan baik itu rektor maupun dekanat. Di samping itu, apatisme mahasiswa tidak lahir begitu saja, tetapi ia lahir dari kondisi yang tercipta. Sebaliknya sikap kritis mahasiswa pun sama. "Kekritisan muncul dan lahir ditengah-tengah mahasiswa tidak seketika, tetapi ada proses yang dilalui. Dalam proses inilah semua elemen civitas akademika terlibat," ungkap Vera.

Menyinggung peran Birokrat Kampus baik itu dosen maupun rektorat melalui kebijakannya, Agung yang akrab dipanggil Siemen menyatakan bahwa peran mereka masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini bisa dilihat dari kurangnya ruang dialog antara mahasiswa dengan dosen di perkuliahan, sehingga perkuliahan terkesan monolog, tidak ada partisipasi dari mahasiswa terhadap suatu permasalahan. Seharusnya dosen harus bisa memberi nuansa intelektual yang tinggi, dengan membuka ruang dialog dengan mahasiswa, karenanya dosen harus mempunyai wacana intelektual yang tinggi yang siap ditransformasikan kepada mahasiswa. Dominasi dosen dalam perkuliahan ini menimbulkan kebosanan tersendiri bagi sebagian mahasiswa yang ingin aktif. Lebih jauh menurut Vera, kondisi perkuliahan yang monolog ini lebih disebabkan pada tidak adanya rangsangan dari dosen itu sendiri, baik dalam bentuk dialog pada saat perkuliahan

perguruan tinggi, diharapkan melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan melahirkan robot-robot bernyawa yang mau enaknya saja

berlangsung maupun dalam pertanyaan-pertanyaan saat ujian. Malah yang terjadi pertanyaan-pertanyaan dalam ujian (khususnya disiplin ilmu sosial, Red.) cenderung mendorong mahasiswa untuk menghafal materi yang diberikan untuk menjawabnya. Bukan bagaimana pertanyaan itu disusun dengan mengkontekstualkan kondisi yang sedang terjadi. Sehingga mahasiswa hanya berorientasi pada nilai, bukan pada pendalaman ilmu itu sendiri. Inilah yang kemudian sering disebut sebagai mental budak.

Bagaimana dengan peran lembaga kemahasiswaan yang ada dalam ikut serta menciptakan iklim yang kondusif sehingga budaya intelektual dapat terwujud ? Menurut Ketua Senat fakultas hukum ini, keterlibatan Lembaga Kemahasiswaan khususnya senat adalah malalui program kerja yang ditawarkan agar sedapat mungkin memberi wadah bagi mahasiswa mengembangkan intelektualitasnya. Sama halnya dengan UKM, sebagai wadah kegiatan mahasiswa harus turut serta memberi wadah yang seluas-luasnya bagi pengembangan intelektual mahasiswa, karena UKM dipilih mahasiswa sebagai tempat berlatih diri, terutama bidang penalaran.

Lalu harus bagaimana untuk merubah kondisi yang sudah sedemikian parah ini agar apa yang menjadi harapan masyarakat tidak hanya menjadi impian belaka ? Pertanyaan ini tidak akan pernah terjawab selama mahasiswa masih terbelenggu oleh persepsi bahwa nilai adalah tujuan akhir dari kuliah yang diikuti. Oleh karenanya perlu adanya gerakan penyadaran untuk membangun budaya intelektual yang melibatkan semua elemen. Sehingga tujuan pendidikan dapat benar-benar terwujud.

Menurut Vera, satu-satunya wanita yang menjadi ketua senat di UNS ini, harus ada gerakan penyadaran dari semua sektor tanpa terkecuali. "Untuk membangun kultur intelektual, harus dari semua sektor, dan benar-benar sampai ke grass root," paparnya. Hal ini sanagtlah beralasan, mengingat selama ini kegiatan-kagiatan yang bersifat penalaran sebagai cikal bakal budaya intelektual hanya menjadi rutinitas segelintir mahasiswa saja.

Akhirnya semua kembali kepada kita selaku civitas akademika untuk membangun kultur intelektual yang selama ini menjadi trade mark suatu perguruan tinggi, yang dari sinilah diharapkan pemimpin-pemimpin bangsa yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat lahir, bukan sebaliknya melahirkan robot-robot bernyawa yang mau enaknya saja, sehingga mau mencari jalan pintas bahkan melacurkan intelektuaitasnya demi kepentingan sesaat.

❑ Teguh/Ita

○ JAJAK PENDAPAT ○

BUDAYA INTELEKTUAL MAHASISWA UNS

Perspektif penajaman visi dan daya pikir mahasiswa hendaknya tidak hanya terpaku pada disiplin ilmunya saja. Kenyataan menunjukkan bahwa lapangan atau medan yang akan digeluti mahasiswa selepas dia dari institusi pendidikan tingginya tidak ada jaminan kesesuaian denga disiplin ilmunya.

Kegiatan intelektual bagi mahasiswa tidak hanya sebatas pada saat kuliah, tatap muka dengan dosen ataupun kegiatan praktikum di laboratorium. Perspektif penajaman visi dan daya pikir mahasiswa hendaknya tidak hanya terpaku pada disiplin ilmunya saja. Kenyataan menunjukkan bahwa lapangan atau medan yang akan digeluti mahasiswa selepas dia dari institusi pendidikan tingginya tidak ada jaminan kesesuaian denga disiplin ilmunya. Kegiatan yang bersifat penalaran, penajaman daya pikir dengan perspektif dan cara pandang yang beragam adalah salah satu cara membentuk kesiapan mahasiswa menghadapi persaingan selepas dia nantinya dari bangku kuliah. Untuk itulah disini akan digali bagaimana sesungguhnya minat mahasiswa UNS terhadap kegiatan yang bersifat penalaran dengan mengabaikan batasan disiplin ilmu dan berupaya untuk membentuk kualitas manusia yang terbuka dan siap menerima segala sudut pandang yang berbeda dengan disiplin ilmunya.

Jajak pendapat mengenai budaya intelektual mahasiswa UNS difokuskan pada berbagai angkatan dan berbagai fakultas. Perhitungan jajak pendapat ini dengan menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan sampel secara random. Dalam penyuguhannya , sampel yang digunakan sebanyak 100 mahasiswa dengan proporsi setiap fakultas 10 % kecuali pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang mendapatkan porsi 20 % dikarenakan jumlah mahasiswanya dua kali lebih besar dari fakultas-fakultas yang lainnya . Jumlah pengambilan sampel ini memang sangat kecil sekali dibandingkan dengan jumlah mahasiswa UNS yang sesungguhnya pada tahun ajaran ini. Faktor yang sangat menjadi pembatas dalam keterbatasan ini adalah semata-mata karena faktor pendanaan, sehingga akan sangat membatasi ruang gerak penelitian yang dilakukan.

Dari hasil perhitungan, 100 buah sampel yang dapat kembali dan terisi hanya 95 % dari jumlah sampel atau sebanyak 95 buah, sehingga sampel yang tidak kembali ataupun kembali tetapi tidak terisi sebanyak 5 % atau 5 buah. Proporsi secara lengkap dapat dilihat pada tabel 1, berikut ini :

Tabel 1:

Proporsi pengembalian data dari pelbagai fakultas:

	FS	FISIP	FE	FH	FKIP	FK	FP	FT	FMIPA	TOTAL
Kembali	10	7	10	10	20	10	9	9	10	95
Tidak kembali	0	3	0	0	0	0	1	1	0	5
TOTAL										100

Dari 95% isian yang kembali tersebut, yang aktif dalam kegiatan SMF/BPMF sebanyak 14% atau 13 responden, aktif dalam kegiatan UKM 32 % atau 30 responden, sedangkan yang aktif di organisasi ekstra 11 % atau 11 , aktif dalam kegiatan yang lain 32 % atau 30 responden dan selebihnya 11 tidak aktif dalam kegiatan manapun.

Tabel 2

Proporsi Aktifitas Responden di Kampus:

AKTIVITAS MAHASISWA	*PROPORSI*
SMF/BPMF	14
UKM	32
Organisasi Ekstra	11
Tidak memiliki	11
Lain-lain	32
Total	100

Sedangkan berdasarkan angkatan tahun masuk, adalah cukup beragam dan mewakili berbagai angkatan. 5 % atau 5 responden mewakili angkatan '97, 28 % atau 26 responden mewakili angkatan '96, 34 % atau 32 responden mewakili angkatan 95, 20 % atau 18 responden mewakili angkatan '94, 13 % atau 12 responden mewakili angkatan '93 keatas. Dengan beragamnya angkatan tahun masuk , hasil cacak pendapat ini cukup mewakili perbedaan pemikiran berdasarkan pengalaman lamanya studi di UNS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3

Proporsi Angkatan Tahun Masuk Mahasiswa di UNS

TAHUN MASUK	PROPORSI
1997	5
1996	28
1995	34
1994	20
1993 keatas	13
Total	100

Dengan beragamnya aktivitas mahasiswa dan terwakilinya angkatan tahun masuk tetap keduanya tidak dapat lepas dari keterkaitan dengan keberadaan kegiatan penalaran. Kegiatan penalaran merupakan salah satu aktifitas yang menjadi hak mahasiswa.Kegiatan penalaran yang dimaksud antara lain seperti diskusi ilmiah, seminar, ataupun berupa penelitian. Walaupun merupakan hak setiap mahasiswa, namun tidak setiap mahasiswa mempunyai tingkat kesukaan yang sama. Dari jajak pendapat didapatkan 80 % atau 76 responden menyukai kegiatan ini dan hanya 20 % atau 19 responden saja yang tidak menggunakan haknya.

Tabel 4
Proporsi Tingkat Kesukaan Responden Terhadap Kegiatan Penalaran

TINGKAT KESUKAAN	PROPORSI
Suka	80
Tidak Suka	20
Total	100

Masalah keaktifan terlibat dalam kegiatan penalaran yang merupakan kesempatan emas untuk mengembangkan diri, hanya 81 % atau 47 responden saja yang menggunakan kesempatan ini, 19 % lainnya atau 18 responden tidak ambil bagian dalam kegiatan demikian.

Tabel 5
Proporsi Keterlibatan Mahasiswa dalam Kegiatan Penalaran

KETERLIBATAN MAHASISWA	PROPORSI
Aktif Terlibat	81
Pasif	19
Total	100

Dari 81 % responden yang ikut terlibat dalam kegiatan penalaran tersebut, hal yang mendorong untuk aktif dan berkiprah didalamnya ada banyak hal yang menjadi motivatornya. Sebanyak 22 % atau 22 responden beranggapan bahwa adanya kegiatan penalaran ini berhubungan dengan nilai akademis, 41 % atau 40 responden beranggapan karena kegiatan ini mengangkat isyu baru, aktual dan menarik untuk dikaji, 4 % atau 4 responden beranggapan adanya kegiatan ini dapat memberikan keuntungan ekonomis dan selebihnya 15 % atau 15 responden beranggapan hanya sekedar mengisi waktu luang.

Tabel 6
Proporsi Motifasi Keterlibatan Mahasiswa

MOTIVASI KETERLIBATAN	PROPORSI
Berhubungan dengan nilai akademis	22
Bersifat Aktual dan Menarik	40
Mendapat Keuntungan Ekonomis	4
Sekedar mengisi Waktu Luang	15
Total	80

Sedangkan bagi 19 % responden yang tidak ikut andil dalam kegiatan penalaran menyatakan rasa keengganannya dikarenakan banyak sebab. Sebanyak 6 % atau 6 beranggapan karena kegiatan penalaran tersebut tidak berhubungan dengan nilai akademis dan 13 % atau 12 lainnya menyatakan keengganan mereka karena tidak mempunyai waktu luang untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

Tabel 7
Proporsi Penyebab Kepasifan

PENYEBAB KEPASIFAN	PROPORSI
Tidak Berhubungan dengan Studi	6
Tidak ada Waktu	13
Total	19

Kegiatan penalaran memang merupakan hak mahasiswa dimana keberlangsungannya semata-mata tidak hanya tergantung dari keaktifan mahasiswa saja tapi juga pada ada tidaknya wadah dan dana. Sehingga keberadaan kegiatan penalaran ini sangat membutuhkan dukungan dari pihak fakultas maupun universitas. Dari hasil jajak pendapat 40 % atau 38 responden menyatakan pihak rektorat maupun fakultas sepenuhnya mendukung kegiatan penalaran, 2 % atau 2 responden menyatakan kurang mendukung, 39 % atau 39 responden menyatakan tidak ada dukungan dari pihak fakultas ataupun universitas dan selebihnya 19 % atau 19 responden tidak tahu menahu dalam permasalahan ini karena ketidakaktifan mereka dalam kegiatan ini.

Tabel 8
Peran Rektorat atau Fakultas (Birokrat Kampus) Dalam Kegiatan Penalaran

DUKUNGAN BIROKRAT KAMPUS	PROPORSI
Sepenuhnya mendukung	38
Kurang Mendukung	2
Tidak Mendukung	39
Tidak Tahu	19
Total	95

Dalam perjalanannya mahasiswa meruakan masyarakat intelektual yang senantiasa mengikuti kegiatan aktual dan respek dengan kegiatan tersebut. Dalam masalah ketertarikan dalam permasalahan nasional yang sedang aktual, 94 % atau 89 mahasiswa menyatakan senantiasa tertarik dan hanya 6 % atau 6 saja yang tidak mempunyai ketertarikan dalam permasalahan ini.

Tabel 9
Proporsi Ketertarikan Permasalahan Aktual

KETERTARIKAN	PROPORSI
Tertarik	94
Tidak	6
Total	100

Rasa tertarik terhadap permasalahan nasional yang sedang aktual tidak akan berhenti disini saja. Sebanyak 85 % atau .81 responden melanjutkan rasa ketertarikan ini dengan mendiskusikannya lebih lanjut, baik dengan dosen, teman sendiri ataupun dalam suatu kelompok diskusi. Sedangkan 7 % atau 7 responden tidak melanjutkan ketertarikan ini atau dalam suatu 'tanda tanya besar' atau masa bodo.

Tabel 10
Proporsi Mendiskusikan Lebih Lanjut

BERDISKUSI	PROPORSI
Ya	85
Tidak	7
Total	94

Mengapa ada mahasiswa yang tidak tertarik dalam permasalahan nasional yang aktual, disebabkan karena permasalahan tersebut tidak berkaitan dengan studi yang dipelajari (70 % atau 4 responden dari 6 responden yang menyatakan tidak tertarik) dan selebihnya beralasan lain-lain (30 % atau 2 responden dari 6 responden yang menyatakan tidak tertarik). ❑

Nurul HW dan tim litbang

Menengok Budaya Bangsa : MAKANAN KHAS KOTA BERSERI

Makanan khas Solo yang ternyata sangat beragam merupakan salah satu kekayaan Kota Berseri ini yang bila dipasarkan secara baik akan dapa menjadi salah satu andalan pariwisata daerah. Hanya yang perlu mendapat perhatian serius adalah dalam teknik penyajian yang memang pada tahap inilah makanan berinteraksi dengan pembelinya. Penyajian yang baik, yang memperhatikan segi kesehatan, nilai gizi, serta kebersihannya adalah syarat mutlak bagi eksistensi makanan khas tersebut di benak para konsumennya.

Mengenal citra dan budaya daerah adalah salah satu cara untuk lebih mendalami kekhasan budaya khatulistiwa. Citra dan budaya daerah ini banyak sekali diantaranya adanya makanan khas daerah. Di kota Berseri ini, festival-festival makanan khas Solo sering diadakan untuk mengingatkan generasi muda dan generasi tua. Juga untuk menarik wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Jenis makanan apa saja yang berasal dari kota Berseri ini, maka kami tim Kentrung mencoba untuk meraba, mencari, dan merasakan kenikmatan makanan asli Solo.

Pada dasarnya makanan asli kota Berseri ada beragam jenisnya, ada yang berupa makanan berat, makanan ringan atau yang lebih dikenal dengan 'jajan pasar', dan jenis lauk pauk. Nasi liwet, nasi tumpang, nasi thengkleng, Timlo Solo, gado-gado termasuk dalam kelompok makanan berat. Klepon, cenil, srabi, gempol pleret, es gempol, intip goreng (karak) termasuk dalam jenis makanan ringan atau jajan pasar. Sedangkan yang termasuk lauk-pauk diantaranya adalah tempe dan tahu bacem dan cabuk rambak. Yang sempat tersebut diatas hanya sebagian kecil dari makanan khas Solo, yang sampai saat ini masih ada.

Sebagian besar dari masyarakat Solo dan sekitarnya pasti kenal nasi liwet, karena jenis nasi ini termasuk nasi yang merakyat, yang disukai oleh beragam kalangan baik kalangan bawah, menengah maupun atas. Kalau dilihat dari segi gizi, nasi liwet ini sangatlah bergizi dan banyak mengandung kalori, ungkap Pak Isdaru , salah seorang staff Hotel Sahid Raya ketika ditemui Kentingan. Kaya akan kalori karena pembuatan nasinya menggunakan air santan dan agar aroma lebih gurih ditambah dengan daun salam, dan lauknya pun beragam yang terdiri dari daging ayam, telur rebus atau telur kukus, areh/sari santan yang berwarna putih dan sayurnya sayur sambal goreng yang dapat berbahan dari labu siam atau pepaya mentah. Sedangkan pada beberapa tempat sebagaimana di hotel Sahid Raya dalam penyajiannya disertakan lauk tambahan berupa tahu, tempe yang direndang dan lauk kering lainnya.

Timlo Solo terkenal karena kekhasan cita rasa kuahnya dan cara penyajiannya. Dari penampilannya, kuah timlo berwarna jernih, tidak keruh sebagaimanan kuah soto. Ada rasa cengkeh dan rasa bumbu dapur lainnya. Dalam penyajian antara nasi dan kuah dibedakan. Kuahnya sendiri terdiri dari so'on (sejenis mie putih), kentang goreng yang diiris tipis-tipis dan bawang merah goreng sehingga aromanya terasa sedap. Untuk mengenang kekhasan makanan ini, ada sebuah restoran di Jalan Urip Sumoharjo yang mengabadikan nama Timlo Solo menjadi nama restorannya.

Nasi Tumpang, tidak kalah peminatnya dibandingkan dengan nasi timlo maupun nasi liwet. Bagi Gusti Mung atau Mbak Mung, dia lebih suka dipanggil begitu, sangat menyukai makanan khas Solo yang namanya "Sambel Tumpang" atau nasi tumpang. Kekhasannya terletak pada kuahnya. Kuah sambel tumpang terdiri dari tempe segar yang dicampur dengan "tempe bosok" yang keduanya direbus bersama-sama dengan bawang merah, bawang putih dan cabe yang telah dihaluskan. Untuk menambah cita rasa biasanya ditambah dengan daun salam. Setelah matang baru tempe yang telah direbus tadi, dihaluskan. Oleh karena itu penampilan dari sambal tumpang ini kental dan mengandung sedikit air. Sambal ini sangat enak jika dimakan dengan sayur-sayuran matang seperti bayam, touge, kacang panjang dan ditambah dengan karak dan dimakan pada waktu pagi hari. Kalau di Solo banyak didapatkan di pasar tradisional pada pagi hari.

Bagi Bapak Sutrisno, kepala Dinas Pariwisata, nasi tengkleng termasuk makanan paling populer setelah makanan serabi. Ini dibuktikan ketika nasi tengkleng diikutkan pada acara Gelar Seni dan Budaya di TMII, ternyata peminat dari tengkleng ini banyak sekali dan belum ada satu jam sudah habis. Mengapa tengkleng ini digemari?. *Pertama*, tengkleng termasuk makanan yang enak dimakan tanpa nasi. *Kedua*, sangat enak dimakan dalam keadaan hangat. Kalau di Solo, tengkleng yang terkenal murah dan enak dibawah gapura sebelah barat pasar Klewer atau di selatan Masjid Agung Solo. Tengkleng ini dikonsumsi tidak hanya kalangan menengah ke atas tapi juga kalangan menengah ke bawah. Yang membuat khas, cara memasak dengan kuali dari tanah. Tengkleng mengguna

kan banyak air dan sedikit air santan, jadi tampak sedikit keruh dan banyak kuahnya. Daging yang digunakan biasanya bagian kepala sapi yang meliputi pipi sapi, lidah, mulut, otak yang biasanya dibungkus dengan daun, dan "balungan" (tulang yang masih berdaging) sapi. Untuk daging biasanya ditusuk seperti sate.

Cabuk termasuk jenis makanan khas Solo yang sekarang ini jarang didapati, sehingga kemungkinan besar banyak orang tidak mengetahuinya. Cabuk yang diracik untuk lalaban dibuat dengan proses fermentasi bungkil biji wijen, berbentuk padat dan berwarna coklat. Dalam pembuatannya seperti membuat tempe yaitu wijen dan ragi dibungkus dengan daun pisang. Cabuk ini sangat enak jika dicampur dengan kelapa muda yang sudah diparut dan biasanya untuk lalaban(sayur mayur dalam keadaan mentah). Cabuk yang lain berwarna putih, biasanya digunakan untuk jajan pasar . Pada saat sekatenan, banyak dijumpai penjaja cabuk jenis ini. Penyajiannya biasanya dengan pincuk dari daun pisang. Ketupat yang sudah diiris tipis-tipis ditata rapi diatas pincuk, diatasnya dikasih cabuk yang sudah dicairkan, ditambah satu-dua 'karak' yang diatasnya dikasih cabuk kental atau belum dicairkan dan cara makannya pun khas, menggunakan lidi. Karena enaknya dimakan dengan rambak maka sering orang menyebutnya dengan "cabuk rambak". Entah mengapa jenis makanan ini jarang dijumpai sekarang kecuali pada even-even tertentu.

Makanan khas Solo lain yang terkenal adalah gado-gado. Kalau jenis makanan ini banyak khalayak yang sudah mengenal, rasa sedapnya, kadang pedas kadang tidak, tergantung selera dan kandungan gizinya cukup tinggi karena cukup beragam bahannya. Ada tahu goreng, tempe goreng, buncis rebus, kentang rebus, wortel rebus, touge rebus, kol, yang kesemuanya diiris dengan ukuran tertentu. Kuahnya terbuat dari sambal kacang goreng atau biasa disebut sambal pecel. Biasanya ada yang menambah dengan telur rebus. Dan yang tak kalah khas, ada kerupuk pati yang berwarna merah.

Untuk jenis makanan ringan yang terbuat dari tepung beras diantaranya serabi dan klepon. Serabi Notokusuman adalah serabi yang terkenal di berbagai kalangan Solo. Kandungan gizi dari serabi ini mayoritas merupakan sumber karbohidrat, sedikit protein, lemak nabati dan vitamin-vitamin tertentu, ungkap Dr. Ir. Sri Handayani, Ms, dosen mata kuliah Gizi dan Pangan Fakultas Pertanian.

Klepon dan cenil adalah makanan kecil serangkai. Klepon terbuat dari tepung beras. Warnanya hijau, di dalamnya terdapat cairan coklat yang terbuat dari gula jawa. Ukurannya sebesar bakso. Cenil terbuat dari tepung pati yang dicampur dengan zat warna tertentu sehingga tampak berwarna- warni dan tidak berasa. Cara pembuatannya dengan dimasukkan di air mendidih seperti membuat bakso. Biasanya cenil ini dijual bersama-sama klepon dan diatasnya dikasih kelapa dan gula halus. Karena termasuk makanan ringan, kandungan gizi dari cenil ini rendah, kadang-kadang jika esence atau zat pewarna bukan termasuk zat pewarna organik yang dianjurkan justru akan merugikan kesehatan.

Gempol pleret dan es gempol dulu banyak dijumpai pada saat sekaten dan di pasar-pasar tradisional namun sekarang jarang dijumpai di pasar-pasar tradisional. Gempol ini berbahan dasar kelapa dan tepung beras yang dibentuk seperti bola bakso. Dalam pembuatannya ditambah dengan garam, sehingga terasa asin. Pleret adalah jenang dari tepung beras, biasanya berwarna coklat atau sesuai dengan selera yang membuat dan manis. Gempol pleret ini biasanya dijual serangkai , dengan kuah air santan yang matang (seperti santan dawet), rasanya manis (dari jenang) dan asin (dari gempol) sehingga banyak diminati orang.

Bagi wisatawan yang ingin memberikan oleh-oleh buat sanak famili, biasanya memilih intip goreng. Makanan ringan ini banyak dijumpai di pasar klewer. Murah, enak dan khas. Intip goreng ada dua rasa, manis dan asin. Intip goreng manis biasanya setelah pembuatan, ketika intip goreng masih dalam keadaan panas, ditaburi 'juruh' atau cairan dari gula jawa, sehingga ketika intip ini dingin, 'juruh' tersebut dalam keadaan menggumpal.

Gempol pleret dan es gempol dulu banyak dijumpai pada saat sekaten dan di pasar-pasar tradisional namun sekarang jarang dijumpai di pasar-pasar tradisional

Beragamnya makanan khas kota berseri ini membuat tertarik para wisatawan selain karena adanya Keraton dan segala keunikan kota berseri. Bagaimana dinas pariwisata menyajikan berbagai ciri khas makanan tersebut ?. H. Sarimin Tjiptomihardjo, ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang sekaligus pemilik hotel dan restouran Kusuma Kartika Sari Solo mengatakan bahwa Pemda Kota Berseri ini pada tahun anggaran 1998 di alun-alun utara akan membangun tempat untuk penjualan makanan, ditujukan khususnya untuk pelancong-pelancong di Kota Berseri. Selain itu, ia juga telah menganjurkan setiap restoran di Solo untuk mensosialisasikan penyajian makanan khas Solo atau paling tidak menyelenggarakan festival makanan khas Solo. Hanya sayang ini semua tergantung 'greget' dari peminat dan penyaji sendiri.

Sedangkan bagi Sutrisno, kepala Dinas Pariwisata Solo mengungkapkan untuk pengembangan makanan khas ini adalah *pertama*, pembinaan kepada penyedia makanan khas tentang proses-proses dan pengembangannya, alternatif *kedua* dengan cara pengadaan perlombaan memasak atau semacamnya dan ketiga, dengan promosi atau mengikutsertakan proses-proses dan pengembangannya dalam pameran.

Alternatif pengembangan yang dilakukan diantaranya memodifikasi penampilan makanan tanpa merubah konstruksi dasarnya dan cita rasa tradisionalnya. Langkah ini misalnya pada jenis makanan kecil serabi, diatasnya ditambahkan pisang, nangka, kacang, coklat, dsb sehingga nilai gizi, dan penampilannya tambah menarik.

Makanan khas Solo yang ternyata sangat beragam tersebut merupakan salah satu kekayaan Kota Berseri ini yang bila dipasarkan secara baik akan dapa menjadi salah satu andalan pariwisata daerah. Hanya yang perlu mendapat perhatian serius adalah dalam teknik penyajian yang memang pada tahap inilah makanan berinteraksi dengan pembelinya. Penyajian yang baik, yang memperhatikan segi kesehatan, nilai gizi, serta kebersihannya adalah syarat mutlak bagi eksistensi makanan khas tersebut di benak para konsumennya.

❑Nurul HW/Indri

JUARA DUNIA DARI UNS

Memang sudah cukup lama prestasi ini diraih salah seorang mahasiswa UNS. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa tidak membuat warga UNS sedikit bangga karena ada anggota warganya yang mempunyai prestasi yang membanggakan. Peristiwa ini terjadi bulan April 1997, salah seorang mahasiswa UNS berhasil mencatatkan prestasi tingkat internasional, tepatnya ia berhasil meraih juara pertama dalam kejuaraan dunia pencak silat di Malaysia.

Rony Syaifullah nama si juara tersebut. Dia mahasiswa FPOK angkatan 1994. Memang prestasi ini lumayan mengejutkan, dan memang tidak banyak warga UNS yang mengetahuinya. Kesan mengejutkan tersebut juga dirasakan oleh yang bersangkutan. Padahal di kejuaraan daerah dan kejuaraan nasional sama sekali belum pernah menang, tuturnya pada Ichwan Chasani dari Kentingan ketika ditemui sehabis jogging di kampus Manahan. Bahkan di PON XIV lalupun dia kalah di babak pendahuluan, lanjutnya. Namun sebelum dia terjun di kejuaraan dunia dia sempat mencatatkan prestasi di SEA GAMES Jakarta sebagai peraih medali emas di kelas H (80-85 kg).

Anak muda kelahiran Simo, Boyolali, 26 Agustus 1976 ini mengawali dunia laganya ketika masih belajar di SMA Muhammadiyah 8 Surakarta. Mulai bertanding awal tahun 1995 di Pekan Olah Raga Daerah (Porda), kemudian Pra-PON, PON dan langsung ke SEA GAMES dan Kejuaraan Dunia. Berkat prestasinya dia mendapat bonus dari pemerintah berupa uang tunai yang jumlahnya lumayan katanya, dan kesempatan menjadi pegawai negeri sipil di Kabupaten Boyolali, " Tapi saya ingin menyelesaikan kuliah dulu", sambungnya. Dari kampus ia juga memperoleh bonus berupa pembebasan dari kewajiban membayar SPP sampai lulus.

" Asalkan masih dalam jalur yang benar dan tidak bertentangan dengan ajaran agama dan hati nurani, artinya dengan jalan damai saya sangat mendukung. Tetapi kalau sudah mengarah ke kerusuhan, saya tidak mau ikut campur. Saya juga sering ikut demo di kampus Kentingan," begitu paparnya ketika ditanyakan tentang maraknya aksi nmahasiswa di kampus UNS. Selamat atas prestasinya, semoga semakin menambah maraknya dunia persilatan di UNS.

❑Ichwan Ch

SAYA DUKUNG 200% AKSI MAHASISWA

Slamet Raharjo Jarot namanya, sutradara dan pemain film kawakan ini lahir di Serang, Jawa Barat pada tanggal 21 Januari 1949. Aktifitasnya kini sebagai tenaga pengajar di Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta. Saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Karyawan Film Televisi (KFT), juga duduk sebagai anggota BP2N (Badan Pertimbangan Perfilman Nasional). Bapak dua anak dan sutradara dari sembilan film ini adalah pemegang dua Piala Citra untuk kategori Sutradara Terbaik dan dua Piala Citra sebagai Aktor Terbaik. Penghargaan yang diraih lewat pentas perfilman internasional adalah Jacques Demy Award dari Festival Film Tiga Benua di Nantes, Perancis sebagai Sutradara Terbaik dan Unicef Award dari komisi PBB untuk anak-anak di Berlin, Jerman untuk karyanya di film Langitku Rumahku.

Mengawali karir di tahun 1970 sebagai orang teater, namun karena merasa bahwa di teater ada cerita yang tidak bisa diungkapkan melalui media teater akhirnya memberanikan diri membuat film sebagai media ekspresinya. Main film sebagai aktor sebanyak sembilan kali, berperan sebagai sutradara pada sekitar sembilan film, demikian ceritanya pada Indri dari Kentingan. Ketika ditanyakan perbandingan kondisi perfilman sekarang dan dahulu, dikatakannya bahwa dahulu yang membuat film adalah orang film juga, jadi problemnya juga problem orang film sendiri. Sementara sekarang orang film tidak perlu bicara tentang film, jadi orang film sekaligus bukan orang film.

Ketika ditanyakan pendapatnya tentang maraknya dunia sinetron akhir-akhir ini, menurutnya hal tersebut sebagai sesuatu yang positif sebagai kemungkinan prospek film Indonesia , namun bila daya saing tidak ditingkatkan bisa dipastikan akhirnya akan mati juga seperti film Indonesia. Untuk itulah dia berharap agar film dikembalikanpada orang film.

Saat diminta pendapatnya tentang maraknya aksi mahasiswa dia berkata," Mahasiswa menyuarakan suara saya juga, karena itu saya dukung 200%. Orang film sering dibungkus tuduhan sebagai tidak bermoral, maka saya titipkan moral saya pada para mahasiswa".

❑ Indri

PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI

Tanggal 13-19 Mei lalu UNS kembali mengadakan pemilihan Mahasiswa Berprestasi se-UNS. Acara diselenggarakan di gedung Student Centre. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan meliputi Indeks Prestasi Komulatif dengan bobot penilaian 20%, pembuatan karya tulis ilmiah dengan bobot nilai 30%, keaktifan di kegiatan ekstra kurikuler dengan bobot nilai 20%, psiko test atau kepribadian 15%, dan kemampuan berbahasa Inggris juga dengan bobot penilaian 15%. Peserta berasal dari semua fakultas yang ada di UNS, dimana tiap fakulas diwakili satu orang peserta.

Hari pertama penilaian sempat diwarnai kejanggalan dengan tidak datangnya wakil dari Fakultas Ekonomi. Menurut Drs. Trisno Martono sebagai ketua penilaian, pemilihan mahasiswa berprestasi UNS dengan kriteria penilaian seperti di atas sekaligus untuk mencari kriteria mahasiswa teladan UNS yang nantinya akan diajukan ke pemilihan tingkat nasional. Keluar sebagai mahasiswa terbaik dalam pemilihan ini adalan Eva Sulistyowati, mahasiswa Fakultas Kedokteran angkatan 1994. Selamat untuk Eva.

❑ Yunanto

PASAR PUISI ATAU PUISI PASARAN

Foto : Repro Inti Jaya

Puisi sebagai satu komoditas hasil karya manusia membutuhkan komunitas yang akan mengkonsumsinya, atau membutuhkan pasar sebagai penikmatnya. Bebicara pasar jelas akan melibatkan tiga komponen, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi, demikian papar budayawan sekaligus dekan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, Drs. Darmanto Yatman, SU ketika ditemui Ichwan dari Kentingan di sela-sela acara Pasar Puisi Jawa Tengah di Taman Budaya Surakarta, akhir April lalu.

Akan tetapi konsep demikian tidak berlaku mutlak, dalam dunia perpuisian konsumen bisa mendikte penyair. Pasar bertindak sebagai stimulator atau perangsang bagi penyair dalam berkarya. Memang bisa saja penyair berkarya berdasar mood-nya, akan tetapi dalam dunia nyata mau tidak mau penyair acap kali harus mengikuti selera pembaca atau penikmat puisi bila ingin puisinya mendapat tempat di pasar. Dalam konsep demikian pasar menjadi dominan dalam proses penciptaan puisi, atau akan timbul suatu pertanyaan berkaitan dengan pasar atau penikmat puisi, yaitu puisi seperti apa yang bisa dijual?

Puisi sebagai alat ekspresi sekaligus sebagai media berkomunikasi menghasilkan dua sisi dunia perpuisian yaitu puisi instant dan puisi populer atau puisi ngetrend, puisi yang hanya mengikuti perkembangan lingkungan tempat dia berada. Dengan demikian akan terbentur pula pada dimensi dimana puisi itu bisa hidup, puisi yang hidup adalah puisi yang selalu menawarkan alternatif-alternatif dan kehidupan praksis. Keadaan demikian menyebabkan pasar puisi mempunyai banyak dimensi yang bisa menampung berbagai macam karakter penyair atau kreator puisi, dan inflasi penyair adalah hal yang jamak.

❑Ichwan

HUBUNGAN KRATON DAN PEMDA, DISHARMONIS?

Surakarta sebagai salah satu sentra kebudayaan Jawa jelas tidak bisa begitu saja menghilangkan eksisitensi kraton dalam perjalanan dinamika kehidupannya. Fungsi kraton memang bukan lagi sebagai pemegang legitimasi kekuasaan formal, perannya telah diambil alih oleh pemerintah daerah.

Kepemimpinan secara formal memang yang berhak mengatur kondisi wilayah di bawah kekuasaannya. Akan tetapi kepemimpinan informal yang tumbuh di dalamnya juga tidak bisa dikesampingkan peranannya dalam mengatur harmonisasi hubungan masyarakat dengan penguasa atau pemerintah. Surakarta sebagai salah satu sentra kebudayaan Jawa jelas tidak bisa begitu saja menghilangkan eksisitensi kraton dalam perjalanan dinamika kehidupannya. Fungsi kraton memang bukan lagi sebagai pemegang legitimasi kekuasaan formal, perannya telah diambil alih oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian kraton tetaplah memegang legitimasi informal, dalam arti dia tidak lagi sebagai pemegang legitimasi pemberlakuan budaya feodalisme namun dia harus bermitra dengan pemerintah daerah dalam membangun wilayah dengan porsi atau bagian yang berbeda. Sejarah awal kraton yang berdiri akibat perjanjian Gianti 13 Februari 1755 yang membagi kerajaan Mataram menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta maka Kraton Solo jelas tidak bisa dipisahkan dari perkembangan kebudayaan Jawa. Dialah setelah kekuasaan atas rakyat dan wilayah "hilang" yang punya kewajiban dan tanggung jawab dalam pembangunan bidang budaya, sedangkan pemerintah daerah sebagai pemegang legitimasi kekuasaan formal bertugas mengawasi dan melaksanakan pembangunan daerah di segala bidang termasuk bidang budaya bekerjasama dengan kraton.

Di dalam daerah yang demikian, seperti Yogyakarta dan Solo kesan adanya kepemimpinan formal dan informal memang tidak bisa dibantah begitu saja. Dapatlah disederhanakan di sini adanya dua kepemimpinan yaitu kraton dan pemerintah daerah. Acap kali keduanya terlibat dalam permasalahan yang menimbulkan kesan di masyarakat bahwa hubungan keduanya tidak harmonis. Beberapa kejadian yang dimaksud antara lain pembangunan Tugu Adipura di kawasan Gladak yang dianggap merusak citra estetis kraton, tidak adanya perhatian dari pemerintah daerah terutama dalam dana pengelolaan kraton dan kesejahteraan abdi dalem oleh kraton dianggap sebagai sikap kurang peduli, kalau tidak boleh dikatakan tidak peduli. Di lain pihak pemerintah daerah juga menikmati dan mengelola income yang diterima dari keberadaan kraton, misalnya melalui tradisi perayaan sekaten. Isyu yang baru saja adalah akan dijualnya alun-alun kidul sebagai sarana wisata dan hiburan masyarakat,yang untung masih bisa dikejar oleh pihak kraton. Permasalahan yang lain yang sempat ramai adalah rencana pemerintah daerah ntuk memindahkan gedung Mamba'ul Ulum yang untuk selanjutnya akan digunakan sebagai pertokoan. Rencana tersebut berbuntut sengketa meskipun akhirnya gagal. Puro Mangkunegaran-pun tidak luput dari sengketa atau salah paham dalam beberapa hal dengan pihak pemerintah daerah. Masalah sengketa antara kerabat keraton dengan HKMN juga dianggap sebagai turut campurnya Pemda Solo dalam urusan intern kraton. Kalau dibandingkan dengan Yogyakarta, memang keadaan Solo jauh berbeda. Di Yogya peran antara kekuasaan formal pemerintah daerah dengan pengaruh informal yang dipegang Kesultanan Yogyakarta seakan telah terbagi secara harmonis sementara di Solo pembagian peran dan komunikasi antara keduanya, khususnya komunikasi pembangunan antara pemda dengan pemimpin kraton sangat minim, untuk tidak dikatakan tidak ada. Ketidakharmonisan ini bila dibiarkan terus menerus jelas akan membawa dampak yang tidak baik bagi perkembangan sebagian sektor pembangunan di daerah Solo.

Tugu Adipura Foto:Dok. Kentingan

Memang dalam kenyataannya antara kraton dan pemda mempunyi kedudukan yang sangat berbeda dan tidak bisa dikatakan sebagai dua instansi yang mempunyai kedudukan yang sama. Kraton hanyalah pemegang legitimasi kepemimpinan informal sementara Pemda Solo jelas sebagai pemegang kekuasaan formal atas daerah Solo dan sekitarnya. Peristiwa sengketa dalam masalah pembuatan Tugu Adipura dan pelaksanaan sekaten yang sebagian besar hasilnya memang masuk ke kas pemda sebenarnya boleh dikatakan hanya karena perbedaan kebijakan dalam suatu hal saja, dan kurang tepat bila dikatakan karena hal tersebut maka hubungan antara pemda dan kraton menjadi tidak harmonis. Contoh paling nyata adalah dalam masalah sekaten, pemda mendudukkan kepentingan sekaten sebagai bidang pariwisata dan ekonomi sehingga orientasinya jelas ke arah perolehan pendapatan bagi pemda. Sementara bagi pihak kraton, sekaten merupakan acara yang lebih ke corak budaya, pelestarian nilai-nilai budaya dan juga dimensi spiritual.

Demikian juga asumsi adanya dualisme kepemimpinan di daerah juga tidak tepat karena dalam kedudukan yang seperti itu kraton jelas tidak punya kedudukan sekuat pemda, kedudukan kraton boleh dikatakan hanya semacam rumah tangga yang ada di daerah Solo yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Pemecahan yang paling baik agar tidak berulang dan berlarut-larutnya perselisihan antara kraton dan pemda adalah dengan membuat kebijakan yang baik. Pemda harus menyadari bahwa kraton mempunyai nilai pengembangan budaya Jawa, sebagai contoh acara sekaten hendaknya diserahkan sepenuhnya kepada kraton dan yang lebih penting adalah

pelaksanaan kebijakan tersebut dengan segala konsekwensinya bagi kedua pihak.

Dalam kenyataan perjalanan kedua pihak memang masih terdapat ambivalen yang jelas. Di satu pihak pemda punya hak yang jelas dan spesifik dalam pengaturan tata kota dan administrasinya , dan di pihak lain pihak kraton juga masih punya ambisi untuk tetap eksis dalam percaturan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di Solo. Dalam usaha untuk memenuhi ambisi dan hak serta fungsi masing-masing memang masih terkesan bahwa pamdalah yang selalu ingin terpenuhi ambisi dan agendanya. Selama SK menteri yang menyatakan bahwa pemdalah satu-satunya penguasa tunggal di daerah, maka memang sudah sewajarnya bila kraton berada dalam wilayah pengaturan dan kekuasaan pemda. Terlebih lagi status daerah Solo yang bukan daerah istimewa memang berbeda dengan keadaan di Yogyakarta, kalau diambil sebagai perbandingan.

Berdasarkan peraturan formal, yaitu penetapan pemerintah No. 16 SD 1986 kraton memang dikuasai oleh oleh pemerintah daerah hanya dalam pengelolaannya diserahkan kepada keluarga kraton baik Mangkunegaran maupun Kasunanan, tetapi bangunan-bangunannya atau wjud fisik dari kraton tersebut tetap dikuasai oleh pemda, dan berdasar peraturan tersebut pemda berkewajiban untuk memberikan subsidi atau dana pembangunan pada kraton. Dinas pariwisata sebagai bagian dari pemerintah daerah memang mempunyai kedudukan dalam membantu pemda mempromosikan kraton sebagai aset wisata dan sumber pendapatan pemda, dana promosi itu sendiri diambilakandari anggaran dinas pariwisata sendiri.

Pada masa walikota Solo dipegang oleh Imam Sutopo hubungan antara kraton dan pemda sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Alokasi dana untuk kraton sudah dimasukkan dalam APBD, yang sebelumnya hanya diperoleh dari APBN yang jumlahnyapun sangat kecil. Dengan kata lain saat ini sudah ada pemikiran yang riil tentang bagaimana agar kraton memperoleh keuntungan dari keberadaannya tersebut. Contohnya adalah inventarisasi cagar-cagar budaya di kraton oleh pemda yang memang usaha tersebut terlepas dari kraton sebagai pembangun dari cagar-cagar budaya tersebut. Kebijakan tersebut jelas menunjukkan adanya kepedulian pemerintah daerah terhadap kraton disamping masa-masa sebelumnya.

Kembali pada sengketa yang pernah terjadi antara pihak pemerintah daerah dan kraton, kaus pembangunan Tugu Adipura contohnya, adalah kasus yang terjadi sebelum masa kepemimpinan Imam Sutopo, yaitu di masa wali kota Hartono. Persoalan tersebut muncul justru di saat kepemimpinan sudah di tangan Imam Sutopo. Pembangunan sudah selesai dan bangunan sudah terlihat mata justru baru dipersoalkan, tidak di saat awal pembangunan. Sekarang langkah yang paling baik adalah menjaga aset-aet budaya, cagar-cagar budaya dan dipatenkan menjadi hak milik Solo, termasuk di dalamnya tari-tarian budaya. Konflik yang muncul sekarang adalah karena pemahaman tentang aset kraton dengan keberadaan pemerintah daerah Surakarta yang sah dan kraton dengan Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1988 sebagai pengelola aset budaya . Kalau kota ini menjadi metropolis nantinya jelas akan berorientasi profit, pada situasi ini akan memungkinkan timbulnya konflik yang lebih besar lagi.

Kraton hanya memiliki hak pengelolaan, bukan hak milik, dan harus dibedakan antara kraton Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta serta Pakualaman. Secara politis dulu kraton Solo pernah punya "cacat", karena dianggap pendukung pemerintah Hindia Belanda, lalu lahirlah UU Darurat No. 1 Tahun 1946 tentang pembentukan pemerintahan swapraja yang berarti menghapuskan eksistensi pemerintshsn kraton sebagai pemerintah yan punya kewenangan administratif. Pemerintahan dalam arti politis yaitu memerintah warga beralih ke pemerintah daerah. Tetapi tidak dipelajari dan diatur secara tegas pengelolaan aset kraton pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 1946. Memang seharusnya diatur tentang daerah-daerah atau jatah mana yang untuk kraton dan mana yang untuk pemerintah daerah. Dalam situasi seperti yang berlaku sekarang ini dapat dimanfaatkaan oleh pihak-pihak yang mengetahui dan paham akan kelemahan pengaturan hubungan kraton dengan pemerintah daerah.

Selama ini posisi DPRD dalam hubungannya dengan perselisihan antara pemerintah daerah dan kraton adalah sebagai penengah dan mediator. Menurut UU No. 5 Tahun 1974 pasal 13 ayat 1 DPRD Solo berada pada posisi mediator, khususnya komisi E. Misalnya dalam kasus pencaplokan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bakti Jurug oleh Rumah Makan

Arum Manis, juga kasus Mamaba'ul Ulum. Mekanisme komunikasipun sebenarnya sudah ada, misalnya Drs. Dipo Kusumo yang berkedudukan sebagai anggota DPRD dari FKP di komisi pembangunan. Dari sisi kelembagaan juga sudah ada lembaga yang mengelola aset budaya Surakarta.

Dana pengelolaan kraton sebgaian berasal dari pemerintah pusat, yaitu sebesar 60 juta tiap tahun. Wilayah kraton yang luas dan jumlah pegawai (abdi dalem) yang banyak menyebabkan tidak mencukupinya dana tersebut. Gaji pegawai berkisar pada angka Rp. 15.000,00 perbulan, dengan tambahan gelar kebangsawanan. Sedangkjan anggaran pengelolaan kraton yang berasal dari Pemerintah Daerah Tingkat I sekarang ini sekitar setengah milyar. Di lain pihak Bappeda juga sudah menginventarisasi benda-benda cagar budaya dan akan ditempatkan tulisan di benda-benda cagar budaya tersebut yang meruiwayatkan benda-benda tersebut. Ini merupkan salah satu hasil pemikiran pemda yang konstruktif.

Dalam kedudukan kelembagaan, kraton adalah sebagai bagian dari pemerintah daerah, bukan sebaliknya. Kewenangan kraton mengelola aset-aset yang ada di lingkungannya, misaalnya Masjid Agung, Kraton sendiri, dan Pasar Gede. Yang harus dipahami adalah bahwa kraton hanya berwenang dalam hal tersebut. Kelemahan ini jangan sampai dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Bangunan kuno yang yang berpindah tangan pada swasta harus disyukuri karena atas sikap tegas pemerintah daerah sehingga tetap terjaga kelestariannya, bangunan itu meskipun dikelola swasta namun arsitekturnya tidak boleh diubah. Misalnya Pertani yang dibeli Sritex, berubah fungsi tetapi tidak boleh diubah bentuknya.

Kraton tidak lagi berperanan mengembangkan nilai-nilai feodalisme yang dimilikinya, tetapi adanya upacara-upacara kraton, benda-benda cagar budaya ditingkatkan fungsinya sehingga memiliki keuntunan secara material. Contoh lainnya adalah tarian, motif batik, corak arsitektur harus dipatenkan agar tidak dicomot oleh negara asing. Karena jika dipatenkan kraton akan memperoleh royalti bila hak milik tersebut dipakai orang lain. Hendaknya hal tersebut menjadi pemikiran masysrakat Surakarta dan komunitas perguruan tingginya tentu.

Selama ini masyarakat juga tiudak melihat kraton sebagai simbol kekuasaan, namun hanya semacam simbol budaya. Pengaruhnya pada masysrakat tipis karen asekarang telah memasuki era global. Yang perlu dipikirkan adalah bagaiman kraton memanfaatkan aset-aset budaya sehingga karton bisa menghasilkan materi, tidak hanya menggantungkan pada APBD ataupun APBN. ❑

Himawan/Indri/Utami/Eni/Ichwan

GRAy. Koes Moertiah Wirabhumi

KRATON SEBAGAI CAGAR BUDAYA

UNS sebagai lembaga pendidikan tinggi yang besar seharusnya mendukung usaha tersebut. Usaha untuk mengembangkan fungsi kraton sebagai pusat budaya tersebut studinya yang membuat juga UNS. Seperti di Sastra Jawa, dosen-dosennya juga tidak meninggalkan potensi kraton.

Berkaitan dengan masalah Solo sebagai kota budaya, bagaimana peranan kraton terhadap pengembangan budaya?

Kalau kraton sendiri dalam kaitannya dengan pengembangan budaya, terutama budaya yang bersumber dari kraton sendiri, selama ini sampai detik ini sangat kita utamakan dalam kehidupan kraton sehari-hari. Dan untuk penyebaran keluar kraton, berdasarkan permintaan dari luar, menurut data atau angka yang kami perolehternyata memang masih banyak yang membutuhkan nilai-nilai dan kebudayaan yang bersumber dari kraton, karena memang kraton kan sumber dari kebudayaan Jawa itu sendiri. Dan apa yang saya lakukan selama ini, ya, apa yang bisa mendukung dan memberikan informasi terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat. Seperti yang saya laksanakan dengan membuka Yayasan Pawiyatan Kebudayaan Jawa Kraton Surakarta. Untuk pawiyatan ini yang ditekankan adalah pendidikan diman yang dulu saya jalankan adalah kesenian saja, namun ternyata untuk masalah kebudayaan membuat kita harus cepat menangani karena banyak masyarakat yang membutuhkan, meminta informasi dari kraton. Seperti sekarang ada sarasehan budaya Jawa tiap malam Jum'at, terus ada semacam sanggar pambiwara, yang selain menekankan pada belajar bagaimana menjadi MC berbahasa Jawa yang baik juga tiudak luput dari pendidikan budaya itu sendiri. Dari mulai membaca tulisan Jawa, menulis, tata berbusana , adat istiadat. Disitu hal tersebut diajarkan semua, tidak melulu bagaiman belajar menjadi MC berbahasa Jawa yang baik. Hal tersebut dilaksanakan setiap hari Senin dan Sabtu jam 16.00 - 19.00 dan untuk sekarang sudah angkatan ke-7. Jadi kita sudah enam kali meluluskan peserta, dan untuk kali ini, angkatan ketujuh ada 76 orang, yang amgkatan kemarin dari 43 pendaftar lulus 34. Peserta kebanyakan dari masyarakat umum, yang banyak dari guru dan kalangan perangkat desa.

GRAy. Koesmoertiah Wirabhumi
Foto:Dok. Kentingan

Jadi kepercayaan masyarakat Solo terhadap keberadaan kraton masih cukup besar?

Kalau saya lihat memang begitu, khususnya dalam hal kebudayaan. Ternyata sekarang ini masysrakat sepertinya mulai kembali bagaimana tata cara upacara pengantin adat jawa yang benar. Dan khusus untuk pambiwara itu banyak diminta bila ada acara atau orang yang punya acara dengan dasar kebudayaan Jawa. Seperti acara *mantu, mitoni, tedhak siten*, dan sebagainya.

Kebijakan pembangunan kraton sendiri banyak berasal dari inisiatif kraton ataukah pemerintah daerah?

Sebelumnya untuk pembangunan bidang budaya dari pemda memang tidak ada perhatian. Nah dengan akan adanya Dinas Kebudayaan yang akan dibuat itu nantinya akan menyentuh kraton atau tidak , karena untuk Kraton dan Mangkunegaran sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak luarpun kita bisa berjalan sendiri karena memang sudah menjadi tanggung jawab kita. Tanpa harus m,enunggu-nunggu program dari pemerintahpun kita sudah berjalan sendiri untuk melestarikan kebudayaan tersebut.

Selama ini pengelolaan kraton melibatkan pihak luar ataukah tidak?

Mereka yang duduk dalam yayasan ini orang luar semua. Yang orang dalam hanya saya, terus ada pengurus yang bertanggung jawab terhadap kraton atau P dan K untuk program pendidikannya, itu semua orang dalam sendiri, seperti mas Bambang Irawan (dosen FE UNS), dan Pangeran Puger. Jadi ya kita-kita sendiri yang bertanggung jawab, tetapi pendidik dan yang kerja di sini semua orang luar yang kebetulan setelah benar-benar nyengkuyung budaya kraton dan bisa menjadi promotor untuk menyebarluaskannya lalu kita beri gelar "anon-anon" . Jadi bukan seperti pengabdian abdi dalem yang dihitung masa pengabdiannya untuk mendapatkan penghargaan tersebut, tetapi karena dia berjasa untuk menyebarluaskan budaya kraton. Jadi anon-anon itu penghargaan yang tidak berdasarkan pengabdian, tetapi karena partisipasi dia terhadap kraton.

Kalau abdi dalem?

Abdi dalem itu digaji sedang anon-anon tidak digaji. Tetapi dia bertugas untuk menjaga budaya kraton, motivasinya memang karena kesadaran sendiri.

Pendapat anda tentang Dinas Kebudayaan tadi apakah justru tidak semakin menambah persoalan?

Kita harapkan jangan begitu. Tidak ada dinaspun k i t a sudah berjalan. Kalau ada

dinas ya syukur kalau memang akan membantu mengangkat budaya kraton, untuk disebarkan ke masysrakat luas. Ya, kita harapkan begitu. Kalau *toh* tidak membantu atau menyentuh dimensi budaya kraton ya untuk apa, karena yang menjadi pusat budaya di sini adalah Kraton dan Mangkunegaran.

Bagaimana sebenarnya anda melihat hubungan kraton dengan pemda selama ini?

Baik-baik saja. Seperti upacara grebeg dan sekaten itu ada sumbangan dari pemda. Tetapi memang untuk pemeliharaan dan penyebaran budaya belum ada.

Apakah selama ini sudah ada mekanisme yang bisa mendudukkan pihak kraton dan pemda sehingga bisa berbicara untuk menyamakan persepsi dalam mengupas semua persoalan yang menyangkut kedua pihak?

Ya, memang dibuat "begitu" *kok*. Sekarang misalnya sekaten, yang kerja siapa? Panitianya dari pemda, kita memang dapat jatah atau kursi di sana, tetapi tidak berhak bicara, tidak berhak usul. Pokoknya, kraton butuh apa? Pemda memakai ya bayar, *sakkarepe alun-alun arep dinggo opo*. Aneh, kan. Tetapi kita ya tidak akan tinggal diam terus. Semakin alam, kita kan bukan anak kecil lagi, bahkan dewasa dan sudah tua. Apakah kita kan meninggali anak cucu suasana seperti ini. Kita kan inginnya meninggalkan sesuatu yang sudah mapan. Memang sejak awal kemerdekaan kraton boleh dikatakan sudah mati, mati dalam arti mandeg. Ternyata dalam keadaan seperti itu kita merasa tidaka enak. Ternyata masyarakat masih membutuhkan keberadaan kraton, meskipun entah apanya yang dibutuhkan, tetapi masayarakat masih membutuhkan. Otomatis kita kan ingin bangun lagi, tentu saja tidak bisa lepas dari dukungan semua pihak. Tinggal pihak mana yang bisa kita ajak. Ya, mestinya pihak yang dicarai kan yang bisa diajak kerja sama, buat apa kita mendesak-desak, *nyuwun paring-paring* kalau akhirnya hanya didiamkan saja.

Apakah ada kemungkinan kraton akan menuntut?

Tidak. Kita tidak akan menuntut, kita *alon-alon* saja, tidak *grudak-gruduk*. Nanti bisa dikatakan tidak beradab, tidak punya sopan santun.

Lalu pandangan anda sendiri untuk menjernihkan itu semua?

Ya, apa yang saya kemukakan itu kan sudah mencerminkan pandangan pribadi saya. Yang jelas kraton tidak akan tinggal diam, seperti apa yang saya lakukan *sak kuate* , kita tetap berusaha mempertahankan budaya di sini.

Apakah ada kontribusi dari institusi pendidikan tinggi seperti UNS terhadap usaha tersebut?

UNS sebagai lembaga pendidikan tinggi yang besar seharusnya mendukung usaha tersebut. Usaha untuk mengembangkan fungsi kraton sebagai pusat budaya tersebut studinya yang membuat juga UNS. Seperti di Sastra Jawa, dosen-dosennya juga tidak meninggalkan potensi kraton. Kalau ada informasi tentang budaya Jawa yang inin mereka sampaikan pada mahasiswanya mereka juga ke sini. Jadi sebenarnya untuk UNS sendiri bagi kita adalah mitra yang baik. Kebetulan saya juga alumni UNS, saudara-saudara saya juga banyak yang di UNS.

Berkaitan dengan UNS sendiri menurut pengamatan anda bagaiman kontribusinya terhadap pengembangan budaya di Solo?

Kalau dulu di UNS sangat ditekankan masalh budaya tersebut. Tetapi sejak Pak Koento agak mundur. Kelihatannya sekarang mulai Pak Haris masalah budaya sepertinya mau dihidupkan kembali. Pak Koento dulu hari ini dilantik gamelan besoknya langsung hilang kok. Padahal dulu kita punya BKKT, setiap hari latihannya di pusat. Terus karena hal tersebut latihannya pindah kesini. Terus waktu mas Bambang jadi dosen di sana latihannya malah di TBS, aneh to. Padahal UNS punya gamelan sendiri, gedung yang memenuhi syarat, dan peminat yang banyak tapi malah kacau to. Dulu pendiri BKKT itu Mas Dharsono (FISIP) yang sempat jadi asprinya Mensos. Terus habis itu saya yan pegang, terus Mas Bambang Irawan. BKKT itu boleh dikatakan nyawanya dari kraton, jaya-jayanya ya waktu saya pegang, sekitar tahun 1979-1985. Tapi begitu Pak Koento masuk langsung mati. Padahal prestasinya sudah sampai tingkat nasional. Kita dulu diundang pada pembukaan Javanologi, terus pernah juga pentas di Hyatt. Dan sekarang nggak tahu saya *mati po urip*, setelah adanya Mas Bambang Irawan.

Nanti bisa-bisa kraton ini akan menjadi seperti satu rumah di suatu kampung yang urusannya adalah urusan rumah tangga itu sendiri tanpa berkaitan dengan rumah-rumah lainnya, bgaiman menurut anda?

Kalau kita tidak bangkit mulai sekarang ya pasti akan terjadi seperti itu. Tapi paling tidak kita harus berusaha mengembalikan keutuhan kraton itu sendiri. Saya merasa agak *ayem* karena ternyata apa yang saya lakukan untuk melestarikan dan mengembangkan budaya banyak mendapat dukungan dari masyarakat luas. Seperti mereka yan lulus pambiwara itu diharapkan bisa ikut menyebarkan ilmunya pada masyarakat luas, dan menginformasikan bahwa budaya Jawa di kraton masih bisa dicari, dipelajari, dan dilestarikan.

Untuk pendidikan pambiwara itu sendiri dimulai tahun berapa?

Sekitar empat tahun yang lalu, jadi ya tahun 1994. Yang dipelajari banyak, seperti tata busana, adat istiadat, membaca dan menulis huruf Jawa, dan lainnya lagi. Juga tenyang upacara adat, tentu saja tidak dilupakan kurikulum dsar seperti Pancasila, tapi titik beratnya tetap pada budaya. ❑

Ichwan

CV. PRIMA GRAFIKA

JEBUGAN, TELP. (0272) 25348 KLATEN UTARA

MELAYANI SEMUA KEBUTUHAN GRAFIKA ANDA